



Katalog BPS: 9199017

Edisi 67
Desember 2015

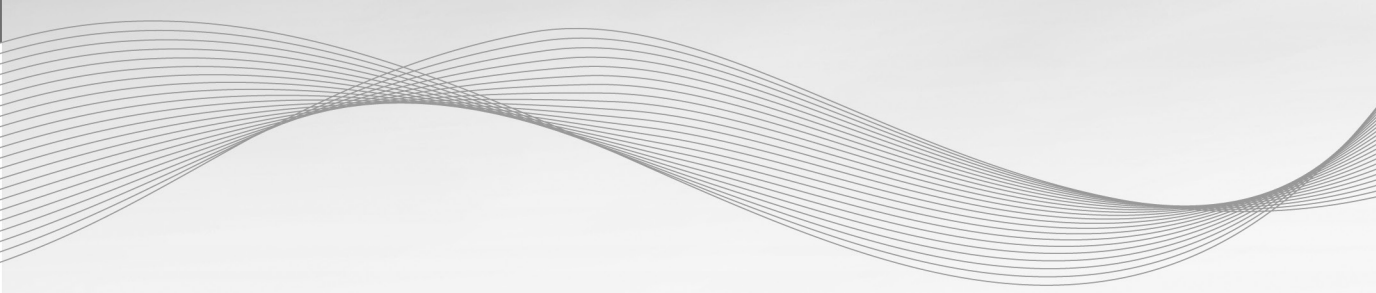
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi



BADAN PUSAT STATISTIK

Edisi 67
Desember 2015

Laporan Bulanan
Data Sosial Ekonomi



Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi

Desember 2015

ISSN: 2087-930X

Katalog BPS: 9199017

No. Publikasi: 03220.1520

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xxii + 182 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Direktorat Statistik Industri

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik, 2015

HEADLINES

1. Inflasi

Pada November 2015 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,37 persen dan tingkat inflasi November 2015 terhadap November 2014 (tahun ke tahun) sebesar 4,89 persen.

2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,73 persen meningkat dibanding capaian triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 dibanding triwulan sebelumnya (*q-to-q*) tumbuh sebesar 3,21 persen.

3. Ekspor

- Nilai ekspor Oktober 2015 sebesar US\$12,08 miliar, turun 4,00 persen jika dibanding ekspor September 2015 dan turun 20,98 persen dibanding ekspor Oktober 2014.
- Nilai ekspor nonmigas Oktober 2015 mencapai US\$10,71 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,51 miliar, hasil industri pengolahan US\$8,92 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,27 miliar.

4. Impor

- Nilai impor Oktober 2015 sebesar US\$11,07 miliar, turun 4,27 persen dibanding impor September 2015 dan turun 27,81 persen jika dibanding impor Oktober 2014.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Oktober 2015 mencakup barang konsumsi sebesar US\$0,77 miliar, bahan baku/penolong US\$8,25 miliar, dan barang modal US\$2,05 miliar.

5. Kependudukan

- Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Indonesia Juni 2014 berjumlah 252.164,8 ribu orang.
- Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

6. Ketenagakerjaan

- Pada Agustus 2015, jumlah penganggur sebesar 7,56 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,18 persen.
- Dalam setahun terakhir (Agustus 2014–Agustus 2015), Jumlah penduduk bekerja bertambah 190 ribu orang.

7. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Oktober 2015 naik masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,31 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Oktober naik sebesar 0,17 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Oktober 2015 naik 0,39 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

8. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Perdesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP November 2015 naik 0,48 persen dibanding Oktober 2015.
- Pada November 2015, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,43 persen.
- NTUP November 2015 naik 0,63 persen dibanding Oktober 2015.

9. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras November 2015 sebesar Rp13.139,00 per kg, naik 0,55 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga daging ayam ras naik 1,69 persen; telur ayam ras naik 1,57 persen; cabai merah turun 3,00 persen; cabai rawit turun 2,79 persen; minyak goreng turun 1,00 persen.

10. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan) pada triwulan III-2015 naik 0,28 persen terhadap triwulan II-2015 (*q-to-q*). Sedangkan terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) naik 2,06 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Rata-rata harga beras pada November 2015 sebesar Rp13.139,00 per kg, naik 0,55 persen dari bulan sebelumnya. Harga beras pada November 2015 (tahun ke tahun) naik 12,39 persen, lebih tinggi dari inflasi periode yang sama (4,89 persen). Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah daging ayam ras naik 1,69 persen; telur ayam ras naik 1,57 persen; cabai merah turun 3,00 persen; cabai rawit turun 2,79 persen; minyak goreng turun 1,00 persen.

11. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Kondisi bisnis triwulan III-2015 meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 106,04). Tingkat optimisme pelaku bisnis lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2015 (nilai ITB sebesar 105,46).
- Kondisi bisnis triwulan IV-2015 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 103,72). Namun tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III-2015 (nilai ITB sebesar 106,04).
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2015 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 109,00). Tingkat optimisme konsumen lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 105,22).
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2015 diperkirakan meningkat (nilai ITK diperkirakan 102,57). Namun tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015 (nilai ITK sebesar 109,00).

12. Produksi Tanaman Pangan Angka Ramalan II Tahun 2015

- Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 74,99 juta ton GKG atau naik 5,85 persen dibandingkan tahun 2014.
- Produksi jagung tahun 2015 diperkirakan sebanyak 19,83 juta ton pipilan kering atau naik 4,34 persen dibandingkan tahun 2014.
- Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 982,97 ribu ton biji kering atau naik 2,93 persen dibandingkan tahun 2014.

13. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan III-2015 naik 4,22 persen dibanding triwulan III-2014 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 1,04 persen dari triwulan II-2015 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan III-2015 naik 6,87 persen dibanding triwulan III-2014 (*y-on-y*), namun mengalami penurunan 1,31 persen dari triwulan II-2015 (*q-to-q*).

14. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama Januari–Oktober 2015 mencapai 8,02 juta kunjungan atau naik 3,38 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2014.
- TPK Hotel Berbintang pada bulan Oktober 2015 mencapai 56,60 persen atau naik 2,31 poin dibanding TPK Oktober 2014, dan mengalami kenaikan 0,34 poin dibandingkan TPK September 2015.

- Sementara itu, rata-rata TPK hotel berbintang selama Januari-Oktober 2015 tercatat sebesar 52,31 persen, naik 0,47 poin dibandingkan rata-rata TPK pada periode yang sama tahun 2014.

15. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Oktober 2015 naik 6,49 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Oktober 2015 naik 2,95 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Oktober 2015 naik 15,00 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Oktober 2015 naik 4,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

16. Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Sementara untuk ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41.

17. Produksi Hortikultura

- Produksi cabai besar pada tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton.
- Produksi cabai rawit pada tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton.
- Produksi bawang merah pada tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton.

18. a. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2014

Biaya produksi per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Sedangkan nilai produksinya masing-masing adalah sebesar Rp17,2 juta; Rp10,2 juta; Rp12,0 juta; dan Rp9,0 juta.

b. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Jeruk Tahun 2014

- Biaya produksi usaha tanaman cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 masing-masing mencapai Rp52,1 juta; Rp34,0 juta; dan Rp67,2 juta.

- Biaya produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri dan yang ditebaskan tahun 2014 masing-masing mencapai Rp5,4 juta dan Rp5,7 juta.
- c. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014**
- Rata-rata biaya produksi usaha setahun per hektar untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp9,7 juta (57,05 persen dari total nilai produksi); karet sebesar Rp9,2 juta (71,54 persen dari total nilai produksi); dan tebu Rp24,2 juta (77,98 persen dari total nilai produksi).
- d. Struktur Ongkos Usaha Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging Tahun 2014.**
- Biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen).
 - Biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen).
 - Biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen).
 - Biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).
- e. Struktur Ongkos Usaha Perikanan Tahun 2014**
- Biaya produksi per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen terhadap nilai produksi); Rp4,2 juta (71,91 persen terhadap nilai produksi); dan Rp3,2 juta (44,16 persen terhadap nilai produksi).
 - Biaya produksi per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor dan perahu motor tempel masing-masing sebesar Rp4,1 juta (66,54 persen terhadap nilai produksi) dan Rp436 ribu (53,71 persen terhadap nilai produksi).
- f. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jati, Mahoni, Sengon Tahun 2014**
- Biaya produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, dan sengon masing-masing Rp0,9 juta; Rp1,2 juta; dan Rp0,8 juta atau masing-masing sebesar 10,20 persen; 19,30 persen; dan 20,71 persen terhadap nilai produksi.

g. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Tahun 2014

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

- Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa¹, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.
- Sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
- Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005².
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Oktober 2015

- Rupiah terapresiasi 7,13 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terapresiasi 5,19 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terapresiasi 7,72 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terapresiasi 8,85 persen terhadap euro.

¹ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat.

² Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

21. Indeks Demokrasi Indonesia 2014

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 mencapai angka 73,04 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 9,32 poin dibandingkan dengan angka IDI 2013 yang sebesar 63,72. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang” untuk klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni: “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Kenaikan IDI dari 2013–2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil naik 3,62 poin (dari 79,00 menjadi 82,62), (2) Hak-Hak Politik yang naik 17,47 poin (dari 46,25 menjadi 63,72), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi yang naik 3,57 poin (dari 72,24 menjadi 75,81).

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajarannya di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Desember 2015 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. November 2015), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan III-2015), ekspor-impor (s.d. Oktober 2015), perkembangan tahunan penduduk (s.d. Juni 2014), ketenagakerjaan (s.d. Agustus 2015), upah buruh (s.d. Oktober 2015), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. November 2015), harga produsen (s.d. triwulan III-2015) dan harga perdagangan besar (s.d. November 2015), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan III-2015), produksi tanaman pangan (angka ramalan II tahun 2015), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan III-2015), pariwisata dan transportasi (s.d. Oktober 2015), data kemiskinan (Maret 2015), struktur ongkos usaha pertanian dan survei kehutanan 2014, nilai tukar eceran rupiah Oktober 2015, produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah tahun 2014, serta indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2014.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui website BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 7 Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

HEADLINES.....	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xix
FOKUS PERHATIAN	1
I. INFLASI NOVEMBER 2015.....	14
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III-2015	19
III. EKSPOR OKTOBER 2015.....	33
IV. IMPOR OKTOBER 2015	38
V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014	45
VI. KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2015	51
VII. UPAH BURUH OKTOBER 2015	58
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN NOVEMBER 2015	60
IX. HARGA PANGAN NOVEMBER 2015	67
X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN III-2015 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR NOVEMBER 2015	74
XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN III-2015	83
XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA RAMALAN II (ARAM II) 2015	91
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN III-2015	96
XIV. PARIWISATA OKTOBER 2015.....	101
XV. TRANSPORTASI NASIONAL OKTOBER 2015	105
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2015	108
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014.....	115
XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014.....	120
XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014	134
XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH OKTOBER 2015.....	151

XXI. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2014	156
XXII. SUPLEMEN: METODOLOGI	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota November 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	16
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi November 2015 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100)	16
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)	17
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)	17
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, September-Oktober 2015 (persen)	18
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)	21
Tabel 2.2	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	22
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)	24
Tabel 2.4	Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran	25
Tabel 2.5	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)	26
Tabel 2.6	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan III-2015 (persen)	26
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha, 2012–2014 (persen)	29
Tabel 2.8	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2014 (triliun rupiah)	30
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2012–2014 (persen)	31
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2012–2014 (triliun rupiah)	31
Tabel 2.11	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2014	32
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)	34
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2014–2015	35
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)	35

Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)	36
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2013–2015 (FOB: juta US\$)	36
Tabel 3.6	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Oktober 2015	37
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Oktober 2014 dan 2015	40
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Oktober 2014–Oktober 2015	40
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya Januari–Oktober 2014 dan 2015	41
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Oktober 2015	41
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Oktober 2014 dan 2015	42
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2014–Oktober 2015 (Nilai CIF: Juta US\$)	42
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Oktober 2015	43
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Oktober 2014–Oktober 2015 (miliar US\$)	43
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Triwulan III-2015	44
Tabel 5.1	Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014 (ribu orang)	45
Tabel 5.2	Demografi Penduduk Indonesia, 2014	50
Tabel 6.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015 (juta orang)	51
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang)	53
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang)	54
Tabel 6.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang)	54

Tabel 6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen)	55
Tabel 6.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 2014–2015	57
Tabel 7.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Oktober 2013–Oktober 2015	59
Tabel 8.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100).....	62
Tabel 8.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran November 2013–November 2015	65
Tabel 8.3	Tingkat Inflasi Perdesaan November 2015, Tahun Kalender 2015, dan <i>Year on Year</i> 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	65
Tabel 8.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, November 2015 (2012=100).....	66
Tabel 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, November 2014–November 2015	68
Tabel 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, November 2014–November 2015	70
Tabel 9.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok November 2014–November 2015 (rupiah)	72
Tabel 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan III-2015.....	75
Tabel 10.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor	78
Tabel 10.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia September–November 2015, (2010=100).....	79
Tabel 10.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar November 2015 (2010=100).....	80
Tabel 10.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia November 2015 Menurut Jenis Bangunan (2010=100).....	81
Tabel 11.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III- 2015 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha	84
Tabel 11.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2015 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk	85

Tabel 11.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015 dan Triwulan III-2015 Menurut Variabel Pembentuk	87
Tabel 11.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015 Menurut Variabel Pembentuk	89
Tabel 11.5	Indeks Tendensi Konsumen ¹⁾ Triwulan III-2014–Triwulan III-2015 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen ²⁾ Triwulan IV-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	90
Tabel 12.1	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015	91
Tabel 12.2	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut <i>Subround</i> , 2013–2015	92
Tabel 12.3	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015	93
Tabel 12.4	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015	94
Tabel 12.5	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lain, 2013–2015	95
Tabel 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan, Triwulan I-2013–Triwulan III-2015 (persen), 2010=100.....	97
Tabel 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2013–2015 (persen) 2010=100.....	97
Tabel 13.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	98
Tabel 13.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan Triwulan I-2013–Triwulan III-2015 (persen).....	100
Tabel 13.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan III-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	100
Tabel 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Oktober 2014–Oktober 2015	104
Tabel 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Oktober 2014–Oktober 2015.....	107
Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2014–Maret 2015	109

Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2015	110
Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	111
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015	113
Tabel 16.5	Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, September 2014–Maret 2015 ..	114
Tabel 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014	116
Tabel 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014	117
Tabel 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014	119
Tabel 18.1	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014	120
Tabel 18.2	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014	121
Tabel 18.3	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014	122
Tabel 18.4	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	123
Tabel 18.5	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	123
Tabel 18.6	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014	124
Tabel 18.7	Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014	125
Tabel 18.8	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014	126
Tabel 18.9	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014	128
Tabel 18.10	Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014	129

Tabel 18.11 Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014.....	130
Tabel 18.12 Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014.....	131
Tabel 18.13 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014.....	132
Tabel 19.1 Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014.....	139
Tabel 19.2 Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014.....	140
Tabel 19.3 IKG Desa Menurut Provinsi, 2014.....	141
Tabel 21.1 Perkembangan Skor Variabel, 2013–2014.....	158
Tabel 21.2 Perkembangan Skor Indikator 2013 dan 2014.....	159
Tabel 21.3 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2013–2014.....	160

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2014–2015	18
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d. Triwulan III-2015 (persen)	20
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2015 (persen)	20
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2015 (persen)	23
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan III-2015 (persen)	25
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB, 2012–2014 (persen)	28
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB) Oktober 2013–Oktober 2015	33
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF) Oktober 2014–Oktober 2015	38
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF) Januari–Oktober 2014 dan 2015	39
Grafik 5.1	Piramida Penduduk Indonesia, 2014	46
Grafik 5.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014	47
Grafik 5.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2014	48
Grafik 6.1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2013–2015 (juta orang)	52
Grafik 7.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Oktober 2013–Oktober 2015	58
Grafik 8.1	Nilai Tukar Petani (NTP), November 2014–November 2015 (2012=100) ...	60
Grafik 8.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (Ia) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) November 2014–November 2015 (2012=100)	61
Grafik 8.3	Inflasi Perdesaan, November 2013–November 2015	64
Grafik 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas November 2014–November 2015	67
Grafik 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas November 2014–November 2015	69

Grafik 9.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok September 2014– Oktober 2015 (rupiah)	73
Grafik 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor Triwulan III-2012 s.d. Triwulan III-2015	75
Grafik 10.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia November 2012–November 2015	80
Grafik 10.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Juni–November 2015.....	82
Grafik 11.1	Indeks Tendensi Bisnis Triwulan III-2010–Triwulan III-2015 dan Perkiraan Triwulan IV-2015	86
Grafik 11.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi	88
Grafik 11.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	89
Grafik 12.1	Pola Panen Padi, 2013–2015.....	92
Grafik 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>), Triwulan IV-2013–Triwulan III-2015	96
Grafik 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (<i>y-on-y</i>) Triwulan III-2013–Triwulan III-2015	99
Grafik 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk Oktober 2013–Oktober 2015.....	101
Grafik 14.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata- rata 27 Provinsi di Indonesia, Oktober 2013–Oktober 2015	103
Grafik 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Oktober 2014–Oktober 2015.....	105
Grafik 16.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2014–Maret 2015.....	108
Grafik 16.2	Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah, September 2014–Maret 2015	112
Grafik 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	115
Grafik 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014.....	117
Grafik 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, 2012–2014.....	119

Grafik 18.1 Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	131
Grafik 18.2 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014.....	133
Grafik 18.3 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014.....	133
Grafik 19.1 Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014	134
Grafik 19.2 Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014.....	135
Grafik 19.3 Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014	136
Grafik 19.4 Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014.....	136
Grafik 19.5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama	137
Grafik 19.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik.....	137
Grafik 19.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih	138
Grafik 19.8 Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014	142
Grafik 20.1 Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Oktober dibanding September M.V).....	155
Grafik 23.2 Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir).....	155
Grafik 21.1 Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009–2014	156
Grafik 21.2 Perkembangan Indeks Aspek, 2009–2014	157
Grafik 21.3 Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2013–2014	158

FOKUS PERHATIAN

1. Pada November 2015 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen

Pada November 2015 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen. Dari 82 kota, tercatat 69 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 2,35 persen dengan IHK 127,38 dan terendah terjadi di Ternate sebesar 0,02 persen dengan IHK 125,90. Deflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,02 persen dengan IHK 121,87 dan terendah terjadi di Manado sebesar 0,01 persen dengan IHK 123,06. Inflasi November 2015 sebesar 0,21 persen adalah lebih rendah dibanding kondisi November 2014 yang mengalami inflasi 1,50 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2015 terhadap November 2014) sebesar 4,89 persen.

2. Triwulan III-2015 Ekonomi Indonesia tumbuh 4,73 persen

Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,73 persen meningkat dibanding triwulan II-2015 yang tumbuh 4,67 persen, namun melambat dibanding capaian triwulan III-2014 yang tumbuh 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,83 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,56 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,39 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh 3,21 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 didorong oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, komponen Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,27 persen.

3. Nilai ekspor Indonesia Oktober 2015 mencapai US\$12,08 miliar, turun 20,98 persen (*year-on-year*)

Nilai ekspor Indonesia Oktober 2015 mencapai US\$12,08 miliar, turun 20,98 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), sedangkan dibanding ekspor September 2015 turun 4,00 persen. Nilai ekspor nonmigas Oktober 2015 mencapai US\$10,71 miliar atau turun 3,86 persen dibanding ekspor nonmigas September 2015. Ekspor migas pada Oktober 2015 mencapai US\$1,38 miliar atau turun 5,09 persen dibanding bulan sebelumnya. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Oktober 2015 turun sebesar 8,38 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2014, dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya turun 13,00 persen, demikian juga ekspor nonmigas hasil pertanian turun 0,17 persen.

4. Nilai impor Indonesia Oktober 2015 sebesar US\$11,07 miliar, turun sebesar 27,81 persen (*year-on-year*)

Nilai impor Indonesia Oktober 2015 sebesar US\$11,07 miliar, atau turun sebesar 4,27 persen dibanding impor September 2015, dan turun 27,81 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Oktober 2015 sebesar US\$9,31 miliar atau turun 3,50 persen dibanding September 2015. Sementara impor migas Oktober 2015 tercatat sebesar US\$1,76 miliar, turun 8,12 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Oktober 2015 adalah golongan kapal laut dan bangunan terapung sebesar US\$61,5 juta, atau naik 143,69 persen dibanding September 2015 (US\$42,8 juta). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–Oktober 2015 ditempati oleh Tiongkok (US\$23,82 miliar) dengan pangsa 24,34 persen.

5. Jumlah penduduk Indonesia Juni 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

Hasil proyeksi penduduk Indonesia keadaan Juni 2014 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 252.164,8 ribu orang terdiri dari 126.715,2 ribu orang laki-laki dan 125.449,6 ribu orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2014 sekitar 1,40 persen per tahun.

6. Pada Agustus 2015, penduduk yang bekerja pada Sektor Konstruksi meningkat 12,77 persen dibandingkan Februari 2014

Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, penduduk bekerja meningkat terutama pada Sektor Konstruksi sebanyak 930 ribu orang (12,77 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 850 ribu orang (3,42 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebanyak 1,2 juta orang (3,13 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan/Perorangan sebanyak 480 ribu orang (2,61 persen), dan Sektor Lainnya sebanyak 120 ribu orang (6,94 persen).

7. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Oktober 2015 masing-masing sebesar Rp46.800,00 dan Rp80.744,00

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Oktober 2015 sebesar Rp46.800,00, naik 0,13 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil naik sebesar 0,17 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Oktober 2015 tercatat Rp80.744,00, naik 0,31 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil naik sebesar 0,39 persen.

8. Nilai Tukar Petani (NTP) November 2015 tercatat 102,95, naik 0,48 persen dibanding Oktober 2015, inflasi perdesaan sebesar 0,43 persen dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) naik sebesar 0,63 persen dibanding Oktober 2015

NTP November 2015 tercatat 102,95 atau naik sebesar 0,48 persen dibanding NTP Oktober 2015 sebesar 102,46. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di tiga subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 1,39 persen, Tanaman Hortikultura 0,47 persen, dan Tanaman Perkebunan Rakyat 0,49 persen,

sebaliknya Subsektor Peternakan dan Perikanan turun masing-masing sebesar 0,63 persen dan 0,39 persen.

Pada November 2015 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,43 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 123,95. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 30 provinsi dan deflasi perdesaan di 3 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,89 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,01 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,16 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,04 persen.

Pada November 2015 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,63 persen. Hal ini karena terjadi kenaikan It (0,85 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPBBM (0,21 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya tiga subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (1,53 persen), Tanaman Hortikultura (0,64 persen), dan Tanaman Perkebunan Rakyat (0,72 persen). Sebaliknya, NTUP Subsektor Peternakan dan Perikanan turun masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,18 persen.

9. Rata-rata harga beras pada November 2015 sebesar Rp13.139,00 per kg, naik 0,55 persen

Rata-rata harga beras pada November 2015 sebesar Rp13.139,00 per kg, naik 0,55 persen dari bulan sebelumnya. Harga beras pada November 2015 (tahun ke tahun) naik 12,39 persen, lebih tinggi dari inflasi periode yang sama (4,89 persen). Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah daging ayam ras naik 1,69 persen; telur ayam ras naik 1,57 persen; cabai merah turun 3,00 persen; cabai rawit turun 2,79 persen; minyak goreng turun 1,00 persen.

10. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan) pada triwulan III-2015 naik 0,28 persen terhadap triwulan II-2015 (*q-to-q*). Sedangkan terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) naik 2,06 persen

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen pada triwulan III-2015 (*q-to-q*). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertanian (2,24 persen) dan IHP Sektor Industri Pengolahan (1,12 persen), sedangkan IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 9,47 persen.

Dibandingkan terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*), IHP naik 2,06 persen. IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,47 persen dan 4,72 persen. Sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 19,57 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas November 2015 naik sebesar 1,03 persen dari bulan sebelumnya

IHPB Umum Nonmigas November 2015 naik sebesar 1,03 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu 5,58 persen dan terkecil terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu 0,03 persen. Sektor Industri naik 0,34 persen, Kelompok Barang Ekspor Nonmigas naik 0,08 persen, sedangkan Kelompok Barang Impor Nonmigas turun 0,04 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Oktober 2015 turun 0,33 persen. Penurunan IHPB terbesar terjadi pada Kelompok Barang Ekspor sebesar 1,64 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi November 2015 naik 0,22 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi sebesar 0,41 persen.

11. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2015 sebesar 106,04 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015 sebesar 109,00

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III-2015 sebesar 106,04, berarti kondisi bisnis meningkat dari triwulan sebelumnya. Hal ini karena adanya peningkatan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 108,20), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 104,95), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 104,71). Pada triwulan IV-2015 kondisi bisnis diprediksi meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 103,72).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan III-2015 sebesar 109,00 artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat konsumsi yang meningkat, disertai rendahnya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi dan pendapatan yang juga meningkat. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di seluruh provinsi Indonesia.

Pada triwulan IV-2015 kondisi ekonomi konsumen diprediksi akan meningkat (ITK sebesar 102,57). Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan mendatang terjadi di 26 provinsi (78,79 persen).

12. Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 74,99 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 5,85 persen dibanding tahun 2014

Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 74,99 juta ton GKG atau naik sebanyak 4,15 juta ton GKG (5,85 persen) dibanding tahun 2014. Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 380,87 ribu hektar (2,76 persen) dan produktivitas sebesar 1,54 kuintal/hektar (3,00 persen). Dibandingkan tahun 2014, produksi jagung tahun 2015 diperkirakan naik sebanyak 0,82 juta ton pipilan kering (4,34 persen) yang disebabkan oleh kenaikan produktivitas sebesar 1,85 kuintal/hektar (3,73 persen) dan kenaikan luas panen seluas 22,61 ribu hektar (0,59 persen). Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan meningkat sebanyak 27,97 ribu ton (2,93 persen) dibandingkan produksi tahun 2014 yang disebabkan adanya kenaikan luas panen seluas 9,16

ribu hektar (1,49 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 0,22 kuintal/hektar (1,42 persen).

13. Pertumbuhan produksi IBS naik 4,22 persen dan IMK naik 6,87 persen pada triwulan III-2015 (*year-on-year*)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan III-2015 naik 4,22 persen dibanding triwulan III-2014 (*year-on-year*) dan mengalami kenaikan 1,04 persen dari triwulan II-2015 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada September 2015 naik 0,25 persen dari Agustus 2015 (*m-to-m*), Agustus 2015 naik 4,11 persen dari Juli 2015, dan Juli 2015 turun 2,35 persen dari Juni 2015. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan III-2015 naik 6,87 persen dibanding triwulan III-2014 (*y-on-y*), namun mengalami penurunan 1,31 persen dari triwulan II-2015 (*q-to-q*).

14. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Oktober 2015 mencapai 825,8 ribu kunjungan, naik 2,11 persen dibanding Oktober 2014.

Jumlah kunjungan wisman pada Oktober 2015 mencapai 825,8 ribu kunjungan atau naik 2,11 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan yang sama tahun 2014. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2015, jumlah kunjungan wisman turun sebesar 4,99 persen. Sekitar 44,41 persen dari jumlah kunjungan wisman bulan Oktober 2015 datang melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.

15. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Oktober 2015 mencapai 5,7 juta orang, naik 10,51 persen (*year-on-year*)

Pada Oktober 2015, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 5,7 juta orang atau naik 10,51 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional turun 5,70 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 27,53 persen, dan penumpang kereta api naik 15,23 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan udara domestik naik 6,49 persen, angkutan udara internasional naik 2,95 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 15,00 persen, dan penumpang kereta api naik 4,24 persen.

16. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen)

Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Sementara untuk ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41.

17. Produksi cabai besar sebesar 1,075 juta ton, cabai rawit sebesar 0,800 juta ton dan bawang merah sebesar 1,234 juta ton

Produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen). Produksi cabai rawit segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 86,98 ribu ton (12,19 persen). Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, produksi meningkat sebesar 223,22 ribu ton (22,08 persen).

18. a. Biaya produksi per musim tanam per hektar padi sawah sebesar 12,7 juta dengan komponen terbesar upah pekerja dan jasa pertanian sebesar 48,23 persen

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Komponen terbesar dari total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai adalah untuk upah pekerja dan jasa pertanian yang masing-masing adalah sebesar 48,23 persen (Rp6,1 juta); 62,36 persen (Rp4,9 juta); 44,93 persen (Rp4,1 juta); dan 44,82 persen (Rp4,1 juta) dari total biaya.

b. Biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta

Total biaya produksi usaha per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri untuk tanaman cabai merah Rp52,1 juta; tanaman cabai rawit Rp34,0 juta; tanaman bawang merah Rp67,2 juta; tanaman jeruk Rp5,4 juta. Persentase biaya produksi terbesar adalah upah pekerja, yaitu untuk cabai merah sebesar 47,74 persen; cabai rawit sebesar 54,85 persen; dan tanaman jeruk sebesar 32,07 persen. Untuk bawang merah persentase biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen.

c. Rata-rata biaya produksi kelapa sawit setahun per hektar mencapai Rp9,7 juta

Pengeluaran paling besar digunakan untuk tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Sedangkan rata-rata biaya usaha perkebunan karet setahun per hektar mencapai Rp9,2 juta dengan pengeluaran paling besar digunakan untuk biaya tenaga kerja sebesar 57,09 persen. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya produksi setahun per hektar mencapai Rp24,2 juta, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran sewa lahan yang mencapai 32,37 persen dari total biaya produksi.

d. Biaya produksi sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen). Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

e. Biaya produksi per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta

Jumlah biaya per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit sebesar Rp3,0 juta (41,33 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha bandeng dan udang windu adalah upah pekerja, yaitu sebesar Rp965 ribu (23,21 persen) dan Rp796 ribu (24,73 persen).

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing sebesar Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen).

f. Biaya produksi terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen

Pengeluaran terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen. Upah pekerja usaha untuk tanaman mahoni sebesar 63,00 persen dan tanaman sengon sebesar 59,00 persen.

g. Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa³, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

1. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur:

- Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) tidak ada SD (termasuk MI).
- Terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) tidak ada SLTP.
- Terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) tidak ada SLTA.
- Sebanyak 117 kecamatan (1,65 persen) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).
- Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13 persen) tidak ada pasar dengan bangunan.
- Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40 persen) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.
- Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) tidak ada penerangan di jalan utama desa.
- Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

2. Berdasarkan Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan

³ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.

3. Menurut Podes 2014, terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005⁴.
4. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0–100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Oktober 2015

a. Rupiah terapresiasi 7,13 persen terhadap dolar Amerika.

Rupiah terapresiasi 7,13 persen terhadap dolar Amerika pada Oktober 2015. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika terjadi pada minggu kedua Oktober 2015 yaitu Rp13.363,89 per dolar Amerika.

b. Rupiah terapresiasi 5,19 persen terhadap dolar Australia.

Rupiah terapresiasi 5,19 persen terhadap dolar Australia pada Oktober 2015. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia terjadi pada minggu keempat Oktober 2015 yang mencapai Rp9.718,19 per dolar Australia.

c. Rupiah terapresiasi 7,72 persen terhadap yen Jepang.

Rupiah terapresiasi 7,72 persen terhadap yen Jepang pada Oktober 2015. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap yen

⁴ Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

Jepang terjadi pada minggu kedua Oktober 2015 yang mencapai Rp 111,60 per yen Jepang.

d. Rupiah terapresiasi 8,85 persen terhadap euro.

Rupiah terapresiasi 8,85 persen terhadap euro pada Oktober 2015. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap euro terjadi pada minggu keempat Oktober 2015 yang mencapai Rp14.971,85 per euro.

21. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2014 mencapai 73,04 naik dibandingkan dengan IDI nasional 2013 yang sebesar 63,72

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 mencapai angka 73,04 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 9,32 poin dibandingkan dengan angka IDI 2013 yang sebesar 63,72. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Kenaikan IDI dari 2013–2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil naik 3,62 poin (dari 79,00 menjadi 82,62), (2) Hak-Hak Politik yang naik 17,47 poin (dari 46,25 menjadi 63,72), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 3,57 poin (dari 72,24 menjadi 75,81).

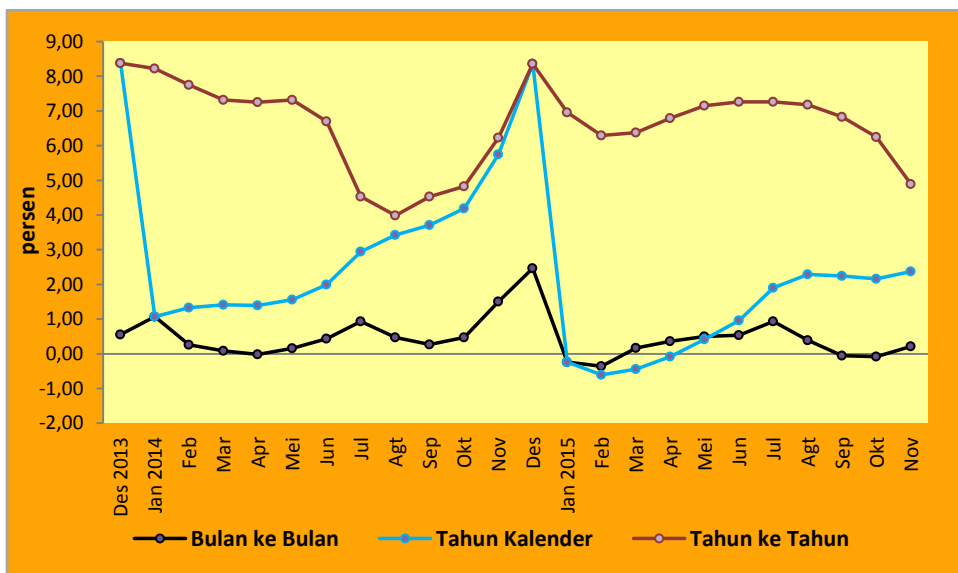
I. INFLASI NOVEMBER 2015

1. Pada November 2015 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen. Dari 82 kota, tercatat 69 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 2,35 persen dengan IHK 127,38 dan terendah terjadi di Ternate sebesar

Pada November 2015 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen

0,02 persen dengan IHK 125,90. Deflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,02 persen dengan IHK 121,87 dan terendah terjadi di Manado sebesar 0,01 persen dengan IHK 123,06. Inflasi November 2015 sebesar 0,21 persen adalah lebih rendah dibanding kondisi November 2014 yang mengalami inflasi 1,50 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2015 terhadap November 2014) sebesar 4,89 persen.

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
Gabungan 82 Kota, 2013–2015



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan 0,33 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,47 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,15 persen;

kesehatan 0,44 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,05 persen; dan transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,06 persen; serta penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks kelompok sandang sebesar 0,23 persen.

3. Dari inflasi 0,21 persen, andil beras, daging ayam ras, dan rokok kretek filter masing-masing 0,02 persen; serta andil telur ayam ras, buncis, kacang panjang, tomat sayur, tomat buah, nasi dengan lauk, rokok kretek, rokok putih, tarif kontrak rumah, tarif sewa rumah, upah tukang bukan mandor, tarif rumah sakit, tarif angkutan udara, dan tarif jalan tol masing-masing sebesar 0,01 persen.
4. Inflasi November 2015 sebesar 0,21 persen, angka tersebut adalah lebih rendah dibanding kondisi November 2014 yang mengalami inflasi 1,50 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2015 terhadap November 2014) sebesar 4,89 persen.
5. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi November 2015 sebesar 0,21 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,16 persen; komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 0,20 persen; dan komponen bergejolak (*volatile*) 0,35 persen.
6. Inflasi November 2015 sebesar 0,21 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti sebesar 0,09 persen; barang/jasa yang harganya diatur pemerintah sebesar 0,05 persen; dan komponen bergejolak sebesar 0,07 persen.
7. Inflasi komponen inti November 2015 sebesar 0,16 persen, tahun kalender 2015 sebesar 3,72 persen, dan tahun ke tahun (November 2015 terhadap November 2014) sebesar 4,77 persen.
8. Pada Oktober 2015, Brazil menjadi negara yang mengalami inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 0,82 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota November 2015
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2014	IHK Desember 2014	IHK November 2015	Inflasi November 2015 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2015 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	116,14	119,00	121,82	0,21	2,37	4,89	0,21
1. Bahan Makanan	122,80	126,76	128,89	0,33	1,68	4,96	0,07
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	116,55	118,84	125,84	0,47	5,89	7,97	0,08
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	113,90	115,55	118,94	0,15	2,93	4,42	0,03
4. Sandang	105,81	106,49	110,04	-0,23	3,33	4,00	-0,01
5. Kesehatan	110,19	111,00	116,62	0,44	5,06	5,84	0,02
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	109,97	110,37	114,68	0,05	3,91	4,28	0,01
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	120,58	127,27	124,76	0,06	-1,97	3,47	0,01

¹⁾ Persentase perubahan IHK November 2015 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK November 2015 terhadap IHK Desember 2014.

³⁾ Persentase perubahan IHK November 2015 terhadap IHK November 2014.

Tabel 1.2
Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi November 2015
Menurut Komponen Perubahan Harga
(2012=100)

Komponen	IHK November 2014	IHK Desember 2014	IHK November 2015	Inflasi November 2015 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2015 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	116,14	119,00	121,82	0,21	2,37	4,89	0,21
Inti	110,16	111,28	115,42	0,16	3,72	4,77	0,09
Harga Diatur Pemerintah	131,26	139,27	138,63	0,20	-0,46	5,61	0,05
Bergejolak	123,65	128,01	129,63	0,35	1,27	4,84	0,07

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,84	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,84	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24
Februari	0,30	0,13	0,05	0,75	0,26	-0,36	1,14	1,03	0,81	1,79	1,33	-0,61
Maret	-0,14	-0,32	0,07	0,63	0,08	0,17	0,99	0,70	0,88	2,43	1,41	-0,44
April	0,15	-0,31	0,21	-0,10	-0,02	0,36	1,15	0,39	1,09	2,32	1,39	-0,08
Mei	0,29	0,12	0,07	-0,03	0,16	0,50	1,44	0,51	1,15	2,30	1,56	0,42
Juni	0,97	0,55	0,62	1,03	0,43	0,54	2,42	1,06	1,79	3,35	1,99	0,96
Juli	1,57	0,67	0,70	3,29	0,93	0,93	4,02	1,74	2,50	6,75	2,94	1,90
Agustus	0,76	0,93	0,95	1,12	0,47	0,39	4,82	2,69	3,48	7,94	3,42	2,29
September	0,44	0,27	0,01	-0,35	0,27	-0,05	5,28	2,97	3,49	7,57	3,71	2,24
Oktober	0,06	-0,12	0,16	0,09	0,47	-0,08	5,35	2,85	3,66	7,66	4,19	2,16
November	0,60	0,34	0,07	0,12	1,50	0,21	5,98	3,20	3,73	7,79	5,75	2,37
Desember	0,92	0,57	0,54	0,55	2,46		6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)

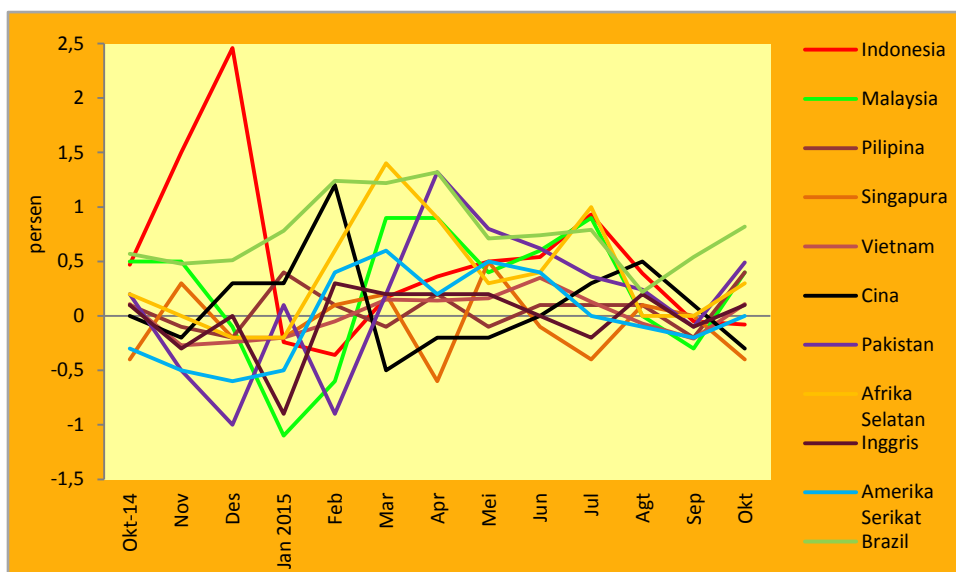
Bulan	2010:2009	2011:2010	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	3,72	7,02	3,65	4,57	8,22	6,96
Februari	3,81	6,84	3,56	5,31	7,75	6,29
Maret	3,43	6,65	3,97	5,90	7,32	6,38
April	3,91	6,16	4,50	5,57	7,25	6,79
Mei	4,16	5,98	4,45	5,47	7,32	7,15
Juni	5,05	5,54	4,53	5,90	6,70	7,26
Juli	6,22	4,61	4,56	8,61	4,53	7,26
Agustus	6,44	4,79	4,58	8,79	3,99	7,18
September	5,80	4,61	4,31	8,40	4,53	6,83
Oktober	5,67	4,42	4,61	8,32	4,83	6,25
November	6,33	4,15	4,32	8,37	6,23	4,89
Desember	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	

Tabel 1.5
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, September-Oktober 2015 (persen)

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (Y-on-Y)	
	September 2015	Oktober 2015	September 2015	Oktober 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	-0,05	-0,08	6,83	6,25
2. Malaysia	-0,30	0,40	2,60	2,50
3. Pilipina	-0,20	0,40	0,40	4,30
4. Singapura	0,00	-0,40	-0,60	-0,80
5. Vietnam	-0,21	0,11	0,00	0,00
6. Cina	0,10	-0,30	1,60	1,30
7. Pakistan	-0,10	0,49	1,32	1,61
8. Afrika Selatan	0,00	0,30	4,60	4,70
9. Inggris	-0,10	0,10	-0,10	-0,10
10. Amerika Serikat	-0,20	0,00	0,00	0,20
11. Brazil	0,54	0,82	9,49	9,93

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.statistics.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>,
<http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>,
<http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>,
<http://www.statssa.gov.za>, dan www.bloomberg.com

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2014–2015

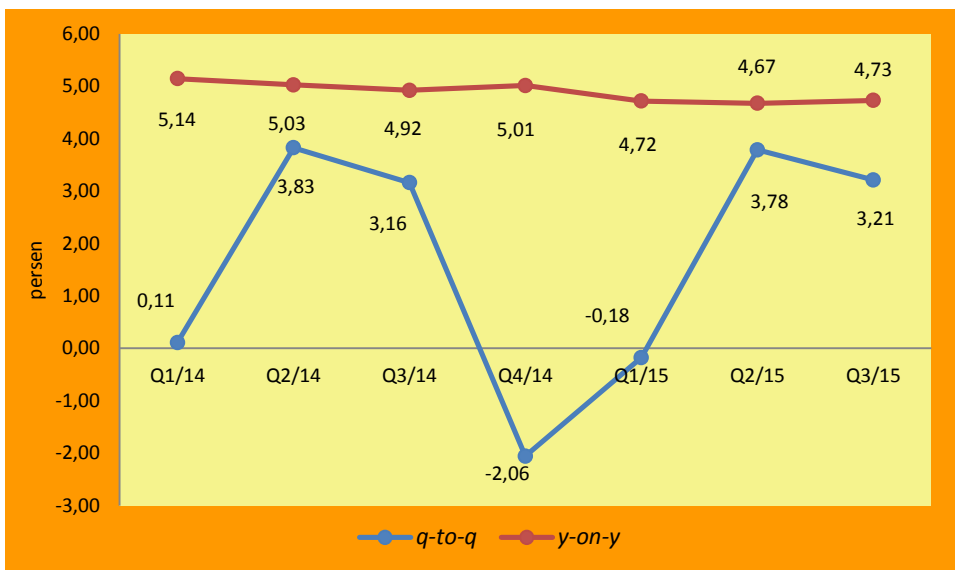


II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III-2015

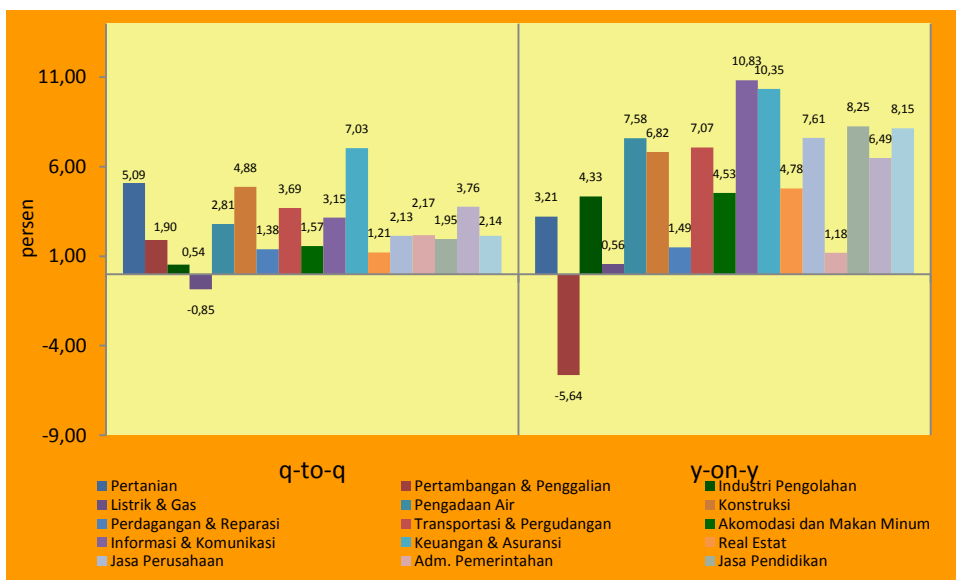
1. Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 dibandingkan triwulan III-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,73 persen dan dibandingkan triwulan II-2015 (*q-to-q*) tumbuh sebesar 3,21 persen.
2. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2015 dibanding triwulan III-2014 (*y-on-y*) didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,64 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,83 persen, diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,35 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 8,25 persen.
3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan II-2015 (*q-to-q*) terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 0,85 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,03 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,09 persen; dan Konstruksi sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan triwulan III-2015 masih diwarnai oleh faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan khususnya Tanaman Perkebunan dimana beberapa komoditas unggulannya mengalami panen raya.

**Pada triwulan III-2015,
perekonomian Indonesia
tumbuh sebesar 4,73 persen**

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d. Triwulan III-2015 (persen)



Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2015 (persen)



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw II- 2015 Terhadap Triw I- 2015 (q-to-q)	Triw III- 2015 Terhadap Triw II- 2015 (q-to-q)	Triw II- 2015 Terhadap Triw II- 2014 (y-on-y)	Triw III- 2015 Terhadap Triw III- 2014 (y-on-y)	Triw I s.d. III- 2015 Terhadap Triw I s.d. III- 2014	Sumber Pertumbuhan Triw III- 2015 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,26	5,09	6,79	3,21	4,64	0,46
2. Pertambangan dan Penggalian	-2,69	1,90	-6,22	-5,64	-4,48	-0,51
3. Industri Pengolahan	3,72	0,54	4,32	4,33	4,22	0,92
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4,43	-0,85	0,76	0,56	1,00	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,35	2,81	5,98	7,58	5,49	0,01
6. Konstruksi	3,14	4,88	5,35	6,82	6,08	0,65
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,95	1,38	1,76	1,49	2,39	0,20
8. Transportasi dan Pergudangan	3,48	3,69	6,52	7,07	6,65	0,27
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,74	1,57	3,87	4,53	3,99	0,13
10. Informasi dan Komunikasi	2,29	3,15	9,78	10,83	10,23	0,48
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,17	7,03	2,50	10,35	6,79	0,38
12. Real Estat	1,08	1,21	5,03	4,78	5,02	0,14
13. Jasa Perusahaan	1,78	2,13	7,64	7,61	7,54	0,12
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,56	2,17	6,57	1,18	4,09	0,04
15. Jasa Pendidikan	6,42	1,95	12,16	8,25	8,74	0,25
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,38	3,76	8,18	6,49	7,30	0,07
17. Jasa lainnya	1,99	2,14	8,07	8,15	8,07	0,12
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	3,50	2,58	4,12	3,85	4,12	3,74
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	14,21	23,97	27,08	36,26	27,19	0,99
PRODUK DOMESTIK BRUTO	3,78	3,21	4,67	4,73	4,71	4,73

- Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2015 mencapai Rp2.982,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.311,2 triliun.
- Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada

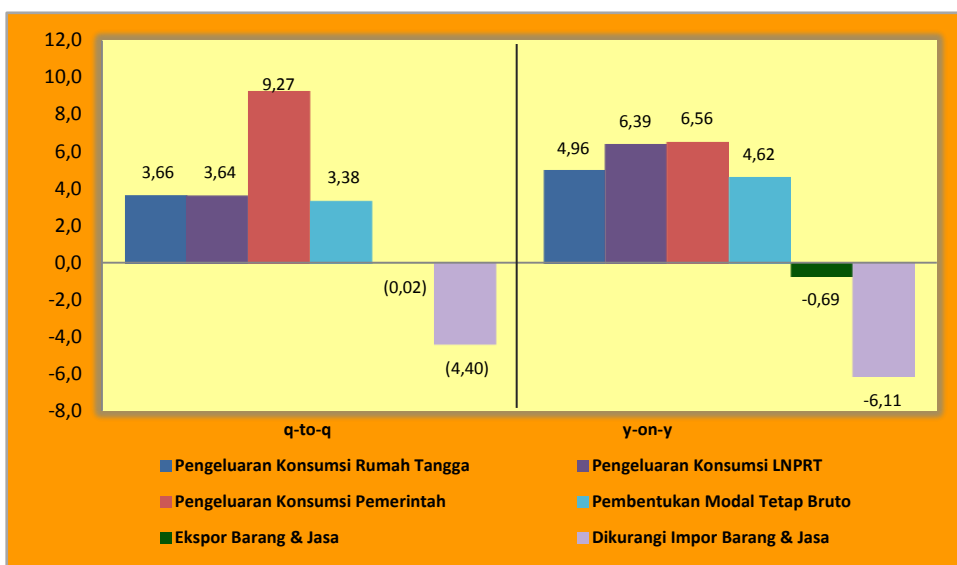
triwulan III-2015 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Struktur perekonomian masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan sebesar 20,41 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,57 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,09 persen.

Tabel 2.2
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010=100		Distribusi (persen)	
	Triw II- 2015	Triw III- 2015	Triw II- 2015	Triw III- 2015	Triw II- 2015	Triw III- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	411,5	434,5	312,0	327,9	14,36	14,57
2. Pertambangan dan Penggalian	230,0	218,1	183,1	186,6	8,03	7,31
3. Industri Pengolahan	598,0	608,6	486,2	488,8	20,87	20,41
4. Pengadaan Listrik dan Gas	33,1	32,8	23,7	23,5	1,16	1,10
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,1	2,1	1,8	1,8	0,07	0,07
6. Konstruksi	282,8	297,1	213,3	223,6	9,87	9,96
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	379,9	390,5	302,8	307,0	13,26	13,09
8. Transportasi dan Pergudangan	134,2	146,9	87,8	91,1	4,68	4,92
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89,1	90,8	66,8	67,9	3,11	3,04
10. Informasi dan Komunikasi	100,1	103,4	104,3	107,6	3,50	3,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	109,5	118,7	82,6	88,4	3,82	3,98
12. Real Estat	81,8	83,2	66,9	67,7	2,86	2,79
13. Jasa Perusahaan	46,7	48,5	36,7	37,5	1,63	1,63
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	108,9	118,4	74,8	76,4	3,80	3,97
15. Jasa Pendidikan	96,3	103,0	70,9	72,2	3,36	3,45
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,9	31,7	23,8	24,7	1,04	1,07
17. Jasa lainnya	46,8	48,6	35,8	36,6	1,63	1,63
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	2 780,7	2 876,9	2 173,3	2 229,3	97,05	96,46
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	84,5	105,7	66,0	81,9	2,95	3,54
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2 865,2	2 982,6	2 239,3	2 311,2	100,00	100,00

6. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 dibandingkan dengan triwulan II-2015 (*q-to-q*) didukung oleh kenaikan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 9,27 persen, Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,66 persen, Konsumsi LNPRT sebesar 3,64 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,38 persen. Sedangkan komponen lainnya yakni komponen Ekspor turun 0,02 persen, Impor turun 4,40 persen dan Perubahan Inventori.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2015 (persen)



7. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2014 (*y-on-y*) didukung oleh kenaikan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto masing-masing sebesar 6,56 persen, 6,39 persen, 4,96 persen dan 4,62 persen. Beberapa komponen mengalami kontraksi, Ekspor (minus 0,69 persen), dan Impor (minus 6,11 persen).

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw II-2015 Terhadap Triw I-2015 (<i>q-to-q</i>)	Triw III-2015 Terhadap Triw II-2015 (<i>q-to-q</i>)	Triw II-2015 Terhadap Triw II-2014 (<i>y-on-y</i>)	Triw III-2015 Terhadap Triw III-2014 (<i>y-on-y</i>)	Triw I s.d. III- 2015 Terhadap Triw I s.d. III- 2014	Sumber Pertumbuhan Triw III-2015 (<i>y-on-y</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,10	3,66	4,97	4,96	4,98	2,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,39	3,64	-7,91	6,39	-3,57	0,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32,05	9,27	2,13	6,56	3,93	0,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,10	3,38	3,69	4,62	4,23	1,47
5. Perubahan Inventori Diskrepansi Statistik	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang & Jasa	1,79	-0,02	-0,09	-0,69	-0,60	-0,16
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	1,04	-4,40	-6,98	-6,11	-5,19	-1,33
PDB	3,78	3,21	4,67	4,73	4,71	4,73

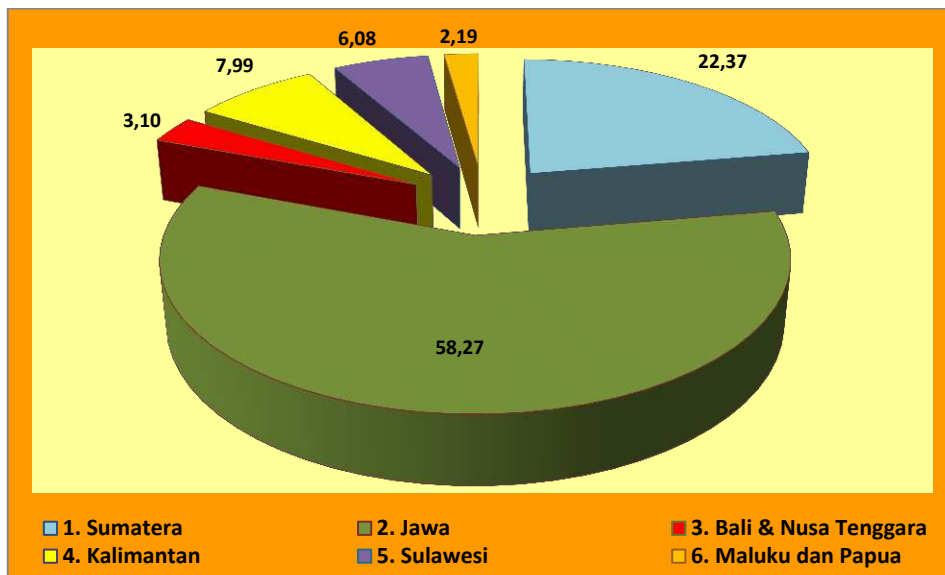
8. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDB atas dasar harga Berlaku, yaitu sebesar 54,98 persen (triwulan III-2015), sedikit meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (54,68 persen). Sedangkan kontribusi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor, Impor, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada triwulan III-2015 masing-masing sebesar 32,39 persen, 20,71 persen, 19,90 persen dan 9,82 persen.

Tabel 2.4
Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)		Distribusi ¹⁾ (Persen)	
	Triw II- 2015	Triw III- 2015	Triw II- 2015	Triw III- 2015	Triw II- 2015	Triw III- 2015
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.566,8	1.639,7	1.201,2	1.245,2	54,68	54,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	31,9	33,5	24,2	25,1	1,11	1,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	253,9	292,9	176,5	192,9	8,86	9,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	930,9	966,1	710,6	734,6	32,49	32,39
5. Perubahan Inventori Diskrepani Statistik	80,9	53,4	56,3	36,4	2,82	1,79
6. Ekspor Barang & Jasa	-6,4	-27,1	37,7	23,5	-0,22	-0,91
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	620,5	617,6	505,3	505,2	21,66	20,71
PDB	2.865,2	2.982,6	2.239,3	2.311,2	100,00	100,00

9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2015 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,27 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,37 persen, Pulau Kalimantan 7,99 persen, Pulau Sulawesi 6,08 persen, dan sisanya 5,29 persen di pulau-pulau lainnya.

Grafik 2.4
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan III-2015 (persen)



Tabel 2.5
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau	2013	2014	2015	
			Trw II	Trw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumatera	23,08	23,17	22,34	22,37
2. Jawa	57,08	57,38	58,33	58,27
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,81	2,87	3,01	3,10
4. Kalimantan	9,23	8,71	8,19	7,99
5. Sulawesi	5,49	5,65	5,90	6,08
6. Maluku dan Papua	2,31	2,22	2,23	2,19
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: atas dasar harga berlaku

10. Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan III-2015 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,26 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 5,96 persen, 5,44 persen, 5,03 persen, dan 4,95 persen.

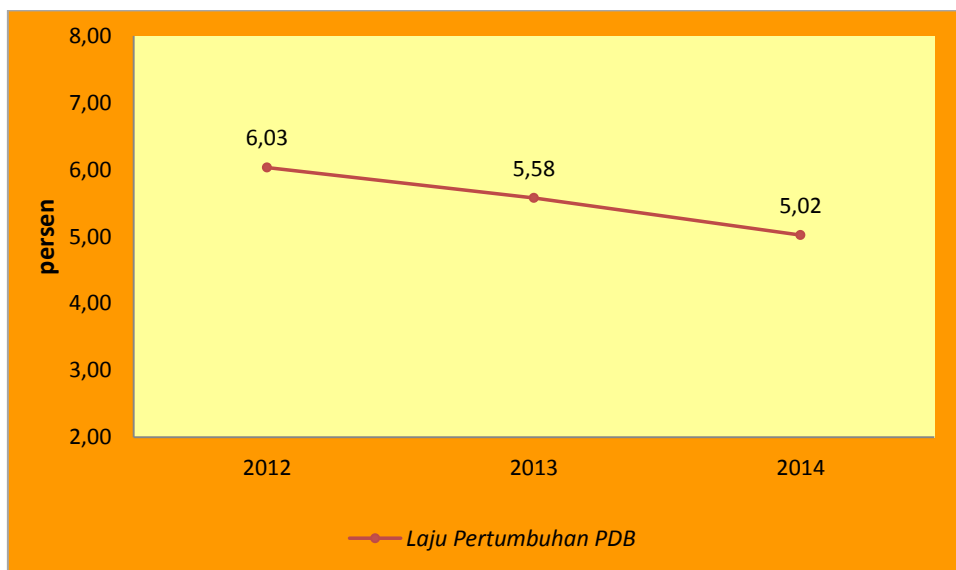
Tabel 2.6
Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan III-2015 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	3,25	3,04	3,16	100,00	22,37
1. Aceh	3,05	-0,38	-1,53	5,03	1,13
2. Sumatra Utara	3,21	5,08	5,01	21,71	4,86
3. Sumatra Barat	3,05	4,71	5,16	7,21	1,61
4. Riau	4,68	-1,87	-1,50	24,92	5,58
5. Jambi	0,47	4,53	5,21	6,05	1,35
6. Sumatra Selatan	3,82	4,89	4,75	13,15	2,94
7. Bengkulu	2,01	5,17	5,26	1,90	0,43
8. Lampung	3,27	5,18	5,07	9,96	2,23
9. Kep. Bangka Belitung	1,08	3,96	4,01	2,30	0,51
10. Kepulauan Riau	1,92	5,72	6,37	7,76	1,74

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa	2,75	5,39	5,19	100,00	58,27
11. DKI Jakarta	2,22	5,96	5,40	28,97	16,88
12. Jawa Barat	2,05	5,03	4,93	22,42	13,06
13. Jawa Tengah	2,91	4,95	5,08	14,94	8,70
14. DI Yogyakarta	5,57	5,30	4,74	1,52	0,89
15. Jawa Timur	3,89	5,44	5,30	25,08	14,61
16. Banten	2,03	5,18	5,19	7,07	4,12
Bali dan Nusa Tenggara	5,70	11,75	9,86	100,00	3,10
17. Bali	3,00	6,29	6,17	48,78	1,51
18. Nusa Tenggara Barat	9,86	26,12	19,76	29,75	0,92
19. Nusa Tenggara Timur	5,65	5,11	4,96	21,47	0,67
Kalimantan	0,77	-0,41	0,73	100,00	7,99
20. Kalimantan Barat	4,67	4,23	4,39	15,47	1,24
21. Kalimantan Tengah	2,87	6,66	7,10	10,95	0,88
22. Kalimantan Selatan	5,19	3,86	3,63	16,01	1,28
23. Kalimantan Timur	-1,47	-3,49	-1,65	57,57	4,60
Sulawesi	5,55	8,16	8,06	100,00	6,08
24. Sulawesi Utara	4,78	6,28	6,31	12,92	0,78
25. Sulawesi Tengah	4,24	15,08	15,84	14,92	0,91
26. Sulawesi Selatan	7,01	7,34	6,93	50,85	3,09
27. Sulawesi Tenggara	3,86	6,96	6,66	12,50	0,76
28. Gorontalo	5,74	5,80	5,69	4,13	0,25
29. Sulawesi Barat	2,17	6,72	7,25	4,67	0,28
Maluku dan Papua	0,47	2,28	5,22	100,00	2,19
30. Maluku	2,01	5,27	5,03	13,24	0,29
31. Maluku Utara	2,65	6,77	6,20	10,34	0,23
32. Papua Barat	6,51	6,43	3,61	24,52	0,54
33. Papua	-2,48	-0,59	5,76	51,90	1,14

11. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2014 meningkat sebesar 5,02 persen terhadap tahun 2013, terjadi pada semua lapangan usaha ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi 10,02 persen dan terendah di Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,55 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDB, 2012–2014 (persen)



12. Pada tahun 2014, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 21,02 persen diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,38 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,38 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha, 2012–2014 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,59	4,20	4,18	13,37	13,39	13,38
B Pertambangan dan Penggalian	3,02	1,74	0,55	11,61	10,95	9,82
C Industri Pengolahan	5,62	4,49	4,673	21,46	20,98	21,02
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,06	5,23	5,57	1,11	1,04	1,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,34	4,06	3,05	0,08	0,08	0,07
F Konstruksi	6,56	6,11	6,97	9,35	9,51	9,88
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,40	4,71	4,84	13,21	13,27	13,38
H Transportasi dan Pergudangan	7,11	8,38	8,00	3,64	3,87	4,27
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	6,80	5,91	2,93	3,04	3,14
J Informasi dan Komunikasi	12,28	10,39	10,02	3,61	3,58	3,50
K Jasa Keuangan dan Asuransi	9,54	9,09	4,93	3,78	3,87	3,88
L Real Estat	7,41	6,54	5,00	2,76	2,77	2,79
M,N Jasa Perusahaan	7,44	7,91	9,81	1,48	1,52	1,57
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,13	2,38	2,49	3,95	3,90	3,84
P Jasa Pendidikan	8,22	8,20	6,29	3,14	3,25	3,29
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,97	7,83	8,01	1,00	1,01	1,03
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,76	6,41	8,92	1,42	1,47	1,56
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	5,85	5,21	5,02	97,84	97,50	97,50
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	15,05	22,10	5,13	2,16	2,50	2,50
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,03	5,58	5,02	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

13. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai Rp10.542,7 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp8.568,1 triliun.

Tabel 2.8
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012–2014 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 152,3	1 275,0	1 410,7	1 039,4	1 083,2	1 128,5
B Pertambangan dan Penggalian	1 000,3	1 043,0	1 035,1	771,6	785,0	789,3
C Industri Pengolahan	1 848,1	1 998,7	2 215,8	1 697,8	1 774,1	1 856,3
D Pengadaan Listrik dan Gas	95,6	98,7	114,1	84,4	88,8	93,8
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,6	7,1	7,7	6,3	6,6	6,8
F Konstruksi	805,2	906,0	1 041,9	728,2	772,7	826,6
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 138,5	1 263,8	1 410,9	1 067,9	1 118,2	1 172,4
H Transportasi dan Pergudangan	313,2	368,7	450,6	284,7	308,5	333,2
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,6	289,5	330,7	228,2	243,7	258,2
J Informasi dan Komunikasi	311,4	341,0	368,9	316,3	349,2	384,1
K Jasa Keuangan dan Asuransi	320,5	368,9	408,6	280,9	306,4	321,5
L Real Estat	237,9	264,3	294,67	229,3	244,2	256,4
M,N Jasa Perusahaan	127,7	144,67	166,0	116,3	125,5	137,8
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	340,6	371,2	404,4	282,2	289,0	296,1
P Jasa Pendidikan	270,4	309,4	346,6	232,7	251,8	267,6
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,2	96,7	109,1	78,4	84,5	91,3
R,S,T,U Jasa Lainnya	122,6	140,3	163,5	115,7	123,1	134,1
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	8 429,7	9 286,9	10 279,2	7 560,3	7 954,5	8 354,0
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	186,0	237,8	263,5	166,8	203,7	214,1
PRODUK DOMESTIK BRUTO	8 615,7	9 524,7	10 542,7	7 727,1	8 158,2	8 568,1

14. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,02 persen ditopang oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,14 persen. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh 12,43 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh 1,98 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,12 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dari pertumbuhan tahun lalu lebih disebabkan oleh komponen Ekspor yang tumbuh hanya sebesar 1,02 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh hanya 2,19 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2012–2014 (persen)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,49	5,38	5,14	55,35	56,20	56,07
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,68	8,18	12,43	1,04	1,09	1,18
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,53	6,93	1,98	9,25	9,50	9,54
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	9,13	5,28	4,12	32,72	32,12	32,57
5 Perubahan Inventori	-	-	-	2,35	1,92	2,08
6 Ekspor Barang dan Jasa	1,61	4,17	1,02	24,59	23,98	23,78
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,00	1,86	2,19	24,99	24,76	24,48
Diskrepansi Statistik	-	-	-	-0,31	-0,05	-0,68
PDB	6,03	5,58	5,02	100 00	100 00	100 00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

15. Pada tahun 2014, PDB dari sisi pengeluaran digunakan untuk memenuhi Konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,07 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi Fisik 32,57 persen, Ekspor Barang dan Jasa 23,78 persen, Konsumsi Pemerintah 9,54 persen, dan Konsumsi LNPRT 1,18 persen. Sedangkan untuk penyediaan dari Impor sebesar 23,78 persen.

Tabel 2.10
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2012–2014 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 768,7	5 352,7	5 911,2	4 195,8	4 421,7	4 649,1
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	89,6	103,9	124,5	81,9	88,6	99,6
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	796,8	905,0	1 005,4	681,8	729,1	743,5
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2 819,0	3 059,8	3 434,1	2 527,7	2 661,3	2 771,0
5 Perubahan Inventori	202,6	183,3	219,0	174,2	149,1	162,9
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 119,0	2 283,8	2 501,2	1 945,1	2 026,1	2 046,7
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 152,9	2 359,2	2 580,5	1 910,3	1 945,9	1 988,5
Diskrepansi Statistik	-27,2	-4,5	-72,2	30,9	28,1	83,9
PDB	8 615,7	9 524,7	10 542,7	7 727,1	8 158,2	8 568,1

16. Dalam kurun waktu 2010-2014, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp28,8 juta, tahun 2011 sebesar Rp32,4 juta, tahun 2012 sebesar Rp35,1 juta, pada tahun 2013 mencapai Rp38,3 juta, dan pada tahun 2014 mencapai Rp41,8 juta.

Tabel 2.11
PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2014

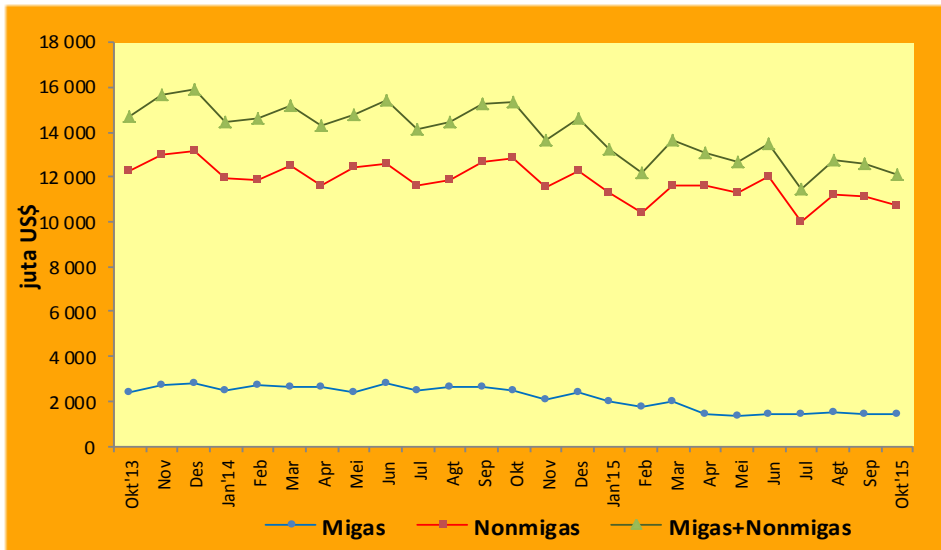
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB Per Kapita					
Atas Dasar Harga Berlaku					
a. Nilai (juta rupiah)	28,8	32,4	35,1	38,3	41,8
b. Indeks Peningkatan (persen)	–	12,46	14,50	9,04	9,22
c. Nilai (US\$)	3 198,3	3 721,2	3 751,4	3 669,7	3 531,5

III. EKSPOR OKTOBER 2015

1. Nilai ekspor Indonesia Oktober 2015 mencapai US\$12,08 miliar, atau turun sebesar 4,00 persen dibanding ekspor September 2015. Demikian juga dibanding Oktober 2014, ekspor turun sebesar 20,98 persen.

Nilai ekspor Oktober 2015 mencapai US\$12,08 miliar, turun 4,00 persen

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)
Oktober 2013–Oktober 2015



2. Ekspor nonmigas Oktober 2015 mencapai US\$10,71 miliar, turun 3,86 persen dibanding ekspor nonmigas September 2015, demikian juga turun 16,88 persen dibanding ekspor Oktober 2014.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Oktober 2015 mencapai US\$127,22 miliar atau turun 14,04 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2014, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US\$111,46 miliar atau turun 8,77 persen.
4. Penurunan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2015 terhadap September 2015 terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US\$319,4 juta (84,95 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$121,8 juta (8,46 persen).

5. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat Oktober 2015 mencapai angka terbesar, yaitu US\$1,22 miliar, disusul Tiongkok US\$1,09 miliar dan Jepang US\$1,01 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,05 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US\$1,23 miliar.
6. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Oktober 2015 turun sebesar 8,38 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2014, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 13,00 persen, sedangkan ekspor hasil pertanian turun 0,17 persen.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Oktober 2015 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$21,51 miliar (16,91 persen), diikuti Kalimantan Timur sebesar US\$15,67 miliar (12,32 persen) dan Jawa Timur sebesar US\$14,13 miliar (11,10 persen).

Tabel 3.1
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)

Uraian	2014		2015			Δ (%)			Peran (%) Jan–Okt 2015
	Oktober	Jan–Okt	September	Oktober	Jan–Okt	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	15 292,7	147 998,9	12 588,4	12 084,8	127 217,7	-20,98	-4,00	-14,04	100,00
Migas	2 413,2	25 815,4	1 453,6	1 379,5	15 755,4	-42,83	-5,09	-38,97	12,38
-Minyak Mentah	652,5	7 841,9	590,3	400,5	5 453,9	-38,62	-32,15	-30,45	4,28
-Hasil Minyak	397,0	3 197,6	107,7	95,6	1 589,3	-75,91	-11,21	-50,30	1,25
-Gas	1 363,7	14 775,9	755,6	883,4	8 712,2	-35,22	16,92	-41,04	6,85
Nonmigas	12 879,5	122 183,5	11 134,8	10 705,3	111 462,3	-16,88	-3,86	-8,77	87,62
-Pertanian	546,6	4 768,7	531,2	512,6	4 760,3	-6,23	-3,50	-0,17	3,74
-Industri Pengolahan	10 580,7	98 430,3	9 026,5	8 923,0	90 184,9	-15,67	-1,15	-8,38	70,89
-Pertambangan dan Lainnya	1 752,2	18 984,5	1 577,1	1 269,7	16 517,1	-27,54	-19,49	-13,00	12,99

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)
Triwulanan 2014–2015

Uraian	2014		2015			Perubahan Triwulan (%)				
	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	IV'14	I'15	II'15	III'15	III'15
						thd	thd	thd	thd	thd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	III'14	IV'14	I'15	II'15	III'14
Total Ekspor	43 881,6	43 273,8	39 052,0	39 300,0	36 780,9	-1,39	-9,76	0,63	-6,41	-16,18
Migas	7 717,1	6 616,6	5 701,2	4 268,4	4 406,3	-14,26	-13,83	-25,13	3,23	-42,90
-Minyak Mentah	2 547,1	2 025,6	1 859,7	1 555,0	1 638,8	-20,48	-8,19	-16,39	5,39	-35,66
-Hasil Minyak	862,0	822,9	607,5	510,8	375,3	-4,53	-26,17	-15,93	-26,51	-56,46
-Gas	4 308,0	3 768,1	3 234,0	2 202,6	2 392,2	-12,53	-14,17	-31,89	8,61	-44,47
Nonmigas	36 164,5	36 657,2	33 350,8	35 031,6	32 374,6	1,36	-9,02	5,04	-7,58	-10,48
-Pertanian	1 568,6	1 548,5	1 317,6	1 370,8	1 559,4	-1,28	-14,91	4,04	13,76	-0,58
-Industri Pengolahan	28 743,3	29 480,4	26 838,8	28 568,4	25 854,7	2,56	-8,96	6,44	-9,50	-10,05
-Pertambangan dan Lainnya	5 852,6	5 628,3	5 194,4	5 092,4	4 960,5	-3,83	-7,71	-1,96	-2,59	-15,24

Tabel 3.3
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	September 2015	Oktober 2015	Δ	Δ%	Januari-Oktober			
					2014	2015	Δ%	Peran (%) 2015
					(1)	(2)	(3)	(4)
1. Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	1 439,1	1 560,9	121,8	8,46	17 601,7	15 617,5	-11,27	14,01
2. Perhiasan/permata (71)	559,3	379,3	-180,0	-32,18	3 866,6	4 998,4	29,27	4,48
3. Kendaraan dan bagiannya (87)	559,3	478,8	-80,5	-14,40	4 308,7	4 700,1	9,08	4,22
4. Alas kaki (64)	319,1	368,0	48,9	15,29	3 329,5	3 663,4	10,03	3,29
5. Bijih, kerak, dan abu logam (26)	376,0	56,6	-319,4	-84,95	1 379,7	2 792,9	102,43	2,51
6. Kopi, teh, rempah-rempah (09)	253,2	202,2	-51,0	-20,11	1 500,1	1 905,7	27,04	1,71
7. Benda-benda dari besi dan baja (73)	251,3	157,8	-93,5	-37,19	1 909,5	1 752,9	-8,20	1,57
8. Tembaga (74)	77,4	111,4	34,0	44,01	1 699,8	1 305,3	-23,21	1,17
9. Timah (80)	95,4	146,8	51,4	53,88	1 589,4	1 099,1	-30,85	0,99
10. Buah-buahan (08)	54,9	92,0	37,1	67,64	523,3	613,9	17,33	0,55
Total 10 Golongan Barang	3 985,0	3 553,8	-431,2	-10,82	37 708,3	38 449,2	1,96	34,50
Lainnya	7 149,8	7 151,5	1,7	0,02	84 475,2	73 013,1	-13,57	65,50
Total Ekspor Nonmigas	11 134,8	10 705,3	-429,5	-3,86	122 183,5	111 462,3	-8,77	100,00

Tabel 3.4
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	September 2015	Oktober 2015	Δ	$\Delta\%$	Januari-Oktober			
					2014	2015	$\Delta\%$	Peran (%) 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	2 340,2	2 342,8	2,6	0,11	24 183,0	23 009,8	-4,85	20,64
1 Singapura	759,6	747,3	-12,3	-1,62	8 404,7	7 349,7	-12,55	6,59
2 Malaysia	467,8	510,2	42,4	9,05	5 371,1	5 269,8	-1,89	4,73
3 Thailand	371,3	393,0	21,7	5,84	4 250,0	3 936,1	-7,39	3,53
ASEAN Lainnya	741,5	692,3	-49,2	-6,63	6 157,2	6 454,2	4,82	5,79
Uni Eropa	1 214,4	1 227,1	12,7	1,04	14 107,3	12 447,2	-11,77	11,17
4 Jerman	209,5	220,8	11,3	5,39	2 393,2	2 229,1	-6,86	2,00
5 Belanda	280,7	259,7	-21,0	-7,48	3 253,6	2 841,0	-12,68	2,55
6 Italia	151,1	143,7	-7,4	-4,90	1 925,5	1 629,4	-15,38	1,46
Uni Eropa Lainnya	573,1	602,9	29,8	5,20	6 535,0	5 747,7	-12,05	5,16
Negara Utama Lainnya	5 424,2	5 209,2	-215,0	-3,96	60 642,1	55 040,0	-9,24	49,38
7 Tiongkok	1 046,1	1 093,8	47,7	4,56	13 776,1	11 006,9	-20,10	9,88
8 Jepang	1 120,2	1 014,6	-105,6	-9,43	12 066,3	10 914,5	-9,55	9,79
9 Amerika Serikat	1 282,6	1 215,2	-67,4	-5,26	13 208,2	12 829,0	-2,87	11,51
10 India	833,6	1 001,2	167,6	20,11	10 263,5	9 845,2	-4,07	8,83
11 Australia	359,1	239,7	-119,4	-33,25	3 278,3	2 603,6	-20,58	2,34
12 Korea Selatan	442,5	394,5	-48,0	-10,84	4 762,6	4 625,9	-2,87	4,15
13 Taiwan	340,1	250,2	-89,9	-26,42	3 287,1	3 214,9	-2,20	2,88
Total 13 Negara Tujuan	7 664,2	7 483,9	-180,3	-2,35	86 240,2	78 295,1	-9,21	70,24
Lainnya	3 470,6	3 221,4	-249,2	-7,18	35 943,3	33 167,2	-7,72	29,76
Total Ekspor Nonmigas	11 134,8	10 705,3	-429,5	-3,86	122 183,5	111 462,3	-8,77	100,00

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2013–2015
(FOB: juta US\$)

Bulan	2013			2014r			2015		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	2 653,7	12 721,8	15 375,5	2 501,7	11 970,6	14 472,3	1 959,0	11 285,9	13 244,9
Feb	2 567,5	12 448,1	15 015,6	2 729,2	11 904,9	14 634,1	1 753,4	10 419,4	12 172,8
Mar	2 928,3	12 096,3	15 024,6	2 641,3	12 551,3	15 192,6	1 988,9	11 645,4	13 634,3
Apr	2 452,0	12 308,9	14 760,9	2 651,4	11 641,1	14 292,5	1 458,2	11 645,5	13 103,7
Mei	2 926,3	13 207,1	16 133,4	2 375,7	12 447,9	14 823,6	1 370,3	11 319,9	12 690,2
Jun	2 800,4	11 958,5	14 758,9	2 786,0	12 623,5	15 409,5	1 439,9	12 066,2	13 506,1
Jul	2 282,6	12 805,3	15 087,9	2 496,3	11 627,8	14 124,1	1 421,8	10 044,0	11 465,8
Agt	2 720,5	10 363,2	13 083,7	2 598,1	11 883,5	14 481,6	1 530,9	11 195,9	12 726,8
Sep	2 414,7	12 292,1	14 706,8	2 622,6	12 653,2	15 275,8	1 453,6	11 134,8	12 588,4
Okt	2 715,2	12 983,1	15 698,3	2 413,2	12 879,5	15 292,8	1 379,5	10 705,3	12 084,8
Nov	2 766,9	13 171,7	15 938,6	2 035,4	11 509,3	13 544,7			
Des	3 405,1	13 562,7	16 967,8	2 168,0	12 268,3	14 436,3			
Total	32 633,0	149 918,8	182 551,8	30 018,8	145 961,2	175 980,0	15 755,4	111 462,3	127 217,7

Tabel 3.6
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang
dan Pelabuhan Muat, Januari–Oktober 2015

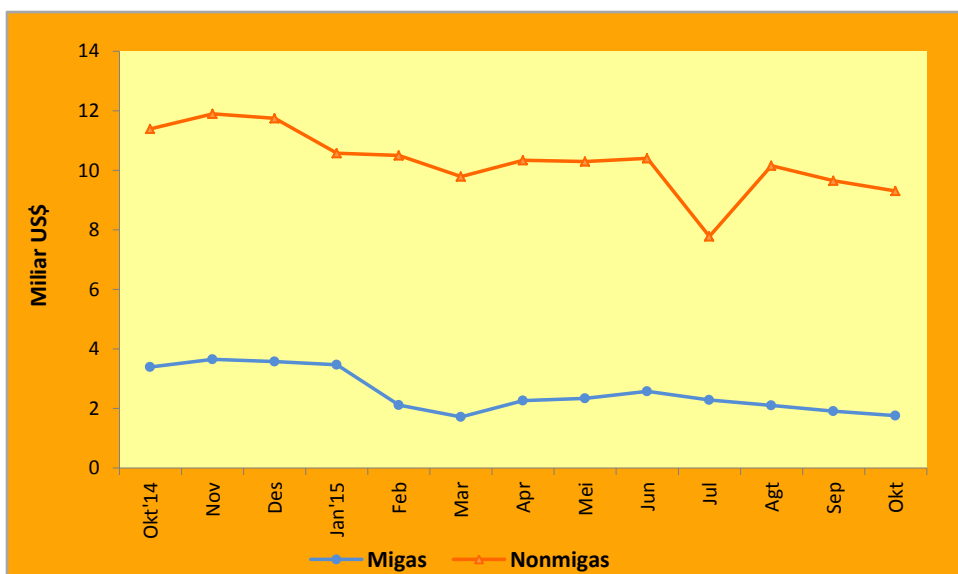
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	83,7	0,09	88,12	11,3	0,03	11,88	95,0	0,07	100,00
2	Sumatera Utara	6 343,6	6,77	99,43	36,4	0,11	0,57	6 380,0	5,02	100,00
3	Sumatera Barat	1 331,7	1,42	97,70	31,3	0,09	2,30	1 363,1	1,07	100,00
4	Riau	12 016,1	12,82	98,71	157,2	0,47	1,29	12 173,3	9,57	100,00
5	Kepulauan Riau	8 653,5	9,23	100,00	0,3	0,00	0,00	8 653,8	6,80	100,00
6	Jambi	923,4	0,99	40,24	1 371,6	4,10	59,76	2 294,9	1,80	100,00
7	Sumatera Selatan	2 064,4	2,20	96,16	82,4	0,25	3,84	2 146,8	1,69	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	1 201,5	1,28	95,71	53,9	0,16	4,29	1 255,4	0,99	100,00
9	Bengkulu	74,1	0,08	54,03	63,1	0,19	45,97	137,2	0,11	100,00
10	Lampung	3 256,4	3,47	99,15	27,9	0,08	0,85	3 284,3	2,58	100,00
11	DKI Jakarta	9 898,7	10,56	99,90	10,1	0,03	0,10	9 908,9	7,79	100,00
12	Jawa Barat	668,9	0,71	3,11	20 841,0	62,24	96,89	21 509,9	16,91	100,00
13	Banten	830,8	0,89	10,96	6 748,9	20,16	89,04	7 579,7	5,96	100,00
14	Jawa Tengah	4 323,1	4,61	81,60	974,6	2,91	18,40	5 297,7	4,16	100,00
15	DI Yogyakarta	6,7	0,01	2,44	269,3	0,80	97,56	276,0	0,22	100,00
16	Jawa Timur	13 832,5	14,76	97,93	292,9	0,87	2,07	14 125,4	11,10	100,00
17	Bali	174,5	0,19	41,98	241,1	0,72	58,02	415,6	0,33	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	1 195,9	1,28	99,50	6,0	0,02	0,50	1 201,9	0,94	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	19,2	0,02	89,74	2,2	0,01	10,26	21,4	0,02	100,00
20	Kalimantan Barat	477,9	0,51	98,42	7,7	0,02	1,58	485,6	0,38	100,00
21	Kalimantan Tengah	385,3	0,41	40,72	561,1	1,68	59,28	946,4	0,74	100,00
22	Kalimantan Selatan	4 688,4	5,00	96,16	187,2	0,56	3,84	4 875,6	3,83	100,00
23	Kalimantan Timur	14 764,5	15,75	94,21	907,0	2,71	5,79	15 671,5	12,32	100,00
24	Kalimantan Utara	137,5	0,15	95,89	5,9	0,02	4,11	143,4	0,11	100,00
25	Sulawesi Utara	674,3	0,72	78,54	184,3	0,55	21,46	858,5	0,67	100,00
26	Gorontalo	29,7	0,03	98,12	0,6	0,00	1,88	30,3	0,02	100,00
27	Sulawesi Tengah	289,2	0,31	97,65	7,0	0,02	2,35	296,2	0,23	100,00
28	Sulawesi Selatan	1 195,4	1,28	97,21	34,4	0,10	2,79	1 229,7	0,97	100,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	255,1	0,76	100,00	255,1	0,20	100,00
30	Sulawesi Tenggara	113,8	0,12	57,67	83,5	0,25	42,33	197,4	0,16	100,00
31	Maluku	33,5	0,04	67,87	15,9	0,05	32,13	49,4	0,04	100,00
32	Maluku Utara	9,5	0,01	92,11	0,8	0,00	7,89	10,4	0,01	100,00
33	Papua	1 688,5	1,80	100,00	0,0	0,00	0,00	1 688,6	1,33	100,00
34	Papua Barat	2 347,3	2,50	99,49	12,1	0,04	0,51	2 359,4	1,85	100,00
Total Ekspor		93 733,9	100,00	-	33 483,8	100,00	-	127 217,7	100,00	-

IV. IMPOR OKTOBER 2015

1. Nilai impor Indonesia Oktober 2015 sebesar US\$11,07 miliar atau turun 4,27 persen dibanding impor September 2015. Dibanding impor Oktober 2014 turun 27,81 persen.

**Impor Oktober 2015
sebesar US\$11,07 miliar
atau turun 4,27 persen**

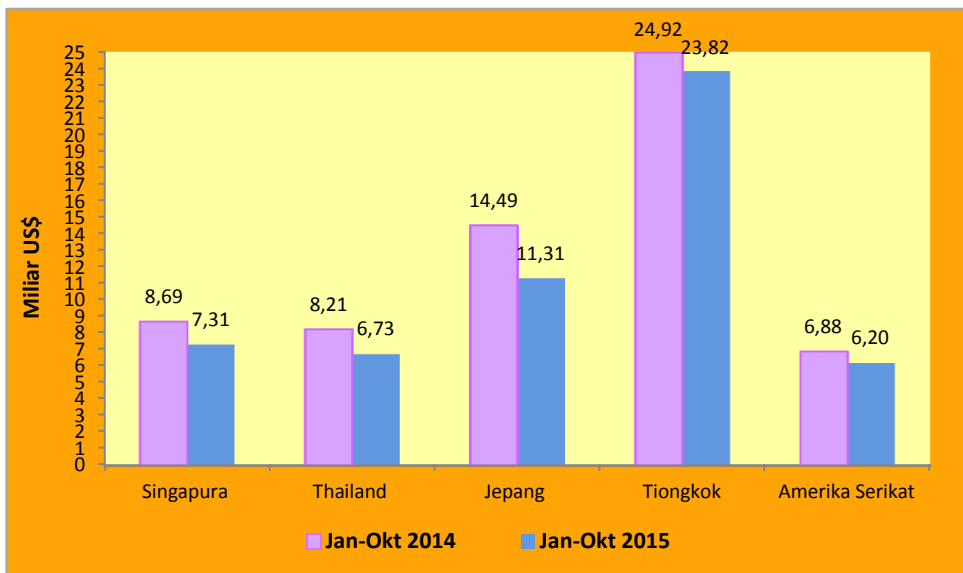
Grafik 4.1
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)
Oktober 2014–Oktober 2015



2. Impor nonmigas Oktober 2015 sebesar US\$9,31 miliar, turun 3,50 persen dibanding September 2015 (US\$9,65 miliar). Selama Januari–Oktober 2015 impor nonmigas mencapai US\$97,89 miliar atau turun 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$113,11 miliar).
3. Impor migas Oktober 2015 sebesar US\$1,76 miliar, turun 8,12 persen dibanding September 2015 (US\$1,91 miliar). Selama Januari–Oktober 2015 impor migas mencapai US\$21,17 miliar atau turun 42,16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$36,60 miliar).

4. Peningkatan nilai impor nonmigas Oktober 2015 terbesar adalah kapal laut dan bangunan terapung sebesar US\$61,5 juta, naik 143,69 persen dibanding September 2015. Impor golongan barang tersebut selama Januari–Oktober 2015 mencapai US\$968,9 juta, turun 8,47 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari–Oktober 2015 ditempati Tiongkok 24,34 persen, Jepang 11,55 persen, dan Singapura 7,47 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 21,89 persen dan 9,51 persen.

Grafik 4.2
Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)
Januari–Oktober 2014 dan 2015



6. Nilai impor selama Januari–Oktober 2015 pada golongan barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal mengalami penurunan masing-masing sebesar 16,14 persen, 21,48 persen, dan 17,68 persen dibanding impor periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Neraca perdagangan Indonesia Oktober 2015 surplus sebesar US\$1,01 miliar.

Tabel 4.1
Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya
Januari–Oktober 2014 dan 2015

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan-Okt '15 (%)
	September 2015	Oktober 2015	Jan-Okt 2014	Jan-Okt 2015	Okt 2015 thd Sep 2015	Jan-Okt 2015 thd Jan-Okt 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	11 558,6	11 065,6	149 702,7	119 054,7	-4,27	-20,47	100,00
Migas	1 912,4	1 757,1	36 597,4	21 168,7	-8,12	-42,16	17,78
- Minyak Mentah	703,5	561,3	11 166,7	6 824,9	-20,21	-38,88	5,73
- Hasil Minyak	1 100,9	1 010,6	22 857,1	12 680,8	-8,20	-44,52	10,65
- Gas	108,0	185,2	2 573,6	1 663,0	71,48	-35,38	1,40
Nonmigas	9 646,2	9 308,5	113 105,3	97 886,0	-3,50	-13,46	82,22

Tabel 4.2
Perkembangan Impor Indonesia
Oktober 2014–Oktober 2015

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014						
Triwulan II	10 793,0	35 929,5	46 723,0	-1,90	11,48	8,08
Triwulan III	11 223,9	33 197,1	44 421,0	3,99	-7,60	-4,93
Oktober	3 577,6	11 750,4	15 328,0	-2,03	-1,21	-1,40
November	3 473,0	10 568,6	14 041,6	-2,92	-10,06	-8,39
Desember	3 389,5	11 045,0	14 434,5	-2,40	4,51	2,80
Triwulan IV	10 440,1	33 364,0	43 804,1	-6,98	0,50	-1,39
Jan-Okt	36 597,4	113 105,3	149 702,7	-1,37	-4,89	-4,05
Jan-Des	43 459,9	134 718,9	178 178,8	-3,99	-4,70	-4,53
Januari	2 115,0	10 497,6	12 612,6	-37,60	-4,96	-12,62
Februari	1 719,6	9 790,5	11 510,1	-18,70	-6,74	-8,74
Maret	2 268,0	10 340,7	12 608,7	31,89	5,62	9,54
Triwulan I	6 102,6	30 628,8	36 731,4	-41,55	-8,20	-16,15
April	2 336,3	10 290,0	12 626,3	3,01	-0,49	0,14
Mei	2 080,5	9 533,1	11 613,6	-10,95	-7,36	-8,02
Juni	2 577,5	10 400,6	12 978,1	23,89	9,10	11,75
Triwulan II	6 994,3	30 226,7	37 218,0	14,61	-1,32	1,32
Juli	2 294,3	7 787,6	10 081,9	-10,99	-25,12	-22,32
Agustus	2 108,0	10 291,2	12 399,2	-8,12	32,15	22,98
September	1 912,4	9 646,2	11 558,6	-9,28	-6,27	-6,78
Triwulan III	6 314,7	27 725,0	34 039,7	-9,72	-8,27	-8,54
Oktober	1 757,1	9 308,5	11 065,6	-8,12	-3,50	-4,27
Jan-Okt	21 168,7	97 886,0	119 054,7	-42,16	-13,46	-20,47

Tabel 4.3
Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya
Januari–Oktober 2014 dan 2015

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Okt'15 (%)
	September 2015	Oktober 2015	Jan-Okt 2014	Jan-Okt 2015	Okt 2015 thd Sep 2015	Jan- Okt '15 thd Jan- Okt '14	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 921,1	1 806,5	21 776,8	18 508,1	-5,96	-15,01	18,91
2. Kendaraan bermotor dan bagiannya (87)	429,8	383,2	5 375,8	4 585,1	-10,84	-14,71	4,68
3. Sereal (10)	270,3	217,8	2 943,1	2 481,9	-19,42	-15,67	2,53
4. Pupuk (31)	186,9	129,7	1 514,0	1 738,1	-30,60	14,80	1,78
5. Bubur kayu/pulp (47)	95,5	125,5	1 494,1	1 123,0	31,41	-24,84	1,15
6. Kapal laut dan bangunan terapung (89)	42,8	104,3	1 058,6	968,9	143,69	-8,47	0,99
7. Kapal terbang dan bagiannya (88)	124,9	57,9	513,1	648,3	-53,64	26,35	0,66
8. Binatang hidup (01)	19,4	61,1	526,2	448,4	214,95	-14,79	0,46
9. Perhiasan/permata (71)	7,7	42,8	73,6	376,2	455,84	411,14	0,38
10. Lokomotif dan peralatan kereta api (86)	14,8	49,1	157,4	175,1	231,76	11,25	0,18
Total 10 Golongan Barang	3 113,2	2 977,9	35 432,7	31 053,1	-4,35	-12,36	31,72
Barang Lainnya	6 533,0	6 330,6	77 672,6	66 832,9	-3,10	-13,96	68,28
Total Impor Nonmigas	9 646,2	9 308,5	113 105,3	97 886,0	-3,50	-13,46	100,00

Tabel 4.4
Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang
Januari–Oktober 2015

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 ASEAN	2 428,8	26 369,5	3 759,6	32 557,9	7,46	80,99	11,55	100,00
2 Jepang	449,0	7 962,5	2 919,0	11 330,5	3,96	70,27	25,76	100,00
3 Korea Selatan	314,0	6 067,1	807,3	7 188,4	4,39	84,40	11,23	100,00
4 Tiongkok	2 094,8	14 290,3	7 614,9	24 000,0	8,73	59,54	31,73	100,00
5 India	146,4	1 775,6	407,1	2 329,1	6,29	76,24	17,48	100,00
6 Australia	318,6	3 637,2	105,2	4 061,0	7,85	89,56	2,59	100,00
7 Selandia Baru	242,4	289,6	13,7	545,7	44,42	53,07	2,51	100,00
8 Amerika Serikat	563,5	4 788,9	892,6	6 245,0	9,02	76,68	14,29	100,00
9 Uni Eropa	1 186,6	5 285,7	2 895,1	9 367,4	12,67	56,43	30,91	100,00
10 Lainnya	1 059,8	19 347,2	1 022,7	21 429,7	4,95	90,28	4,77	100,00
Total Impor	8 803,9	89 813,6	20 437,2	119 054,7	7,39	75,44	17,17	100,00

Tabel 4.5
Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang
Januari–Oktober 2014 dan 2015

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Okt '15 (%)
	September 2015	Oktober 2015	Jan- Okt 2014	Jan-Okt 2015	Okt 2015 thd Sep 2015	Jan-Okt '15 thd Jan-Okt '14	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	2 060,7	1 953,7	25 203,8	21 431,2	-5,19	-14,97	21,89
1 Singapura	695,2	671,6	8 686,7	7 314,1	-3,39	-15,80	7,47
2 Thailand	693,4	625,1	8 214,2	6 727,6	-9,85	-18,10	6,87
3 Malaysia	377,8	388,4	4 879,9	4 142,6	2,81	-15,11	4,23
ASEAN Lainnya	294,3	268,6	3 423,0	3 246,9	-8,73	-5,14	3,32
Uni Eropa	978,0	817,7	10 600,1	9 311,3	-16,39	-12,16	9,51
4 Jerman	282,6	281,3	3 485,2	2 894,1	-0,46	-16,96	2,96
5 Belanda	54,5	53,4	1 118,7	640,0	-2,02	-42,79	0,65
6 Italia	109,1	85,7	767,6	1 143,5	-21,45	48,97	1,17
Uni Eropa Lainnya	531,8	397,3	5 228,6	4 633,7	-25,29	-11,38	4,73
Negara Utama Lainnya	5 465,6	5 405,3	63 497,5	55 501,7	-1,10	-12,59	56,70
7 Tiongkok	2 492,4	2 319,2	24 916,1	23 824,1	-6,95	-4,38	24,34
8 Jepang	1 048,9	1 102,4	14 492,4	11 305,1	5,10	-21,99	11,55
9 Amerika Serikat	590,8	626,0	6 882,8	6 204,7	5,96	-9,85	6,34
10 Korea Selatan	523,7	497,0	6 469,9	5 293,4	-5,10	-18,18	5,41
11 Australia	358,5	421,7	4 607,2	3 987,4	17,63	-13,45	4,07
12 Taiwan	243,3	241,4	3 036,8	2 632,0	-0,78	-13,33	2,69
13 India	208,0	197,6	3 092,3	2 255,0	-5,00	-27,08	2,30
Total 13 Negara Utama	7 678,2	7 510,8	90 649,8	78 363,6	-2,18	-13,55	80,05
Negara Lainnya	1 968,0	1 797,7	22 455,5	19 522,4	-8,65	-13,06	19,95
Total Impor Nonmigas	9 646,2	9 308,5	113 105,3	97 886,0	-3,50	-13,46	100,00

Tabel 4.6
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2014–Oktober 2015
(Nilai CIF: Juta US\$)

Bulan	2014				2015			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	985,1	11 302,0	2 629,1	14 916,2	786,3	9 618,3	2 208,1	12 612,7
Februari	898,6	10 552,5	2 339,6	13 790,7	823,8	8 762,8	1 923,5	11 510,1
Maret	1 081,9	11 197,7	2 244,1	14 523,7	930,3	9 331,1	2 347,3	12 608,7
April	1 130,1	12 453,8	2 671,1	16 255,0	910,4	9 680,9	2 035,0	12 626,3
Mei	1 045,6	11 349,7	2 375,0	14 770,3	944,2	8 720,0	1 949,4	11 613,6
Juni	1 152,4	11 947,8	2 597,6	15 697,8	1 027,9	9 773,5	2 176,7	12 978,1
Juli	841,2	11 108,1	2 132,4	14 081,7	705,6	7 715,0	1 661,3	10 081,9
Agustus	1 165,8	11 129,1	2 498,3	14 793,2	1 080,1	9 275,1	2 044,0	12 399,2
September	1 168,8	11 756,5	2 620,8	15 546,1	823,1	8 691,9	2 043,6	11 558,6
Oktober	1 028,4	11 581,5	2 718,1	15 328,0	772,3	8 245,0	2 048,3	11 065,6
November	1 026,7	10 737,0	2 277,9	14 041,6				
Desember	1 142,6	11 092,9	2 199,0	14 434,5				
Total	12 667,2	136 208,6	29 303,0	178 178,8	8 803,9	89 813,6	20 437,2	119 054,7
Persentase thd Total (%)	7,11	76,44	16,45	100,00	7,39	75,44	17,17	100,00

Tabel 4.7
Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Oktober 2015
 (juta US\$)

Negara Asal Barang	Agustus 2015	September 2015	Oktober 2015	Jan-Okt 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tiongkok	2 541,7	2 509,0	2 327,8	24 000,0
2 Singapura	1 635,4	1 446,9	1 343,7	15 183,3
3 Jepang	1 160,6	1 052,5	1 103,7	11 330,4
4 Malaysia	640,0	596,8	594,5	7 237,9
5 Korea Selatan	669,8	712,3	645,0	7 188,4
6 Thailand	693,8	697,2	630,9	6 781,9
7 Amerika Serikat	586,6	593,0	629,3	6 245,1
8 Australia	401,2	358,6	451,9	4 061,1
9 Saudi Arabia	386,6	285,8	292,5	2 958,7
10 Jerman	300,7	284,5	281,9	2 906,4
11 Taiwan	249,2	244,0	243,0	2 670,2
12 Vietnam	248,7	232,2	200,3	2 524,7
13 India	211,4	210,7	202,5	2 329,2
14 Brazil	231,0	180,3	199,2	2 018,5
15 Hongkong	150,0	135,5	146,1	1 422,9
Total 15 Negara	10 106,6	9 539,2	9 292,5	98 858,5
Negara Lainnya	2 292,6	2 019,4	1 773,1	20 196,2
Total Impor	12 399,2	11 558,6	11 065,6	119 054,7
Persentase Terhadap Total				
Total 15 Negara	81,5	82,5	84,0	83,0
Negara Lainnya	18,5	17,5	16,0	17,0

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Indonesia, Oktober 2014–Oktober 2015
 (miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014									
Oktober	2,47	12,88	15,35	3,58	11,75	15,33	-1,11	1,13	0,02
November	2,11	11,51	13,62	3,47	10,57	14,04	-1,36	0,94	-0,42
Desember	2,35	12,27	14,62	3,39	11,05	14,43	-1,04	1,22	0,19
Jan-Okt	25,87	122,18	148,05	36,60	113,10	149,70	-10,73	9,08	-1,65
Jan-Des	30,33	145,96	176,29	43,46	134,72	178,18	-13,13	11,24	-1,88

Januari	1,96	11,29	13,25	2,11	10,50	12,61	-0,15	0,79	0,64
Februari	1,75	10,42	12,17	1,72	9,79	11,51	0,03	0,63	0,66
Maret	1,99	11,64	13,63	2,27	10,34	12,61	-0,28	1,30	1,02
April	1,46	11,65	13,11	2,34	10,29	12,63	-0,88	1,36	0,48
Mei	1,37	11,32	12,69	2,08	9,53	11,61	-0,71	1,79	1,08
Juni	1,44	12,07	13,51	2,58	10,40	12,98	-1,14	1,67	0,53
Juli	1,42	10,05	11,47	2,29	7,79	10,08	-0,87	2,26	1,39
Agustus	1,53	11,20	12,73	2,11	10,29	12,40	-0,58	0,91	0,33
September	1,46	11,13	12,59	1,91	9,65	11,56	-0,45	1,48	1,03
Oktober	1,38	10,70	12,08	1,76	9,31	11,07	-0,38	1,39	1,01
Jan-Okt	15,76	111,46	127,22	21,17	97,88	119,05	-5,41	13,57	8,16

Tabel 4.9
Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Triwulan III-2015

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2 585 718	1 191 376	472 664 654	246 002 090
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
2014	516 069	759 928	844 163 741	388 178 457
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
2015	395 714	523 674	250 703 621	110 288 143
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Juli	16 800	30 377	27 228 655	11 413 546
Agustus	24 314	41 208	3 371 126	1 526 586
September	111 730	124 356	4 582 000	2 023 928
Triwulan III	152 844	195 941	35 181 781	14 964 060
Oktober	42 115	69 463	21 092 525	10 505 786

V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014

1. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 126.715,2 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 125.449,6 ribu orang. Rasio Jenis Kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

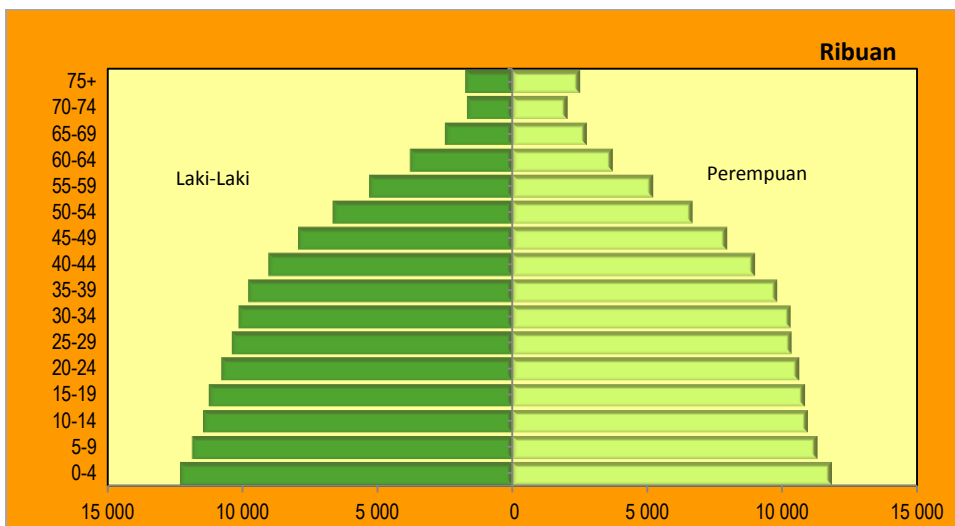
Tabel 5.1
Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014
(ribu orang)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 301,4	11 785,4	24 086,8
5-9	11 857,3	11 252,2	23 109,5
10-14	11 448,3	10 911,9	22 360,2
15-19	11 237,8	10 786,9	22 024,7
20-24	10 768,5	10 583,9	21 352,4
25-29	10 398,2	10 318,1	20 716,3
30-34	10 150,2	10 280,7	20 430,9
35-39	9 802,6	9 784,5	19 587,1
40-44	9 054,2	8 950,5	18 004,7
45-49	7 949,2	7 918,2	15 867,4
50-54	6 650,6	6 663,1	13 313,7
55-59	5 319,6	5 198,5	10 518,1
60-64	3 804,7	3 714,1	7 518,8
65-69	2 500,2	2 753,2	5 253,4
70-74	1 715,0	2 042,0	3 757,0
75+	1 757,4	2 506,4	4 263,8
Total	126 715,2	125 449,6	252 164,8

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

2. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Grafik 5.1 menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

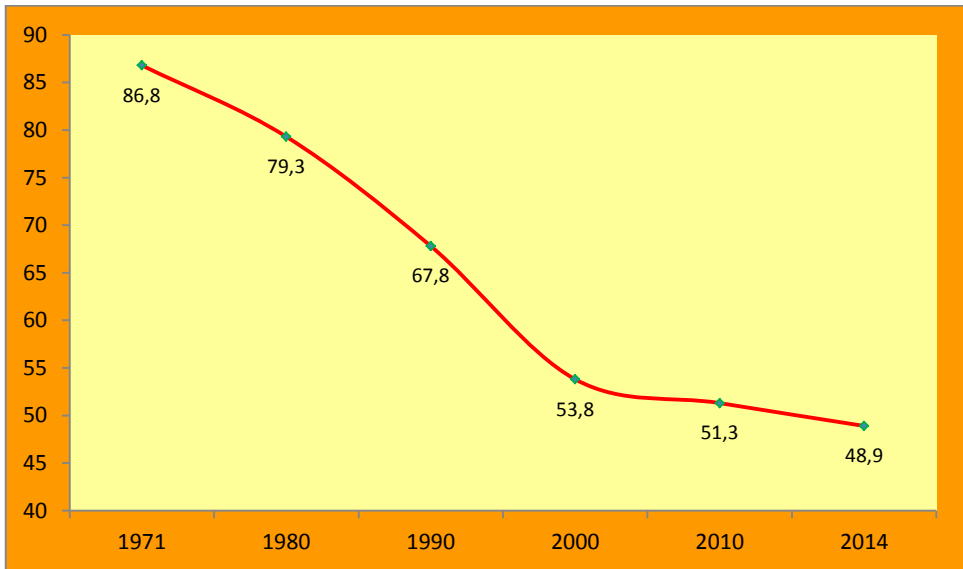
Grafik 5.1
Piramida Penduduk Indonesia, 2014



Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

3. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971-2014. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara usia penduduk non produktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 48,9. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48 - 49 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia memiliki tren yang menurun. Jika pada tahun 1971 rasio ketergantungan sebesar 86,8, maka pada tahun 2014 kondisinya semakin membaik dengan rasio ketergantungan sebesar 48,9. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Era bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2025-2030. Pulau dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara (56,0), dan yang terendah Pulau Jawa (46,3). Tiga provinsi dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (67,5), Sulawesi Tenggara (61,0), dan Maluku (60,4). Sedangkan tiga provinsi dengan rasio ketergantungan terendah adalah DKI Jakarta (39,3), Jawa Timur (44,5), dan Yogyakarta (45,1).

Grafik 5.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014

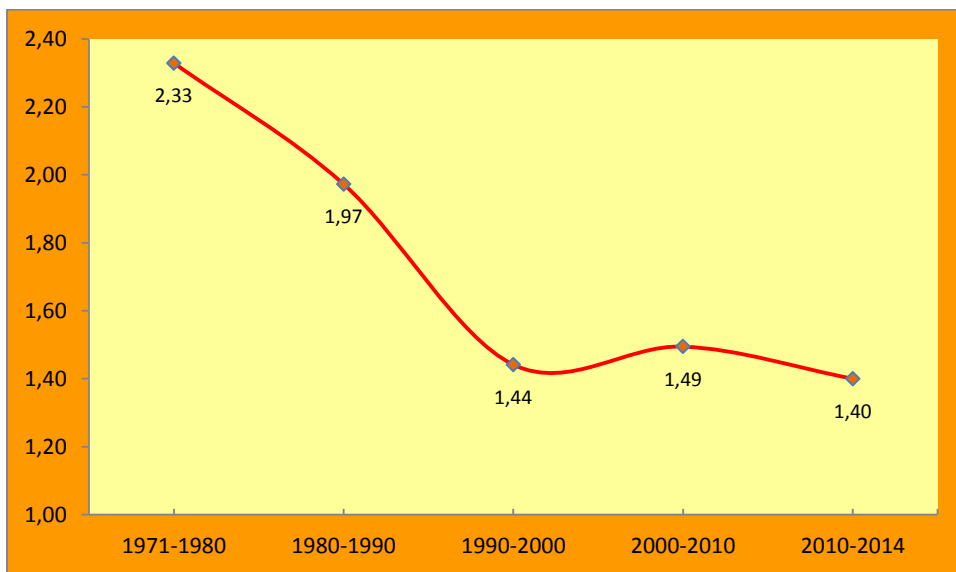


Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan
 Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

4. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010-2014 sebesar 1,40 persen. Dibandingkan dengan periode 1971-1980 (2,33 persen), 1980-1990 (1,97 persen), 1990-2000 (1,44 persen), dan 2000-2010 (1,49 persen), maka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2014 menunjukkan penurunan.
5. Pulau dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kalimantan, yaitu sebesar 2,09 persen. Lima pulau lainnya secara berurutan Maluku dan Papua (2,07 persen), Sumatera (1,70 persen), Bali dan Nusa Tenggara (1,46 persen), Sulawesi (1,45 persen) serta Jawa (1,17 persen). Menurut provinsi, empat provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau (3,16 persen), Papua Barat (2,65 persen), Riau (2,64 persen) dan Kalimantan Timur (2,64 persen). Tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Provinsi Jawa Timur (0,69 persen), Jawa Tengah (0,82 persen) dan DKI Jakarta (1,11 persen).

**Laju pertumbuhan
 penduduk Indonesia pada
 tahun 2010-2014 sebesar
 1,40 persen**

Grafik 5.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2014



Sumber : SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

6. Penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,9 persen. Kemudian, secara berturut-turut diikuti Pulau Sumatera (21,6 persen), Sulawesi (7,3 persen), Kalimantan (6,0 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,5 persen) serta Maluku dan Papua (2,7 persen). Menurut provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terbesar yaitu masing-masing 18,3 persen; 15,3 persen; dan 13,3 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan provinsi dengan proporsi penduduk terendah adalah Papua Barat, Gorontalo dan Maluku Utara yaitu masing-masing 0,3 persen; 0,4 persen dan 0,5 persen.
7. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 132 jiwa per km². Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya (1.109 per km²), kemudian secara berurutan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (190 per km²), Sumatera (113 per km²), Sulawesi (98 per km²), Kalimantan (28 per km²), dan yang paling jarang penduduknya adalah Kepulauan Maluku dan Papua (14 per km²). Kepadatan penduduk menurut provinsi, terpadat di DKI Jakarta (15.173 per km²), Jawa Barat (1.301 per km²) dan Banten (1.211 per km²). Sedangkan tiga provinsi yang

**Kepadatan penduduk
 Indonesia pada tahun 2014
 sebesar 132 jiwa per km²**

terjarang, yaitu Papua Barat (9 per km²), Papua (10 per km²) dan Kalimantan Tengah (16 per km²).

8. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 108,0 sedangkan yang terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 97,7. Tiga provinsi dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu Papua (111,9), Papua Barat (111,5) dan Kalimantan Timur (110,8) sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Barat (94,2), Sulawesi Selatan (95,4) dan Jawa Timur (97,4).
9. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, lansia di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 8,2 persen. Penduduk lansia terbesar terdapat di Pulau Jawa (9,4 persen), kemudian berturut-turut Bali dan Nusa Tenggara (8,3 persen), Sulawesi (7,9 persen), Sumatera (6,5 persen), Kalimantan (5,8 persen) serta Maluku dan Papua (4,2 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penduduk lansia terbesar adalah Yogyakarta (13,2 persen), Jawa Tengah (11,4 persen) dan Jawa Timur (11,2 persen), sedangkan yang terkecil adalah Papua (2,7 persen), Papua Barat (3,8 persen) dan Kepulauan Riau (3,8 persen).
10. Umur Harapan Hidup adalah kemungkinan umur yang akan dicapai seseorang dari sejak lahir. Hasil proyeksi penduduk tahun 2014 menunjukkan umur harapan hidup penduduk Indonesia sebesar 70,6 tahun. Tiga provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta (74,5 tahun), Kalimantan Timur (73,7 tahun) dan Jawa Tengah (73,5 tahun). Sedangkan tiga provinsi dengan umur harapan hidup terendah adalah Sulawesi Barat (63,6 tahun), Papua (64,9 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (65,1 tahun).

**Hasil proyeksi tahun 2014
menunjukkan umur harapan
hidup penduduk Indonesia
sebesar 70,6 tahun**

Tabel 5.2
Demografi Penduduk Indonesia, 2014

Provinsi	Penduduk (000)		Laju Pertumbuh- an Penduduk 2010-2014 (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergan- tungan	Penduduk Lansia (%)	Umur Harapan Hidup
	2010	2014	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Aceh	4 523	4 907	2,06	85	99,7	54,9	6,1	69,6
02. Sumatera Utara	13 029	13 767	1,39	189	99,6	56,6	6,5	68,2
03. Sumatera Barat	4 865	5 132	1,34	122	98,8	55,9	8,6	68,4
04. Riau	5 575	6 188	2,64	71	105,6	52,0	4,6	70,8
05. Kepulauan Riau	1 693	1 917	3,16	234	104,6	49,4	3,8	69,3
06. Jambi	3 108	3 344	1,85	67	104,2	47,9	6,2	70,5
07. Sumatera Selatan	7 482	7 942	1,50	87	103,3	49,9	6,8	69,0
08. Kep. Bangka Belitung	1 230	1 344	2,23	82	108,0	46,4	6,5	69,8
09. Bengkulu	1 722	1 845	1,74	93	104,1	48,4	6,3	68,5
10. Lampung	7 634	8 026	1,26	232	105,3	49,8	7,6	69,8
Sumatera	50 860	54 412	1,70	113	102,4	52,5	6,5	
11. DKI Jakarta	9 640	10 075	1,11	15 173	101,3	39,3	6,2	72,1
12. Jawa Barat	43 227	46 030	1,58	1 301	102,9	48,0	7,8	72,4
13. Banten	10 689	11 705	2,30	1 211	104,1	46,7	5,1	69,2
14. Jawa Tengah	32 444	33 523	0,82	1 022	98,4	48,4	11,4	73,5
15. Yogyakarta	3 468	3 637	1,20	1 161	97,7	45,1	13,2	74,5
16. Jawa Timur	37 566	38 610	0,69	808	97,4	44,5	11,2	70,5
Jawa	137 033	143 580	1,17	1 109	100,2	46,3	9,4	
17. Bali	3 907	4 105	1,24	710	101,4	46,0	10,1	71,3
18. Nusa Tenggara Barat	4 516	4 774	1,40	257	94,2	54,1	7,5	65,1
19. Nusa Tenggara Timur	4 706	5 037	1,71	103	98,2	67,5	7,4	66,0
Bali dan Nusa Tenggara	13 130	13 916	1,46	190	97,7	56,0	8,3	
20. Kalimantan Barat	4 411	4 716	1,68	32	103,9	51,1	6,6	69,9
21. Kalimantan Tengah	2 221	2 440	2,38	16	109,2	46,9	5,0	67,6
22. Kalimantan Selatan	3 643	3 923	1,87	101	102,7	48,8	6,3	67,6
23. Kalimantan Timur	3 576	3 970	2,64	19	110,8	46,7	4,9	73,7
Kalimantan	13 851	15 048	2,09	28	106,2	48,6	5,8	
24. Sulawesi Utara	2 278	2 387	1,17	172	104,2	46,7	9,4	71,0
25. Gorontalo	1 045	1 116	1,65	99	100,4	49,0	6,8	67,1
26. Sulawesi Tengah	2 646	2 831	1,71	46	104,5	50,7	7,1	67,3
27. Sulawesi Selatan	8 060	8 432	1,13	180	95,4	53,5	8,7	69,7
28. Sulawesi Barat	1 165	1 258	1,95	75	100,6	56,7	6,3	63,6
29. Sulawesi Tenggara	2 244	2 448	2,20	64	100,9	61,0	6,2	70,5
Sulawesi	17 437	18 472	1,45	98	99,2	53,0	7,9	
30. Maluku	1 542	1 657	1,82	35	101,8	60,4	6,5	65,1
31. Maluku Utara	1 043	1 139	2,21	36	104,3	59,2	5,3	67,4
32. Papua	2 857	3 091	1,99	10	111,9	48,5	2,7	64,9
33. Papua Barat	765	850	2,65	9	111,5	50,5	3,8	65,2
Maluku dan Papua	6 208	6 737	2,07	14	108,0	53,3	4,2	
Indonesia	238 519	252 165	1,40	132	101,0	48,9	8,2	70,6

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

VI. KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2015

A. Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2015

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 sebesar 6,18 persen meningkat dibanding TPT Februari 2015 (5,81 persen) dan meningkat dibandingkan TPT Agustus 2014 (5,94 persen).

Jumlah penganggur Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang

Tabel 6.1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015
(juta orang)

Jenis kegiatan	2013 ¹⁾	2014 ²⁾		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	120,17	125,32	121,87	128,30	122,38
Bekerja	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82
Penganggur	7,41	7,15	7,24	7,45	7,56
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,77	69,17	66,60	69,50	65,76
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,17	5,70	5,94	5,81	6,18
4. Pekerja tidak penuh	37,74	36,97	35,77	35,68	34,31
Setengah penganggur	11,00	10,57	9,68	10,04	9,74
Paruh waktu	26,74	26,40	26,09	25,64	24,57
Bekerja di bawah 15 jam perminggu	8,85	7,28	6,69	7,54	6,46

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

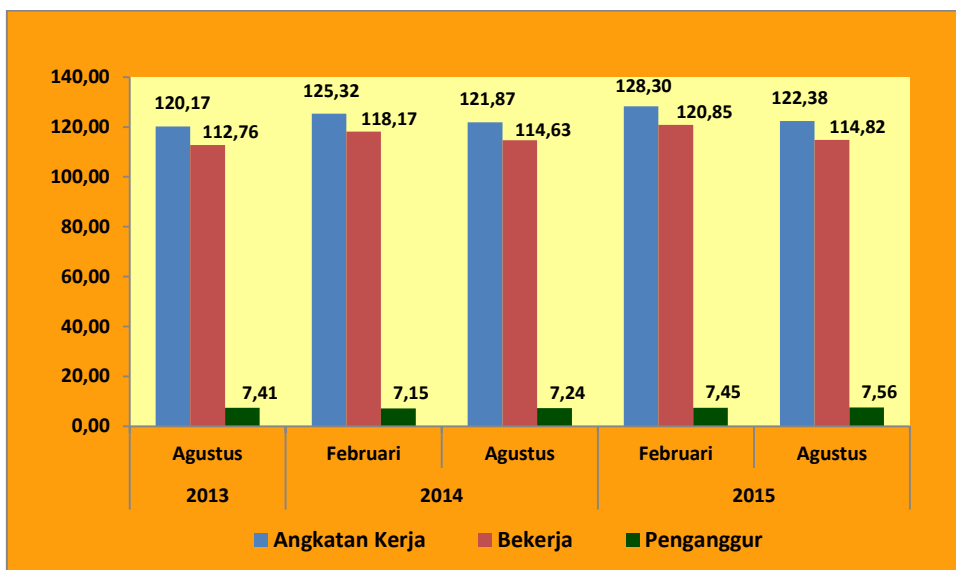
²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Agustus 2015 sebesar 65,76 persen mengalami penurunan sebesar 3,74 persen jika dibandingkan dengan TPAK Februari 2015 sebesar 69,50 persen.
3. Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Agustus 2015 sebanyak 34,31 juta orang (29,88 persen) mengalami penurunan dibanding Februari 2015 sebanyak 35,68 juta orang (29,52 persen).
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Agustus 2015 mencapai 6,46 juta orang (5,63 persen), mengalami penurunan jika dibandingkan Februari 2015 sebanyak 7,54 juta orang (6,24 persen).
5. Pada Agustus 2015 terdapat 9,74 juta orang (8,48 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 122,4 juta orang, berkurang sebanyak 5,9 juta orang dibanding Februari 2015 dan bertambah sebanyak 510 ribu orang dibanding Agustus 2014.

Grafik 6.1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur
2013–2015 (juta orang)



2. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 sebanyak 114,8 juta orang, berkurang 6,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2015 dan bertambah 190 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2014.
3. Jumlah penganggur pada Agustus 2015 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 110 ribu orang dibanding Februari 2015 dan 320 ribu orang jika dibanding Agustus 2014.

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2015 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Masyarakat, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, penduduk bekerja meningkat terutama pada Sektor Konstruksi sebanyak 930 ribu orang (12,77 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 850 ribu orang (3,42 persen), dan Sektor Keuangan sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebanyak 1,2 juta orang (3,13 persen), Sektor Jasa Masyarakat/Perorangan sebanyak 480 ribu orang (2,61 persen), dan Sektor Lainnya sebanyak 120 ribu orang (6,94 persen).

Tabel 6.2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
2013–2015 (juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2013 ¹⁾	2014 ²⁾		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	39,22	40,83	38,97	40,12	37,75
2. Industri	14,96	15,39	15,26	16,38	15,25
3. Konstruksi	6,35	7,21	7,28	7,72	8,21
4. Perdagangan	24,10	25,81	24,83	26,65	25,68
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,10	5,33	5,11	5,19	5,11
6. Keuangan	2,90	3,19	3,03	3,65	3,27
7. Jasa Kemasyarakatan/perorangan	18,45	18,48	18,42	19,41	17,94
8. Lainnya ³⁾	1,68	1,93	1,73	1,73	1,61
Jumlah	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

³⁾ Lapangan pekerjaan utama pada Sektor Lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan dan Sektor Listrik, Gas, dan Air

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

- Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2015 sebanyak 48,5 juta orang (42,24 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 66,3 juta orang (57,76 persen) bekerja pada kegiatan informal.
- Dalam setahun terakhir (Agustus 2014–Agustus 2015), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar berkurang 110 ribu orang sedangkan penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai bertambah sebanyak 2,0 juta orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar 1,9 juta orang dan persentase pekerja formal naik dari 40,62 persen pada Agustus 2014 menjadi 42,24 persen pada Agustus 2015.
- Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Agustus 2014–Agustus 2015), pekerja informal berkurang sebanyak 1,8 juta orang, dan persentase pekerja informal berkurang dari 59,38 persen pada Agustus 2014 menjadi 57,76 persen pada Agustus 2015. Pekerja informal yang tidak mengalami penurunan adalah mereka yang bekerja dengan status pekerja bebas baik di pertanian maupun di nonpertanian.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
2013–2015 (juta orang)

Status Pekerjaan Utama (1)	2013 ¹⁾	2014 ²⁾		2015	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)	Februari (5)	Agustus (6)
1. Berusaha sendiri	19,21	20,32	20,49	21,65	19,53
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	19,34	19,74	19,27	18,80	18,19
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,86	4,14	4,18	4,21	4,07
4. Buruh/Karyawan/pegawai	41,12	43,35	42,38	46,62	44,43
6. Pekerja bebas di pertanian	5,20	4,74	5,09	5,08	5,09
7. Pekerja bebas di nonpertanian	6,06	6,75	6,41	6,80	7,45
8. Pekerja keluarga/tak dibayar	17,97	19,13	16,81	17,69	16,06
Jumlah	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 50,8 juta orang (44,27 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 20,7 juta (18,03 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,6 juta orang mencakup 3,1 juta orang (2,68 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 9,5 juta orang (8,33 persen) berpendidikan Universitas.

Tabel 6.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	2013 ¹⁾	2014 ²⁾		2015	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)	Februari (5)	Agustus (6)
1. SD ke bawah	53,81	55,31	53,96	54,61	50,83
2. Sekolah Menengah Pertama	20,56	21,06	20,35	21,47	20,70
3. Sekolah Menengah Atas	17,88	18,91	18,58	19,81	19,81
4. Sekolah Menengah Kejuruan	9,97	10,91	10,52	11,80	10,84
5. Diploma I/II/III	2,93	3,13	2,96	3,14	3,08
6. Universitas	7,61	8,85	8,26	10,02	9,56
Jumlah	112,76	118,17	114,63	120,85	114,82

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

- Perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 74,3 juta orang (64,83 persen) pada Agustus 2014 menjadi 71,5 juta orang (62,30 persen) pada Agustus 2015. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 11,2 juta orang (9,79 persen) pada Agustus 2014 menjadi 12,6 juta orang (11,01 persen) pada Agustus 2015.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

- Jumlah pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 6,18 persen pada Agustus 2015.
- Pada Agustus 2015, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 12,65 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,74 persen.
- Jika dibandingkan keadaan Agustus 2014, TPT yang mengalami penurunan hanya terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 6.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013 ¹⁾	2014 ²⁾		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	3,44	3,69	3,04	3,61	2,74
2. Sekolah Menengah Pertama	7,59	7,44	7,15	7,14	6,22
3. Sekolah Menengah Atas	9,72	9,10	9,55	8,17	10,32
4. Sekolah Menengah Kejuruan	11,21	7,21	11,24	9,05	12,65
5. Diploma I/II/III	5,95	5,87	6,14	7,49	7,54
6. Universitas	5,39	4,31	5,65	5,34	6,40
Jumlah	6,17	5,70	5,94	5,81	6,18

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Agustus 2015, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Maluku dan Provinsi Aceh masing-masing sebesar 9,93 persen sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebesar 1,99 persen dan 3,35 persen.
2. Dibanding Februari 2015, penurunan terbesar untuk persentase tingkat pengangguran terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat penurunan sebesar 2,85 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat dengan peningkatan sebesar 3,21 persen.

Tabel 6.6
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi
2014–2015

Provinsi	2014 ¹⁾		2015			
	Agustus		Februari		Agustus	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	191,5	9,02	174,7	7,73	216,8	9,93
Sumatera Utara	390,7	6,23	421,2	6,39	428,8	6,71
Sumatera Barat	151,7	6,50	148,7	5,99	161,6	6,89
Riau	176,8	6,56	199,8	6,72	217,1	7,83
Jambi	79,8	5,08	46,2	2,73	70,3	4,34
Sumatera Selatan	192,9	4,96	202,2	5,03	238,9	6,07
Bengkulu	31,3	3,47	31,3	3,21	46,7	4,91
Lampung	184,8	4,79	139,5	3,44	196,9	5,14
Kep. Bangka Belitung	32,7	5,14	23,2	3,35	41,9	6,29
Kepulauan Riau	58,8	6,69	81,0	9,05	55,3	6,20
DKI Jakarta	429,1	8,47	463,9	8,36	368,2	7,23
Jawa Barat	1 775,2	8,45	1 875,9	8,40	1 794,9	8,72
Jawa Tengah	996,3	5,68	970,6	5,31	863,8	4,99
DI Yogyakarta	67,4	3,33	85,5	4,07	80,2	4,07
Jawa Timur	843,5	4,19	892,0	4,31	906,9	4,47
Banten	484,1	9,07	488,9	8,58	509,4	9,55
Bali	44,1	1,90	33,6	1,37	47,2	1,99
Nusa Tenggara Barat	127,7	5,75	120,1	4,98	128,4	5,69
Nusa Tenggara Timur	73,2	3,26	75,1	3,12	88,4	3,83
Kalimantan Barat	93,7	4,04	113,2	4,78	121,3	5,15
Kalimantan Tengah	38,7	3,24	40,4	3,14	57,8	4,54
Kalimantan Selatan	73,8	3,80	100,0	4,83	97,7	4,92
Kalimantan Timur	133,7	7,38	118,2	7,17	115,5	7,50
Kalimantan Utara	-	-	16,6	5,79	16,1	5,68
Sulawesi Utara	80,0	7,54	102,6	8,69	99,2	9,03
Sulawesi Tengah	49,4	3,68	42,6	2,99	56,8	4,10
Sulawesi Selatan	188,8	5,08	218,3	5,81	220,6	5,95
Sulawesi Tenggara	48,1	4,43	42,3	3,62	63,1	5,55
Gorontalo	20,9	4,18	16,3	3,06	24,1	4,65
Sulawesi Barat	12,6	2,08	11,7	1,81	20,6	3,35
Maluku	70,7	10,51	47,8	6,72	72,2	9,93
Maluku Utara	25,5	5,29	28,8	5,56	31,1	6,05
Papua Barat	20,0	5,02	18,8	4,61	33,4	8,08
Papua	57,7	3,44	63,6	3,72	69,5	3,99
Indonesia	7 244,9	5,94	7 454,8	5,81	7 560,8	6,18

¹⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

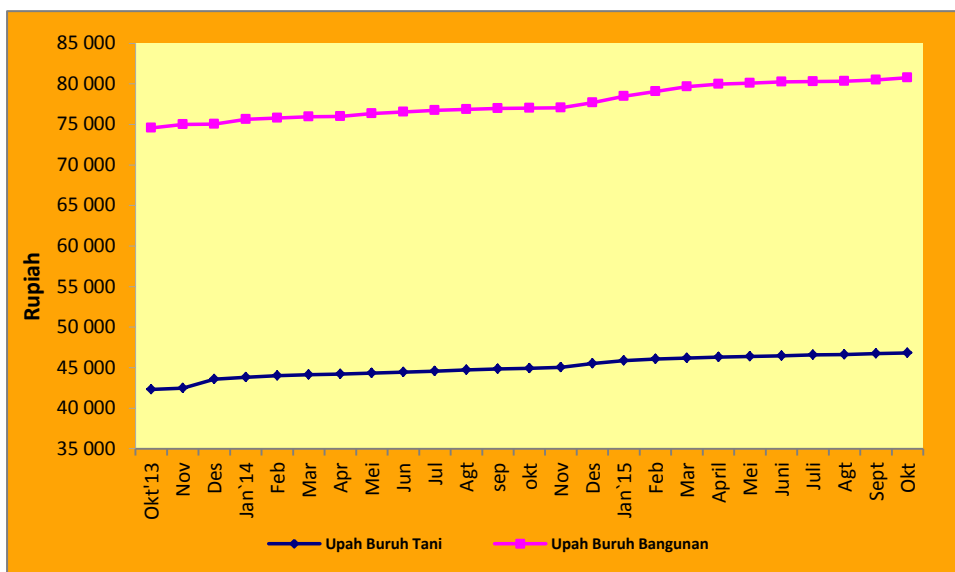
VII. UPAH BURUH OKTOBER 2015

1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Oktober 2015 naik sebesar 0,13 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp46.739,00 menjadi Rp46.800,00. Secara riil naik sebesar 0,17 persen, yaitu dari Rp37.855,00 menjadi Rp37.918,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Oktober 2015 sebesar Rp46.800,00, naik 0,13 persen

Grafik 7.1
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan
Oktober 2013–Oktober 2015



2. Upah Buruh Bangunan

Pada Oktober 2015, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,31 persen dibanding upah nominal September 2015, yaitu dari Rp80.494,00 menjadi Rp80.744,00, sedangkan upah riil naik sebesar 0,39 persen, yaitu dari Rp66.158,00 menjadi Rp66.418,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Oktober 2015 sebesar Rp80.744,00, naik 0,31 persen

Tabel 7.1
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)
Oktober 2013–Oktober 2015

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil ¹⁾	Nominal	Riil ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Oktober 2013	42 322	27 002	74 569	51 120
November	42 480	27 065	75 006	51 360
Desember	43 562	39 618	75 055	68 344
Januari 2014	43 808	39 383	75 629	68 140
Februari	43 992	39 372	75 772	68 091
Maret	44 125	39 416	75 961	68 206
April	44 212	39 514	75 987	68 242
Mei	44 314	39 516	76 326	68 436
Juni	44 430	39 330	76 535	68 328
Juli	44 569	39 134	76 756	67 896
Agustus	44 717	39 119	76 854	67 665
September	44 833	39 045	76 991	67 601
Oktober	44 924	38 955	77 011	67 305
November	45 026	38 466	77 056	66 348
Desember	45 491	37 839	77 682	65 279
Januari 2015	45 846	38 144	78 484	66 114
Februari	46 059	38 605	79 083	66 861
Maret	46 180	38 522	79 657	67 233
April	46 306	38 546	79 970	67 253
Mei	46 386	38 383	80 087	67 019
Juni	46 458	38 130	80 237	66 786
Juli	46 572	37 887	80 293	66 216
Agustus	46 629	37 757	80 342	66 000
September	46 739	37 855	80 494	66 158
Oktober	46 800	37 918	80 744	66 418

Catatan: ¹⁾ Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

²⁾ Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

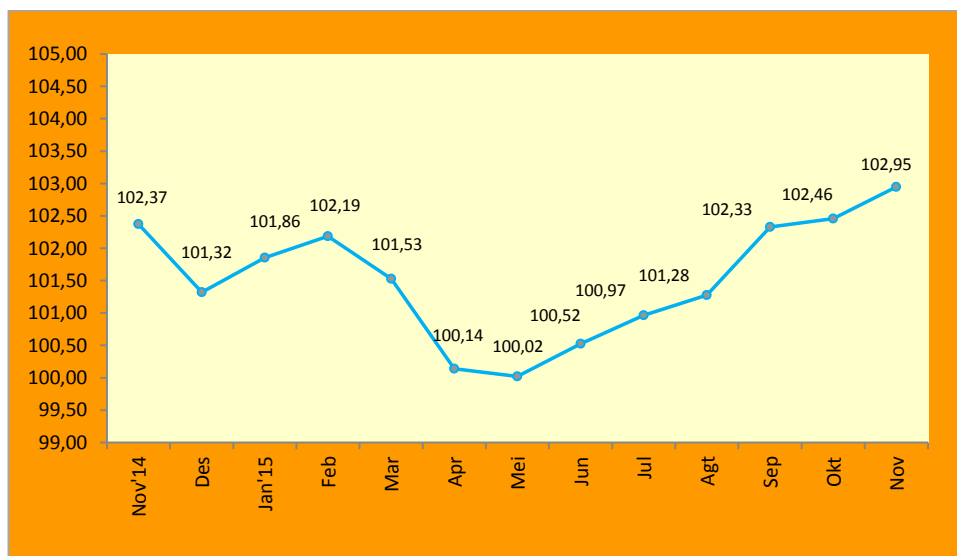
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN NOVEMBER 2015

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

- NTP November 2015 tercatat 102,95 atau naik sebesar 0,48 persen dibanding NTP Oktober 2015 sebesar 102,46. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di tiga subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 1,39 persen, Tanaman Hortikultura 0,47 persen, dan Tanaman Perkebunan Rakyat 0,49 persen, sebaliknya Subsektor Peternakan dan Perikanan turun masing-masing sebesar 0,63 persen dan 0,39 persen.

NTP November 2015 naik sebesar 0,48 persen

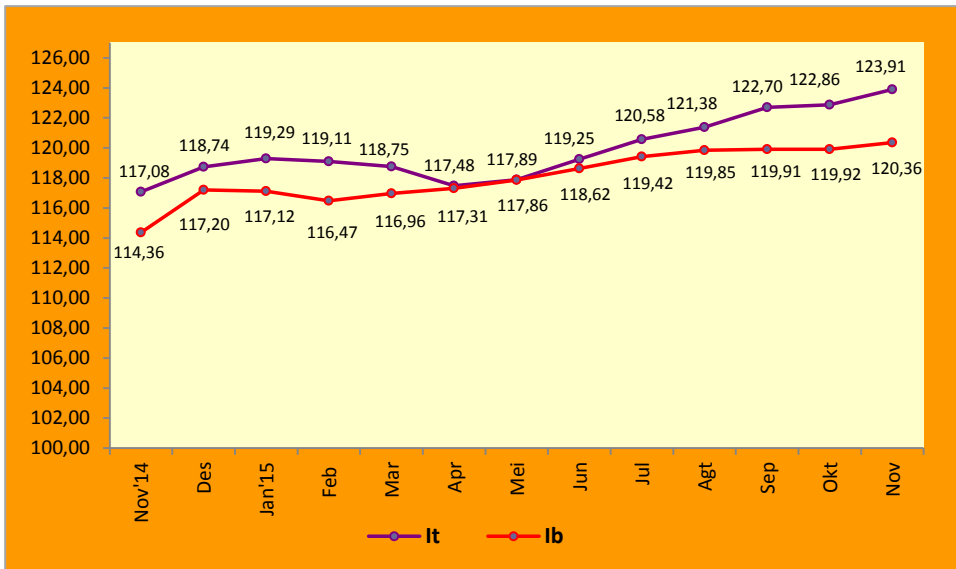
Grafik 8.1
Nilai Tukar Petani (NTP), November 2014–November 2015 (2012=100)



- Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada November 2015 naik 0,85 persen bila dibanding It pada Oktober 2015, yaitu dari 122,86 menjadi 123,91. Kenaikan indeks tersebut disebabkan naiknya It di tiga subsektor, yaitu Tanaman Pangan (1,78 persen), Tanaman Hortikultura (0,84 persen), dan Tanaman Perkebunan Rakyat (0,87 persen). Sebaliknya, Subsektor Peternakan dan Perikanan turun masing-masing sebesar 0,28 persen dan 0,08 persen.

- Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada November 2015 naik sebesar 0,37 persen dibanding Ib Oktober 2015. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga dan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal masing-masing sebesar 0,43 persen dan 0,21 persen.

Grafik 8.2
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
November 2014–November 2015 (2012=100)



- NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada November 2015 naik sebesar 1,39 persen dibanding NTPP Oktober 2015. Kenaikan NTPP disebabkan It Tanaman Pangan naik (1,78 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Pangan (0,38 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) naik sebesar 0,47 persen. Hal ini disebabkan It Tanaman Hortikultura naik (0,84 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura (0,37 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) naik (0,49 persen). Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Perkebunan rakyat naik (0,87 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Perkebunan Rakyat (0,38 persen). NTP Peternakan (NTPT) turun 0,63 persen disebabkan It Peternakan turun (0,28 persen), sebaliknya Ib Peternakan naik (0,35 persen). NTP Perikanan (NTNP) turun 0,39 persen disebabkan It Perikanan turun (0,08 persen), sebaliknya Ib Perikanan naik (0,31 persen).

Tabel 8.1
Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)

Subsektor	Oktober 2015	November 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan/Nasional			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,46	102,95	0,48
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	122,86	123,91	0,85
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	119,92	120,36	0,37
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,42	123,95	0,43
- Indeks BPPBM	113,04	113,28	0,21
Gabungan/Nasional tanpa Perikanan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,42	102,94	0,51
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	122,80	123,89	0,88
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	119,90	120,35	0,37
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,41	123,94	0,43
- Indeks BPPBM	112,97	113,22	0,22
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	102,69	104,12	1,39
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	125,14	127,37	1,78
- Padi	124,28	126,30	1,62
- Palawija	127,21	130,01	2,20
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	121,86	122,32	0,38
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,65	124,17	0,42
- Indeks BPPBM	116,20	116,49	0,25
2. Tanaman Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	101,96	102,44	0,47
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	123,21	124,24	0,84
- Sayur-sayuran	120,01	122,02	1,67
- Buah-buahan	126,03	126,18	0,12
- Tanaman Obat	118,97	119,44	0,40
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	120,84	121,28	0,37
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,46	123,96	0,41
- Indeks BPPBM	112,87	113,10	0,20
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	96,39	96,86	0,49
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	115,96	116,97	0,87
- Tanaman Perkebunan Rakyat	115,96	116,97	0,87
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	120,30	120,76	0,38
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	122,89	123,44	0,45
- Indeks BPPBM	112,29	112,45	0,15

Subsektor	Oktober 2015	November 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)	108,68	107,99	-0,63
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	126,16	125,81	-0,28
- Ternak Besar	128,39	127,82	-0,45
- Ternak Kecil	124,53	124,04	-0,39
- Unggas	122,59	122,71	0,10
- Hasil Ternak	119,47	119,58	0,09
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	116,09	116,50	0,35
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,57	124,11	0,43
- Indeks BPPBM	109,42	109,70	0,26
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,80	102,40	-0,39
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	123,50	123,39	-0,08
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	120,14	120,50	0,31
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,69	124,21	0,42
- Indeks BPPBM	114,11	114,23	0,10
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,56	106,12	-0,41
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	129,08	128,93	-0,11
- Penangkapan Perairan Umum	128,18	128,49	0,24
- Penangkapan Laut	129,08	128,90	-0,14
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	121,14	121,50	0,30
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,11	123,59	0,39
- Indeks BPPBM	118,06	118,25	0,16
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	100,09	99,71	-0,38
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	119,49	119,41	-0,06
- Budidaya Air Tawar	118,45	118,48	0,03
- Budidaya Laut	114,99	114,85	-0,12
- Budidaya Air Payau	119,91	119,57	-0,28
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	119,38	119,76	0,32
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	124,11	124,67	0,45
- Indeks BPPBM	111,17	111,24	0,06

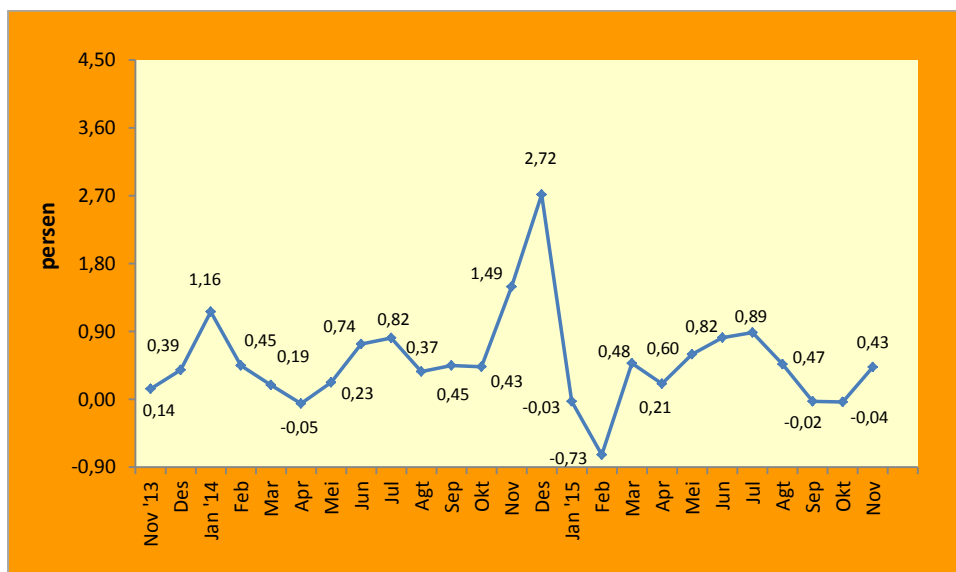
BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

B. Inflasi Perdesaan

1. Pada November 2015 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,43 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 123,95. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 30 provinsi dan deflasi perdesaan di 3 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,89 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,01 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,16 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,04 persen.

**Pada November 2015
terjadi inflasi perdesaan
sebesar 0,43 persen**

Grafik 8.3
Inflasi Perdesaan, November 2013–November 2015



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada November 2015, terjadi kenaikan indeks harga di semua kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan sebesar 0,62 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 0,47 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,28 persen; Sandang 0,18 persen; Kesehatan 0,21 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,18 persen, serta Transportasi dan Komunikasi sebesar 0,13 persen.
3. Inflasi perdesaan November 2015 sebesar 0,43 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas beras, cabai rawit, rokok kretek filter, rokok kretek, dan kubis/kol.
4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender (November 2015 terhadap Desember 2014) sebesar 3,10 persen dan tingkat inflasi perdesaan year-on-year (November 2015 terhadap November 2014) adalah sebesar 5,90 persen.

Tabel 8.2
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran
November 2013–November 2015

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
November 2013	0,02	0,32	0,31	0,18	0,29	0,08	0,16	0,14
Desember	0,52	0,38	0,33	0,32	0,25	0,04	0,14	0,39
Januari 2014	1,86	0,74	1,10	0,52	0,52	0,25	0,39	1,16
Februari	0,53	0,43	0,51	0,38	0,42	0,22	0,30	0,45
Maret	0,02	0,39	0,35	0,39	0,39	0,21	0,22	0,19
April	-0,48	0,27	0,28	0,21	0,36	0,11	0,09	-0,05
Mei	0,20	0,30	0,31	0,23	0,30	0,11	0,12	0,23
Juni	1,32	0,39	0,33	0,43	0,28	0,19	0,20	0,74
Juli	1,24	0,45	0,41	1,72	0,31	0,81	0,18	0,82
Agustus	0,48	0,36	0,26	0,17	0,33	0,27	0,22	0,37
September	0,48	0,51	0,61	0,08	0,38	0,22	0,33	0,45
Oktober	0,59	0,32	0,47	0,22	0,34	0,25	0,24	0,43
November	1,79	0,47	0,61	0,37	0,59	0,20	4,39	1,49
Desember	3,29	1,10	1,32	1,08	0,80	0,27	7,07	2,72
Januari 2015	0,52	0,88	1,18	0,70	0,83	0,42	-5,22	-0,03
Februari	-1,41	0,44	0,40	0,35	0,48	0,21	-2,68	-0,73
Maret	0,33	0,48	0,46	0,25	0,42	0,13	1,31	0,48
April	-0,68	0,60	0,52	0,38	0,43	0,18	2,24	0,21
Mei	0,97	0,46	0,31	0,38	0,26	0,08	0,30	0,60
Juni	1,35	0,70	0,36	0,53	0,23	0,30	0,15	0,82
Juli	1,52	0,38	0,28	1,65	0,31	0,56	0,24	0,89
Agustus	0,83	0,29	0,15	0,12	0,21	0,42	0,11	0,47
September	-0,40	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,17	-0,02
Oktober	-0,43	0,44	0,14	0,15	0,23	0,20	0,09	-0,04
November	0,62	0,47	0,28	0,18	0,21	0,18	0,13	0,43

Tabel 8.3
Tingkat Inflasi Perdesaan November 2015, Tahun Kalender 2015, dan Year on Year 2015
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan November 2015	Tingkat Inflasi Perdesaan 2015	
	November 2014	Desember 2014	November 2015		Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	117,05	120,22	123,95	0,43	3,10	5,90
1. Bahan Makanan	122,86	126,90	130,98	0,62	3,22	6,61
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	112,06	113,29	119,55	0,47	5,52	6,68
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	112,09	113,57	118,60	0,28	4,42	5,80
4. Sandang	111,80	113,01	118,70	0,18	5,04	6,17
5. Kesehatan	109,71	110,60	114,96	0,21	3,95	4,78
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	109,16	109,46	112,71	0,18	2,97	3,25
7. Transportasi dan Komunikasi	119,91	128,39	124,12	0,13	-3,33	3,51

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

1. Pada November 2015 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,63 persen. Hal ini karena terjadi kenaikan It (0,85 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPBBM (0,21 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya tiga subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (1,53 persen), Tanaman Hortikultura (0,64 persen), dan Tanaman Perkebunan Rakyat (0,72 persen). Sebaliknya, NTUP Subsektor Peternakan dan Perikanan turun masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,18 persen.
2. Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 27 provinsi mengalami kenaikan dan 6 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTUP tertinggi pada November 2015 terjadi di Provinsi Aceh sebesar 1,97 persen, sebaliknya penurunan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,83 persen.

Tabel 8.4
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya,
November 2015 (2012=100)

Subsektor	Oktober 2015	November 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	107,69	109,34	1,53
2. Tanaman Hortikultura	109,16	109,85	0,64
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	103,27	104,02	0,72
4. Peternakan	115,31	114,69	-0,54
5. Perikanan	108,22	108,03	-0,18
a. Tangkap	109,33	109,04	-0,27
b. Budidaya	107,48	107,35	-0,12
Nasional	108,69	109,38	0,63

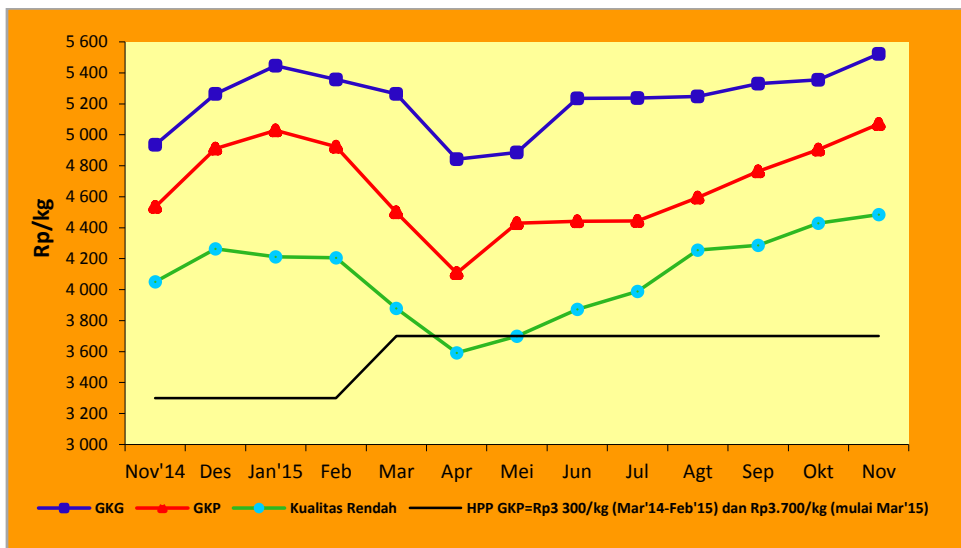
IX. HARGA PANGAN NOVEMBER 2015

A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama November 2015, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di petani naik 3,38 persen menjadi Rp5.070,45 per kg dan di penggilingan naik 3,36 persen menjadi Rp5.151,45 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKP di petani November 2015 sebesar Rp5.070,45 per kg naik 3,38 persen

Grafik 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas November 2014–November 2015



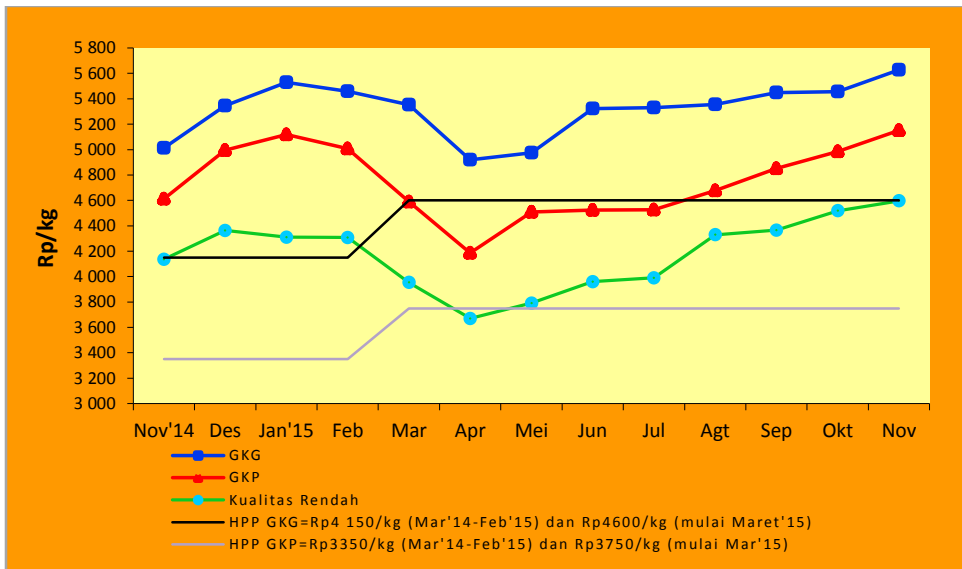
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani senilai Rp8.200,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp8.250,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp3.700,00 per kg dan Rp3.812,50 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan penggilingan berasal dari GKP varietas Siam Mayang yang terjadi di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani berasal dari gabah kualitas Rendah varietas Ciharang yang terjadi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), sedangkan di tingkat penggilingan berasal dari GKP varietas Lokal yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir (Riau).

Tabel 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, November 2014–November 2015

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Nov	18,82	4 535,02	3,90	12,78	4 936,49	3,21	26,33	4 050,71	4,47
Des	18,03	4 910,51	8,28	12,43	5 264,16	6,64	25,31	4 264,54	5,28
2015 Jan	17,86	5 027,89	2,39	12,48	5 447,14	3,48	26,03	4 212,30	-1,22
Feb	18,35	4 922,52	-2,10	12,60	5 357,00	-1,65	27,20	4 206,68	-0,13
Mar	19,66	4 499,83	-8,59	12,67	5 264,01	-1,74	26,07	3 878,92	-7,79
Apr	19,32	4 106,73	-8,74	12,61	4 842,69	-8,00	26,35	3 592,24	-7,39
Mei	18,03	4 428,41	7,83	12,63	4 885,75	0,89	25,56	3 698,64	2,96
Jun	18,18	4 441,70	0,30	12,69	5 234,51	7,14	25,09	3 872,75	4,71
Jul	18,53	4 443,74	0,05	12,70	5 237,80	0,06	25,23	3 902,23	0,76
Agt	18,54	4 594,72	3,40	12,20	5 247,92	0,19	24,91	4 255,91	9,06
Sep	18,47	4 764,68	3,70	12,56	5 330,12	1,57	25,22	4 287,27	0,74
Okt	18,22	4 904,51	2,93	12,54	5 355,76	0,48	25,13	4 428,25	3,29
Nov	18,36	5 070,45	3,38	12,33	5 523,57	3,13	28,57	4 484,73	1,28
Perubahan (%) Nov'15 thd Nov'14			11,81			11,89			10,71

- Rata-rata harga GKG di petani selama November 2015 naik 3,13 persen menjadi Rp5.523,57 per kg, sedangkan di penggilingan naik 3,15 persen menjadi Rp5.628,51 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Demikian pula harga gabah kualitas Rendah di petani dan penggilingan mengalami kenaikan masing-masing 1,28 persen menjadi Rp4.484,73 per kg dan 1,75 persen menjadi Rp4.596,52 per kg.
- Selama Periode November 2014–November 2015 di tingkat petani, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP, GKG, dan gabah kualitas Rendah masing-masing Rp5.070,45 per kg, Rp5.523,57 per kg, dan Rp4.484,73 per kg terjadi pada November 2015. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas Rendah masing-masing Rp4.106,73 per kg, Rp4.842,69 per kg, dan Rp3.592,24 per kg terjadi pada April 2015.

Grafik 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas
November 2014–November 2015



5. Pada periode November 2014–November 2015, di tingkat penggilingan rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP, GKG, dan kualitas Rendah masing-masing Rp5.151,45 per kg, Rp5.628,51 per kg, dan Rp4.596,52 per kg terjadi pada November 2015. Sedangkan, rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas Rendah masing-masing Rp4.187,27 per kg, Rp4.920,26 per kg, dan Rp3.670,00 per kg terjadi pada April 2015.
6. Dibandingkan November 2014, rata-rata harga GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah di tingkat petani pada November 2015 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,81 persen, 11,89 persen, dan 10,71 persen. Di tingkat penggilingan rata-rata harga GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah pada November 2015 juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,70 persen, 12,26 persen, dan 11,14 persen dibandingkan November 2014.
7. Berdasarkan 1.201 observasi pada transaksi penjualan gabah di 21 provinsi selama November 2015, masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 909 observasi (75,69 persen), GKG sebanyak 180 observasi (14,99 persen), dan gabah kualitas Rendah sebanyak 112 observasi (9,32 persen). Dari sejumlah observasi tersebut, tidak terdapat kasus harga GKG dan GKP di bawah HPP di tingkat Petani dan Penggilingan.

Tabel 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, November 2014–November 2015

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Nov	18,82	4 611,82	3,73	12,78	5 013,64	3,22	26,33	4 135,83	4,35
Des	18,03	4 995,31	8,32	12,43	5 344,22	6,59	25,31	4 362,54	5,48
2015 Jan	17,86	5 118,31	2,46	12,48	5 528,47	3,45	26,03	4 309,61	-1,21
Feb	18,35	5 007,01	-2,17	12,60	5 458,93	-1,26	27,20	4 307,31	-0,05
Mar	19,66	4 590,26	-8,32	12,67	5 352,36	-1,95	26,07	3 953,42	-8,22
Apr	19,32	4 187,27	-8,78	12,61	4 920,26	-8,07	26,35	3 670,00	-7,17
Mei	18,03	4 509,17	7,69	12,63	4 975,63	1,13	25,56	3 791,45	3,31
Jun	18,18	4 524,76	0,35	12,69	5 322,26	6,97	25,09	3 959,60	4,43
Jul	18,53	4 525,24	0,01	12,70	5 331,40	0,17	25,23	3 990,02	0,77
Agt	18,54	4 677,06	3,35	12,20	5 355,69	0,46	24,91	4 328,85	8,49
Sep	18,47	4 851,56	3,73	12,56	5 449,82	1,76	25,22	4 365,12	0,84
Okt	18,22	4 984,06	2,73	12,54	5 456,54	0,12	25,13	4 517,55	3,49
Nov	18,36	5 151,45	3,36	12,33	5 628,51	3,15	28,57	4 596,52	1,75
Perubahan (%) Nov'15 thd Nov'14			11,70			12,26			11,14

8. Pada November 2015 rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan sebesar Rp9.564,26 per kg naik sebesar 1,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan sebesar Rp9.271,85 per kg naik sebesar 3,47 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan sebesar Rp9.031,52 per kg naik sebesar 1,29 persen.

Pada November 2015 rata-rata harga beras Medium di penggilingan sebesar Rp9.271,85 per kg, naik 3,47 persen

9. Dibandingkan dengan November 2014, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada bulan November 2015 untuk kualitas premium naik 11,80 persen, kualitas medium naik 10,74 persen dan kualitas rendah naik 13,43 persen.

Tabel 9.3
Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (*Broken*), November 2014–November 2015

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah		
	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Nov	8 555,14	1,88	7,16	8 372,84	3,03	15,20	7 962,07	3,50	23,12
Des	9 018,39	5,41	7,21	8 992,57	7,40	15,17	8 412,28	5,65	23,23
2015 Jan	9 242,85	2,49	7,14	9 222,01	2,55	15,46	8 765,83	4,20	23,44
Feb	9 358,23	1,25	7,11	9 252,01	0,33	15,70	8 838,16	0,83	23,60
Mar	9 459,49	1,08	7,12	9 298,25	0,50	15,55	8 855,47	0,20	23,65
Apr	8 794,25	- 7,03	7,08	8 597,64	- 7,53	15,57	8 250,71	- 6,83	23,38
Mei	8 709,81	- 0,96	7,22	8 520,39	- 0,90	15,62	8 061,39	- 2,29	23,25
Jun	8 915,36	2,36	7,55	8 605,95	1,00	15,48	8 120,59	0,73	24,03
Jul	8 945,11	0,33	7,28	8 648,44	0,49	16,00	8 307,52	2,30	23,34
Agt	9 126,78	2,03	7,51	8 741,08	1,07	15,56	8 724,84	5,02	23,55
Sep	9 444,06	3,48	7,48	8 939,61	2,27	15,32	8 906,13	2,08	23,37
Okt	9 455,01	0,12	7,34	8 960,96	0,24	15,56	8 916,92	0,12	22,91
Nov	9 564,26	1,16	7,46	9 271,85	3,47	15,29	9 031,52	1,29	22,85
Perubahan (%)									
Nov'15 thd Nov'14		11,80		10,74		13,43			

Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%
 Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1% - 20%
 Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1% - 25%

B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

- Secara nasional, rata-rata harga beras pada November 2015 naik 0,55 persen dibanding Oktober 2015. Dibandingkan November 2014, harga beras naik 12,39 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 4,89 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami kenaikan nilai riil sebesar 7,50 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Batam (11 persen) dan Meulaboh dan Bukittinggi (masing-masing 8 persen).

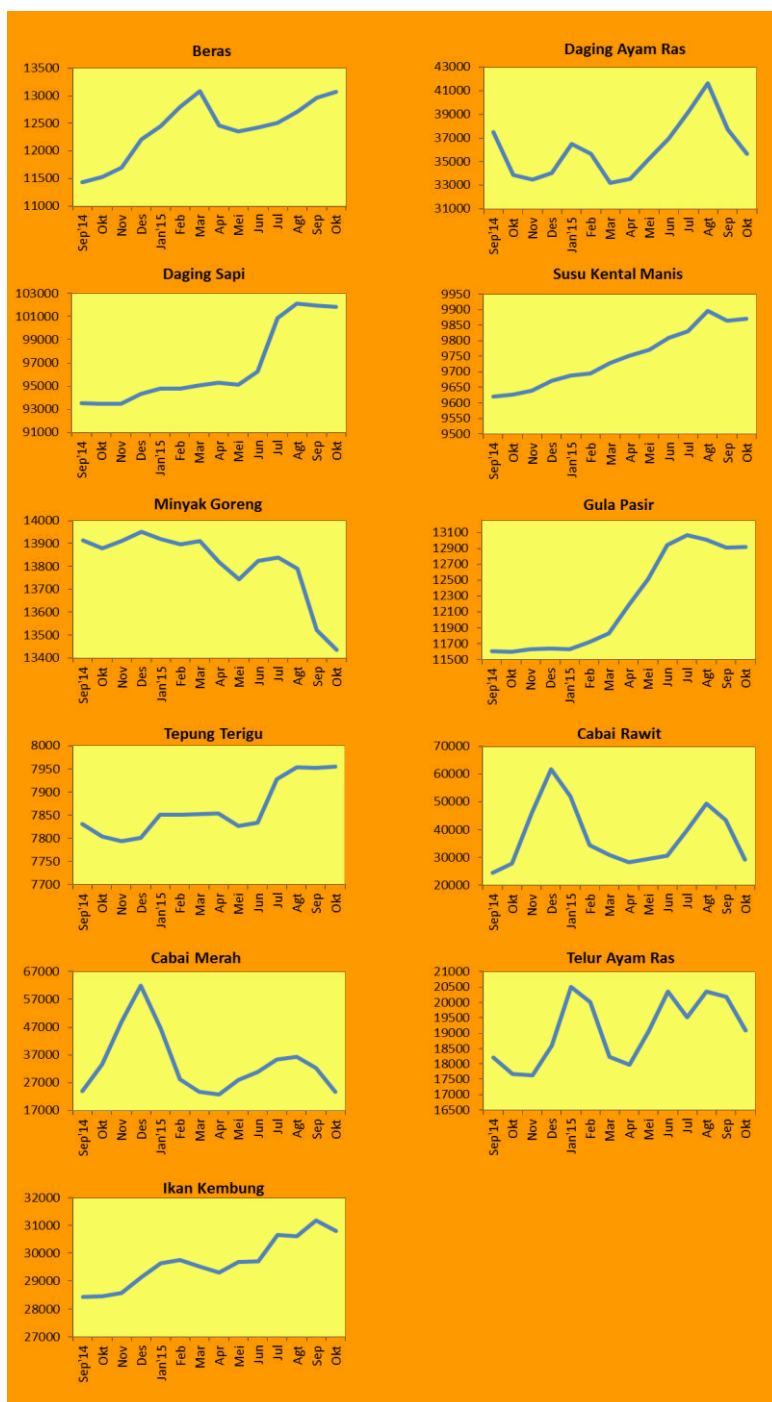
Rata-rata harga beras November 2015 sebesar Rp13.139,00 per kg, naik 0,55 persen

2. Harga daging ayam ras naik 1,69 persen dibanding Oktober 2015 atau naik 8,43 persen dibanding November 2014. Kenaikan tertinggi terjadi di Tanjung (21 persen) dan Palangka Raya (20 persen). Harga telur ayam ras naik 1,57 persen dibanding Oktober 2015 atau naik 9,88 persen dibanding November 2014. Kenaikan tertinggi terjadi di Banda Aceh (7 persen) dan Jember, Depok dan Kediri (masing-masing 6 persen). Harga cabai merah turun 3,00 persen dibanding Oktober 2015 atau turun 52,80 persen dibanding November 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Gorontalo (25 persen) dan Surabaya (24 persen). Harga cabai rawit turun 2,79 persen dibanding Oktober 2015 atau turun 38,13 persen dibanding November 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Manokwari (37 persen) dan Surabaya (35 persen). Harga minyak goreng turun 1,00 persen dibanding Oktober 2015 atau turun 4,38 persen dibanding November 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Surabaya (6 persen) dan Semarang (5 persen).
3. Komoditas lain seperti daging sapi, susu kental manis, gula pasir, tepung terigu, dan ikan kembung perubahannya relatif rendah.

Tabel 9.4
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
November 2014–November 2015 (rupiah)

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Susu		Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
			Daging Sapi (kg)	Kental Manis (385 gram)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
November'14	11 691	33 474	93 473	9 639	13 911	11 630	7 794	46 011	48 785	17 636	28 566
Desember	12 210	34 043	94 324	9 670	13 950	11 637	7 800	61 843	61 874	18 599	29 137
Januari'15	12 444	36 515	94 758	9 689	13 919	11 632	7 850	52 134	46 573	20 496	29 650
Februari	12 802	35 682	94 777	9 694	13 895	11 722	7 850	34 539	28 102	20 016	29 760
Maret	13 089	33 231	95 033	9 728	13 910	11 831	7 852	30 947	23 738	18 225	29 510
April	12 458	33 570	95 299	9 752	13 820	12 188	7 854	28 202	22 850	17 964	29 312
Mei	12 348	35 279	95 137	9 770	13 743	12 509	7 826	29 432	27 927	19 065	29 687
Juni	12 425	36 944	96 279	9 809	13 824	12 941	7 834	30 698	30 884	20 350	29 708
Juli	12 509	39 231	100 862	9 831	13 838	13 065	7 927	39 957	35 319	19 512	30 671
Agustus	12 709	41 616	102 143	9 896	13 790	13 013	7 953	49 551	36 333	20 345	30 610
September	12 968	37 742	101 959	9 865	13 521	12 906	7 951	43 471	32 344	20 194	31 195
Oktober	13 067	35 693	101 826	9 870	13 436	12 918	7 955	29 282	23 740	19 079	30 805
November	13 139	36 296	101 409	9 893	13 302	13 308	7 938	28 465	23 028	19 379	30 642
November'15 thd											
September'15 thd	0,55	1,69	-0,41	0,23	-1,00	0,70	-0,21	-2,79	-3,00	1,57	-0,53
November'15 thd											
November'14 (dalam persen)	12,39	8,43	8,49	2,64	-4,38	11,85	1,85	-38,13	-52,80	9,88	7,27

Grafik 9.3
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
September 2014–Oktober 2015 (rupiah)



X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN III-2015 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR NOVEMBER 2015

A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan dari Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan pada triwulan III-2015 sebesar 127,71. Pada triwulan III-2015, IHP gabungan tersebut mengalami

Pada triwulan III-2015 terjadi inflasi harga produsen sebesar 0,28 persen

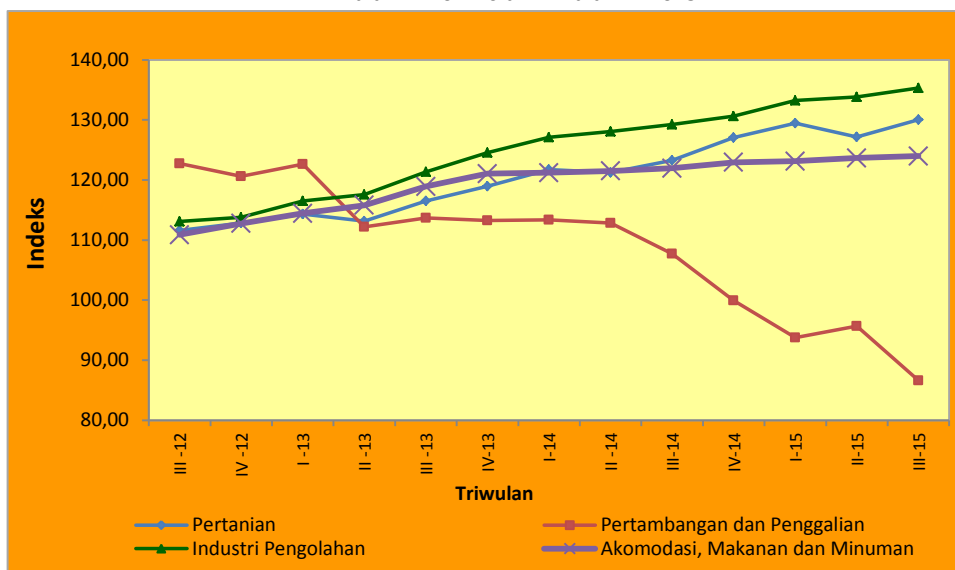
kenaikan sebesar 0,28 persen dibandingkan IHP triwulan II-2015 sebesar 127,35 (*q-to-q*). IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan naik masing-masing sebesar 2,24 persen dan 1,12 persen, sebaliknya IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 9,47 persen. Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan III-2015 sebesar 123,99 naik 0,27 persen dibandingkan IHP triwulan II-2015 sebesar 123,65 (*q-to-q*). Perubahan IHP triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) sebesar 2,06 persen, yaitu dari 125,13 pada triwulan III-2014 menjadi 127,71 pada triwulan III-2015. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 5,47 persen dan 4,72 persen. Sebaliknya Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami deflasi (*y-on-y*) sebesar 19,57 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 1,67 persen, yaitu dari 121,95 pada triwulan III-2014 menjadi 123,99 pada triwulan III-2015.

Tabel 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor
Triwulan III-2015

Sektor	IHP Triw III- 2014	IHP Triw II- 2015	IHP Triw III- 2015	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw II- 2015	Triw III- 2015	Triw III- 2014	Triw III- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gabungan (1+2+3)	125,13	127,35	127,71	0,15	0,28	4,85	2,06
1. Pertanian	123,28	127,17	130,02	-1,75	2,24	5,82	5,47
2. Pertambangan dan Penggalian	107,69	95,68	86,62	2,04	-9,47	-5,27	-19,57
3. Industri Pengolahan	129,22	133,82	135,32	0,44	1,12	6,48	4,72
4. Akomodasi, Makanan dan Minuman	122,94	123,65	123,99	0,42	0,27	2,55	1,67

Keterangan: 1). Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan t-1
2). Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t-2015 terhadap Triwulan t-2014

Grafik 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor
Triwulan III-2012 s.d. Triwulan III-2015



1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan III-2015 naik 2,24 persen (*q-to-q*), yaitu dari 127,17 pada triwulan II-2015 menjadi 130,02 pada triwulan III-2015. Tiga subsektor pada Sektor Pertanian mengalami inflasi tinggi, diantaranya adalah Subsektor Tanaman Bahan Makanan (3,73 persen), Subsektor Peternakan (3,02 persen), dan Subsektor Perikanan (1,90 persen). Sedangkan Subsektor Perkebunan mengalami deflasi sebesar 1,54 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan III-2014, Sektor Pertanian pada triwulan III-2015 mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 5,47 persen, yaitu dari 123,28 pada triwulan III-2014 menjadi 130,02 pada triwulan III-2015. Subsektor Kehutanan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 8,65 persen, diikuti oleh Subsektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 7,64 persen dan Subsektor Peternakan sebesar 6,18 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III-2015 sebesar 86,62 mengalami penurunan sebesar 9,47 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya sebesar 95,68 (*q-to-q*). Deflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh turunnya IHP pada Subsektor Pertambangan sebesar 12,22 persen. Sedangkan Subsektor Penggalian naik sebesar 0,24 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) mengalami penurunan sebesar 19,57 persen, yaitu dari 107,69 pada triwulan III-2014 menjadi 86,62 pada triwulan III-2015. Deflasi harga produsen (*y-on-y*) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh turunnya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 25,50 persen.

3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan III-2015, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 133,82 pada triwulan II-2015 menjadi 135,32 pada triwulan III-2015 (*q-to-q*). Tiga subsektor pada Sektor Industri Pengolahan yang mengalami inflasi tinggi adalah Subsektor Industri Pupuk (4,99 persen); Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak (4,36 persen); dan Subsektor Industri Pemintalan dan Pertenunan Tekstil (1,87 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi antara lain Subsektor Industri Logam Dasar (2,33 persen); Subsektor Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetak (1,27 persen); dan Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas (1,04 persen). Dibandingkan triwulan III-2014, IHP Sektor Industri

Pengolahan pada triwulan III-2015 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (4,72 persen) dari 129,22 menjadi 135,32. Semua Subsektor mengalami kenaikan kecuali Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas mengalami penurunan sebesar 1,27 persen. Penyebab kenaikan IHP terutama terjadi pada Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung, dan Pakan Ternak (11,52 persen); Subsektor Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia, dan Barang dari Bahan Kimia (7,33 persen); dan Subsektor Industri Minuman dan Rokok (6,27 persen).

4. Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan III-2015 sebesar 123,99 mengalami kenaikan 0,27 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 123,65 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makanan dan Minuman masing-masing sebesar 0,40 persen dan 0,25 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (*y-on-y*) naik sebesar 1,67 persen, yaitu dari 121,95 menjadi 123,99. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Makanan dan Minuman dan Subsektor Akomodasi masing-masing sebesar 1,79 persen dan 0,93 persen.

Tabel 10.2
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor

Triwulan III-2015 Sektor/Subsektor	IHP Triw III- 2014	IHP Triw II- 2015	IHP Triw III- 2015	Inflasi Harga Produsen ($q-t_0-q$) ¹ (%)		Inflasi Harga Produsen ($y-on-y$) ² (%)	
				Triw II- 2015	Triw III- 2015	Triw III- 2014	Triw III- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	123,28	127,17	130,02	-1,75	2,24	5,82	5,47
1. Tanaman Bahan Makanan	127,49	132,29	137,23	-4,56	3,73	5,24	7,64
2. Perkebunan	119,66	119,99	118,14	0,29	-1,54	7,84	-1,27
3. Peternakan	118,66	122,29	125,99	0,73	3,02	4,57	6,18
4. Perikanan	119,83	124,14	126,50	0,31	1,90	6,20	5,56
5. Kehutanan	128,90	138,35	140,06	2,39	1,23	6,17	8,65
Pertambangan dan Penggalian	107,69	95,68	86,62	2,04	-9,47	-5,27	-19,57
1. Pertambangan	104,29	88,51	77,69	2,62	-12,22	-7,60	-25,50
2. Penggalian	125,87	133,97	134,29	0,04	0,24	6,64	6,69
Industri Pengolahan	129,22	133,82	135,32	0,44	1,12	6,48	4,72
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	134,57	137,80	140,15	0,66	1,71	5,95	4,15
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	111,00	115,52	116,06	1,61	0,47	5,52	4,56
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	130,75	139,73	145,81	-2,78	4,36	6,21	11,52
4. Industri Makanan Lainnya	123,58	128,34	129,46	1,05	0,88	6,30	4,76
5. Industri Minuman dan Rokok	128,27	134,80	136,31	1,48	1,12	9,29	6,27
6. Industri Pemintalan dan Pertununan Tekstil	122,68	127,22	129,61	0,96	1,87	5,53	5,65
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	143,81	150,36	152,34	1,14	1,31	6,07	5,93
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	152,83	156,37	158,15	0,06	1,14	7,87	3,48
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	129,14	133,25	131,55	1,53	-1,27	12,62	1,87
10. Industri Pupuk	127,16	126,08	132,36	-2,71	4,99	3,79	4,09
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	135,30	144,52	145,22	0,51	0,48	11,97	7,33
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	129,93	129,63	128,28	2,19	-1,04	0,55	-1,27
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	113,47	115,16	116,16	0,33	0,87	3,52	2,37
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	140,18	141,19	140,53	-0,13	-0,47	8,87	0,25
15. Industri Logam Dasar	110,06	114,34	111,68	1,09	-2,33	5,67	1,47
16. Industri Barang-Barang dari Logam	115,49	119,23	119,20	0,42	-0,03	3,82	3,21
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	129,73	135,42	137,49	0,63	1,53	9,97	5,98
18. Industri Alat Angkutan	126,14	128,59	129,82	0,72	0,96	4,31	2,92
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	138,96	145,35	146,69	1,15	0,92	6,34	5,57
Akomodasi, Makanan dan Minuman	121,95	123,65	123,99	0,42	0,27	2,55	1,67
20. Akomodasi	137,61	138,34	138,89	0,14	0,40	3,56	0,93
21. Makanan dan Minuman	119,66	121,50	121,80	0,47	0,25	2,38	1,79

Keterangan: 1) Inflasi Produsen ($q-t_0-q$) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan t-1

2) Inflasi Produsen ($y-on-y$) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t-2015 terhadap Triwulan t-2014

B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

1. Pada November 2015, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 1,03 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu 5,58 persen dan terkecil pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,03 persen.

Pada November 2015 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 1,03 persen

Pada Oktober 2015 IHPB Umum turun sebesar 0,33 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Penurunan IHPB terbesar terjadi pada Kelompok Barang Ekspor sebesar 1,64 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kelompok Barang Impor sebesar 0,08 persen. Sektor Pertanian turun 0,53 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian turun 0,70 persen, sedangkan Sektor Industri naik 0,21 persen.

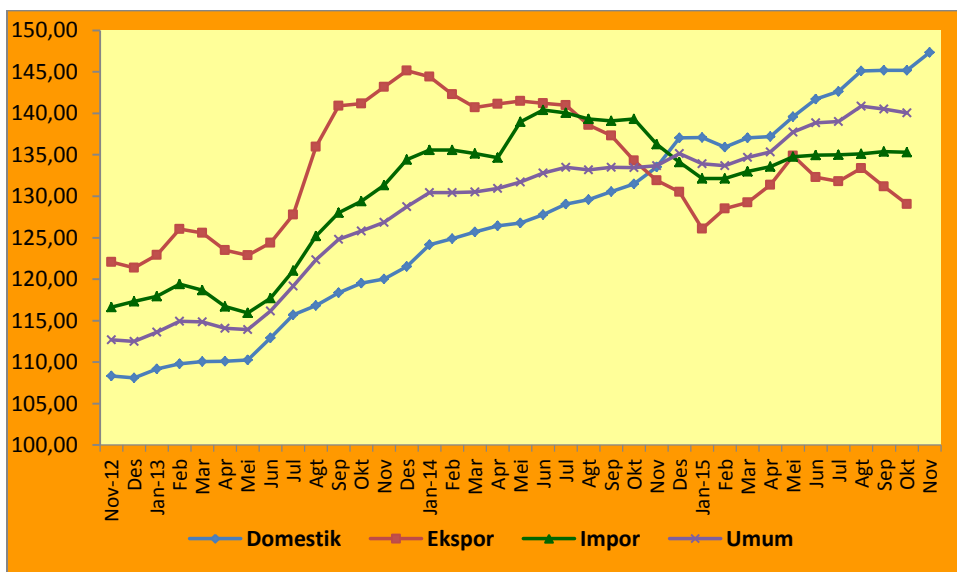
Tabel 10.3
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia
September–November 2015, (2010=100)

Sektor/Kelompok	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Perubahan	
				Oktober 2015 terhadap September 2015 (%)	November 2015 terhadap Oktober 2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	263,79	262,41	277,04	-0,53	5,58
2. Pertambangan dan Penggalian	119,97	119,13	119,17	-0,70	0,03
3. Industri	129,18	129,46	129,89	0,21	0,34
Domestik	145,18	145,19	147,34	0,00	1,49
4. Impor Nonmigas	132,58	132,61	132,56	0,02	-0,04
Impor	135,40	135,29		-0,08	
5. Ekspor Nonmigas	139,37	136,62	136,73	-1,98	0,08
Ekspor	131,19	129,05		-1,64	
Umum Nonmigas	142,25	141,77	143,24	-0,33	1,03
Umum	140,52	140,05		-0,33	

Tabel 10.4
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar November 2015 (2010=100)

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan November 2015 terhadap Oktober 2015	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	November 2014	Desember 2014	Oktober 2015	November 2015		Tahun Kalender 2015	Year- on- Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	201,23	216,79	262,41	277,04	5,58	27,79	37,67
2. Pertambangan dan Penggalian	119,08	120,78	119,13	119,17	0,03	-1,34	0,08
3. Industri	124,42	126,25	129,46	129,89	0,34	2,89	4,40
4. Impor Nonmigas	124,52	125,91	132,61	132,56	-0,04	5,28	6,46
5. Ekspor Nonmigas	129,91	133,69	136,62	136,73	0,08	2,27	5,25
Umum Nonmigas	131,53	134,77	141,77	143,24	1,03	6,28	8,90

Grafik 10.2
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
November 2012–November 2015



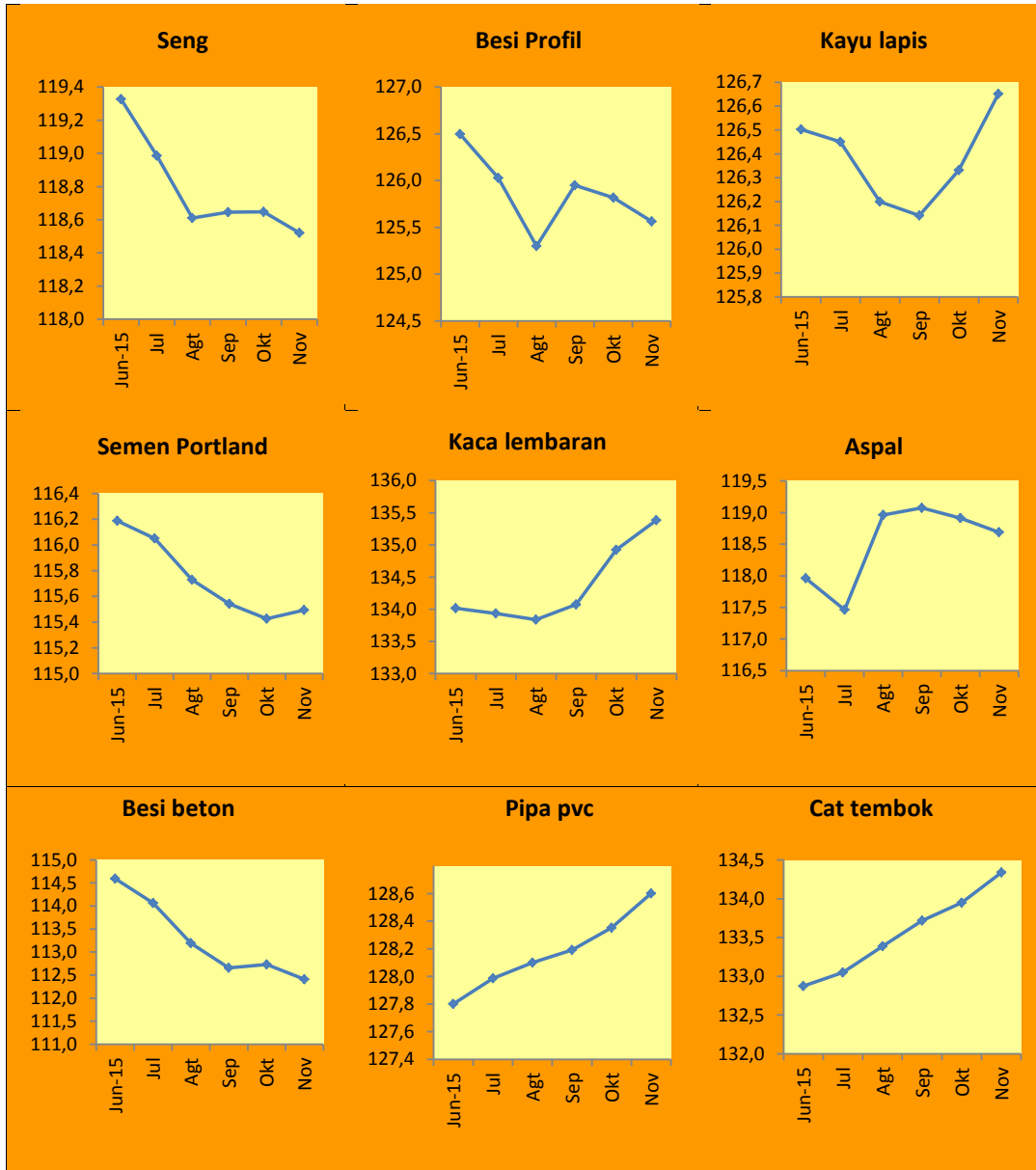
2. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada November 2015 naik sebesar 0,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada jenis Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi sebesar 0,41 persen.

Tabel 10.5
Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia November 2015
Menurut Jenis Bangunan (2010=100)

Jenis Bangunan	November 2014	Desember 2014	Oktober 2015	November 2015	Perubahan November 2015 terhadap Oktober 2015	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2015	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	124,48	128,07	130,64	130,87	0,18	2,19	5,13
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	122,53	125,89	127,43	127,71	0,22	1,45	4,23
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	120,89	123,21	124,79	124,96	0,14	1,42	3,37
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	123,34	125,55	128,64	129,17	0,41	2,88	4,73
Bangunan Lainnya	122,21	125,38	126,72	126,99	0,21	1,29	3,91
Konstruksi Indonesia	123,22	126,26	128,54	128,81	0,22	2,02	4,54

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (kayu lapis, cat tembok, pipa pvc, kaca lembaran, dan semen portland) pada November 2015 naik harganya dibandingkan bulan sebelumnya kecuali aspal, besi beton, dan besi profil. Kenaikan tertinggi terjadi pada kaca lembaran sebesar 0,34 persen dan terendah pada semen portland sebesar 0,06 persen. Komoditas lain, yaitu cat tembok naik 0,29 persen, kayu lapis naik 0,25 persen, dan pipa pvc naik 0,19 persen. Sedangkan aspal turun 0,19 persen, besi profil turun 0,20 persen, dan besi beton turun 0,29 persen.

Grafik 10.3
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Juni–November 2015



XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN III-2015

A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

A.1. ITB TRIWULAN III-2015

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan III-2015 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai ITB sebesar 106,04. Pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan III-2015 lebih optimis dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 105,46).
2. Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan III-2015 terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Peningkatan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (nilai ITB sebesar 112,02), sedangkan peningkatan kondisi bisnis terendah terjadi pada lapangan usaha Real Estat (nilai ITB sebesar 101,65). Penurunan kondisi bisnis terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 96,18), Industri Pengolahan (nilai ITB sebesar 99,26) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (nilai ITB sebesar 99,57).
3. Kondisi bisnis pada triwulan III-2015 meningkat karena adanya peningkatan pada semua komponen indeks, yaitu pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 108,20), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 104,95), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 104,71).

Kondisi bisnis triwulan III-2015 meningkat dengan nilai Indeks Tendensi Bisnis (ITB) sebesar 106,04

Tabel 11.1
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III- 2015
Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan III-2015			ITB Triwulan III-2015
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	99,57	-	99,57
2. Pertambangan dan Penggalian	96,24	98,62	95,10	96,18
3. Industri Pengolahan	99,86	98,04	99,27	99,26
4. Pengadaan Listrik dan Gas	114,64	111,70	103,77	109,27
5. Pengadaan Air	108,94	108,72	104,69	107,01
6. Konstruksi	116,69	106,39	104,30	109,26
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	113,76	111,49	107,39	110,51
8. Transportasi dan Pergudangan	115,60	108,92	110,35	112,02
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,66	109,03	105,98	109,02
10. Informasi dan Komunikasi	110,20	106,06	107,05	108,03
11. Jasa Keuangan	108,61	112,59	111,84	110,79
12. Real Estat	96,30	94,55	109,09	101,65
13. Jasa Perusahaan	113,64	104,62	108,06	109,48
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	113,32	108,57	110,00	110,96
15. Jasa Pendidikan	113,11	117,60	107,53	111,47
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,88	117,11	107,89	109,98
17. Jasa Lainnya	110,09	105,52	109,61	109,02
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	108,20	104,95	104,71	106,04

A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN IV-2015

- Selain pada triwulan berjalan, indeks persepsi pengusaha mengenai kondisi bisnis dan perekonomian secara umum pada triwulan mendatang juga dihitung. Nilai ITB triwulan IV-2015 diprediksi sebesar 103,72, artinya secara umum kondisi bisnis pada triwulan IV-2015

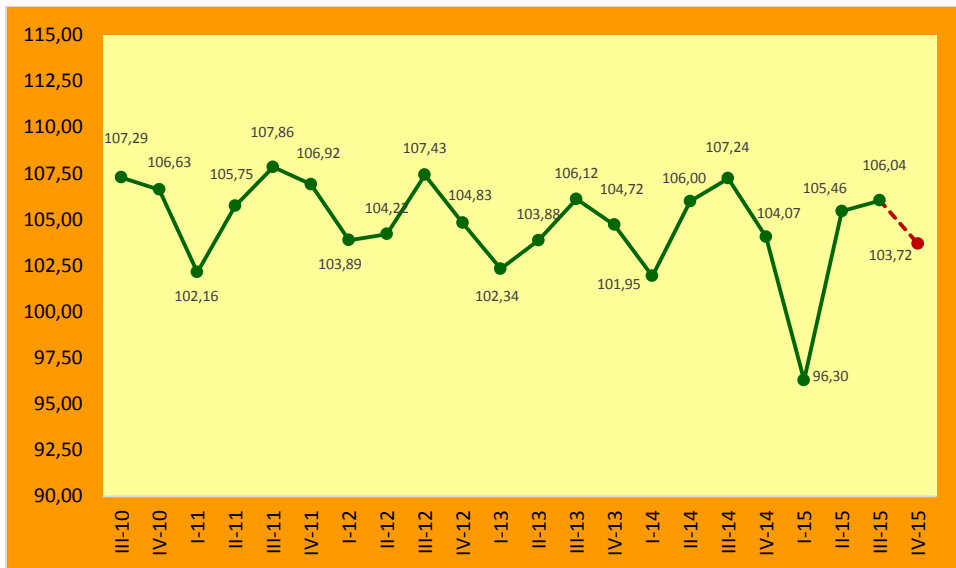
Kondisi bisnis pada triwulan IV-2015 diprediksi meningkat (ITB 103,72)

diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan III-2015. Namun tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan IV-2015 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015 (nilai ITB sebesar 106,04). Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan IV-2015 diperkirakan terjadi di semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (nilai ITB sebesar 98,80) serta Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 97,53). Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi diperkirakan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai indeks sebesar 118,37.

Tabel 11.2
Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2015
Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan IV-2015				Perkiraan ITB Triwulan IV-2015
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	97,38	96,27	103,03	-	98,80
2. Pertambangan dan Penggalian	97,68	94,44	99,79	97,40	97,53
3. Industri Pengolahan	102,67	90,94	107,05	100,85	101,07
4. Pengadaan Listrik dan Gas	114,64	-	114,76	104,00	110,11
5. Pengadaan Air	112,42	-	106,88	105,13	108,04
6. Konstruksi	113,60	-	110,40	113,85	112,98
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	109,63	99,71	109,54	107,16	107,23
8. Transportasi dan Pergudangan	-	-	110,77	-	110,77
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	107,83	-	107,83
10. Informasi dan Komunikasi	-	-	118,37	-	118,37
11. Jasa Keuangan	-	-	111,77	-	111,77
12. Real Estat	-	-	109,07	-	109,07
13. Jasa Perusahaan	-	-	110,40	-	110,40
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	116,36	-	116,36
15. Jasa Pendidikan	-	-	101,06	-	101,06
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	109,03	-	109,03
17. Jasa Lainnya	-	-	109,57	-	109,57
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	104,59	94,76	108,10	104,42	103,72

Grafik 11.1
Indeks Tendensi Bisnis¹⁾ Triwulan III-2010–Triwulan III-2015 dan
Perkiraan Triwulan IV-2015²⁾



Keterangan:

¹⁾ ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.

²⁾ Angka perkiraan ITB triwulan IV-2015.

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

B.1. ITK TRIWULAN III-2015

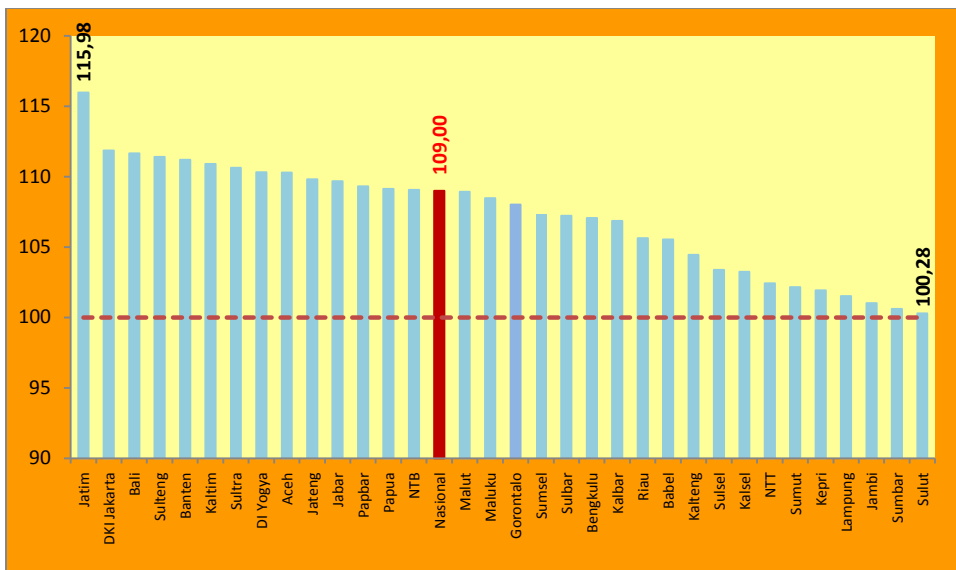
1. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan indeks komposit persepsi rumah tangga mengenai kondisi ekonomi konsumen dan perilaku konsumsi terhadap situasi perekonomian pada triwulan berjalan. Nilai ITK nasional pada triwulan III-2015 sebesar 109,00 artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat konsumsi yang meningkat, diikuti oleh rendahnya pengaruh kenaikan harga (inflasi) terhadap tingkat konsumsi dan meningkatnya pendapatan rumahtangga. Tingkat optimisme konsumen lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 105,22).
2. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah Jawa Timur (nilai ITK sebesar 115,98). Sementara provinsi Sulawesi Utara tercatat memiliki nilai ITK terendah, yaitu sebesar 100,28.

Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2015 meningkat (ITK 109,00)

Tabel 11.3
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015 dan Triwulan III-2015
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	ITK Triw II-2015	ITK Triw III-2015
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	104,39	108,44
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	105,69	108,05
Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	106,59	111,56
Indeks Tendensi Konsumen	105,22	109,00

Grafik 11.2
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015
Tingkat Nasional dan Provinsi



B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN IV-2015

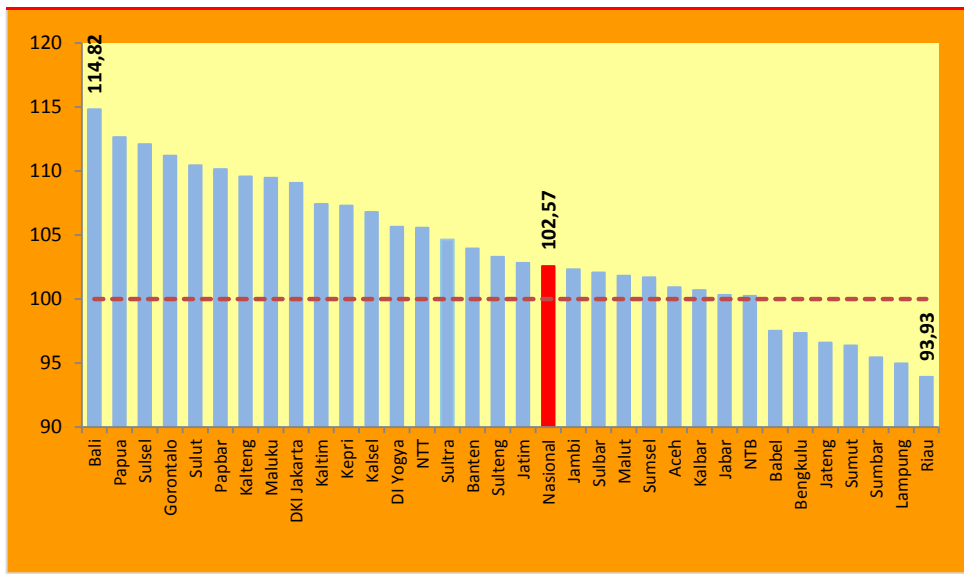
- Selain triwulan berjalan, indeks komposit persepsi rumah tangga mengenai kondisi ekonomi konsumen dan perilaku konsumsi pada triwulan mendatang juga diperkirakan meningkat. Nilai ITK nasional pada triwulan IV-2015 diperkirakan sebesar 102,57, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun tingkat optimisme konsumen mendatang diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan III-2015 (nilai ITK sebesar 109,00).
- Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen terjadi di 26 provinsi di Indonesia, dimana 18 provinsi diantaranya (54,54 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks diatas nasional. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah Provinsi Bali (nilai ITK sebesar 114,82), sementara Provinsi Riau memiliki nilai ITK terendah (nilai ITK sebesar 93,93).

Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2015 diprediksi meningkat (ITK 102,57)

Tabel 11.4
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw IV-2015
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	100,91
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	105,44
Indeks Tendensi Konsumen	102,57

Grafik 11.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2015
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 11.5
Indeks Tendensi Konsumen¹⁾ Triwulan III-2014–Triwulan III-2015 dan
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen²⁾ Triwulan IV-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi

No,	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		III-2014	IV-2014	I-2015	II-2015	III-2015	IV-2015 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	107,18	105,77	100,33	107,92	110,29	100,92
2.	Sumatera Utara	114,27	105,69	100,48	101,60	102,17	96,37
3.	Sumatera Barat	108,91	106,14	94,58	101,07	100,61	95,44
4.	Riau	114,69	101,96	90,72	104,74	105,65	93,93
5.	Jambi	114,68	104,81	91,66	99,57	101,02	102,32
6.	Sumatera Selatan	112,65	102,78	99,97	101,97	107,31	101,70
7.	Bengkulu	113,23	106,26	96,54	105,55	107,07	97,34
8.	Lampung	112,64	106,41	93,38	102,57	101,51	94,99
9.	Kepulauan Bangka Belitung	108,89	105,15	92,19	97,90	105,54	97,53
10.	Kepulauan Riau	113,18	107,29	101,80	108,82	101,92	107,31
11.	DKI Jakarta	118,75	109,93	103,97	109,71	111,88	109,06
12.	Jawa Barat	113,72	107,09	104,43	105,67	109,69	100,32
13.	Jawa Tengah	116,00	106,02	99,71	103,60	109,81	96,61
14.	D.I. Yogyakarta	115,89	108,03	97,18	111,73	110,33	105,65
15.	Jawa Timur	115,99	110,23	100,75	103,88	115,98	102,81
16.	Banten	116,09	107,83	104,07	108,19	111,21	103,96
17.	Bali	111,90	113,13	102,36	105,42	111,66	114,82
18.	Nusa Tenggara Barat	111,54	108,11	97,50	101,43	109,07	100,24
19.	Nusa Tenggara Timur	103,74	106,20	93,45	100,30	102,42	105,56
20.	Kalimantan Barat	112,27	107,29	100,44	105,05	106,86	100,71
21.	Kalimantan Tengah	112,33	105,54	94,98	106,37	104,46	109,56
22.	Kalimantan Selatan	109,41	103,32	94,25	107,21	103,25	106,80
23.	Kalimantan Timur	118,79	111,73	101,03	107,40	110,92	107,42
24.	Sulawesi Utara	107,16	108,91	93,15	103,46	100,28	110,45
25.	Sulawesi Tengah	112,79	108,16	91,78	105,03	111,42	103,29
26.	Sulawesi Selatan	110,67	108,19	96,29	106,24	103,38	112,09
27.	Sulawesi Tenggara	114,21	108,69	92,52	102,70	110,64	104,64
28.	Gorontalo	111,25	105,50	95,18	109,08	108,02	111,20
29.	Sulawesi Barat	111,30	104,57	100,69	111,64	107,24	102,09
30.	Maluku	115,41	102,23	102,18	107,38	108,48	109,47
31.	Maluku Utara	113,85	103,28	103,19	103,81	108,94	101,82
32.	Papua Barat	110,02	108,71	99,77	109,12	109,31	110,15
33.	Papua	107,21	111,62	93,88	107,57	109,13	112,65
	Indonesia	112,44	107,62	100,87	105,22	109,00	102,57

Keterangan:

¹⁾ ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

²⁾ Angka perkiraan ITK triwulan IV-2015.

XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA RAMALAN II (ARAM II) 2015

A. PADI

1. Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 74,99 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 4,15 juta ton (5,85 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi tahun 2015 diperkirakan terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,72 juta ton dan di luar Pulau Jawa diperkirakan mengalami kenaikan sebanyak 2,43 juta ton. Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 380,87 ribu hektar (2,76 persen) dan produktivitas sebesar 1,54 kuintal/hektar (3,00 persen).

Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 74,99 juta ton GKG atau naik 5,85 persen dibandingkan tahun

Tabel 12.1
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ARAM II)	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	6 467 073	6 400 038	6 401 218	- 67 035	-1,04	1 180	0,02
- Luar Jawa	7 368 179	7 397 269	7 776 954	29 090	0,39	379 685	5,13
- Indonesia	13 835 252	13 797 307	14 178 172	- 37 945	-0,27	380 865	2,76
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	57,98	57,29	59,96	-0,69	-1,19	2,67	4,66
- Luar Jawa	45,85	46,21	47,08	0,36	0,79	0,87	1,88
- Indonesia	51,52	51,35	52,89	-0,17	-0,33	1,54	3,00
c. Produksi (ton)							
- Jawa	37 493 020	36 663 049	38 379 893	- 829 971	-2,21	1 716 844	4,68
- Luar Jawa	33 786 689	34 183 416	36 611 895	396 727	1,17	2 428 479	7,10
- Indonesia	71 279 709	70 846 465	74 991 788	- 433 244	-0,61	4 145 323	5,85

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

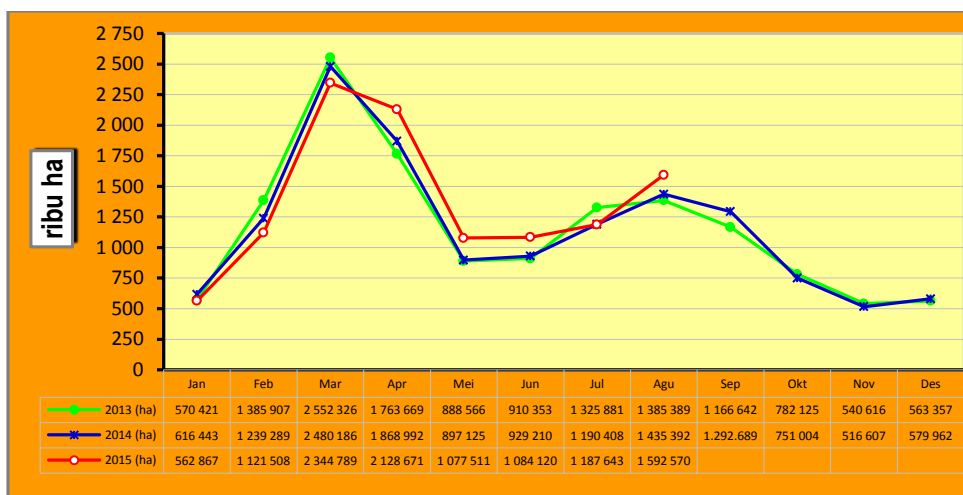
Tabel 12.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Subround, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ARAM II)	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Januari–April	6 272 323	6 204 910	6 157 835	- 67 413	-1,07	- 47 075	-0,76
- Mei–Agustus	4 510 189	4 452 135	4 941 844	- 58 054	-1,29	489 709	11,00
- September–Desember	3 052 740	3 140 262	3 078 493	87 522	2,87	- 61 769	-1,97
- Januari–Desember	13 835 252	13 797 307	14 178 172	- 37 945	-0,27	380 865	2,76
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari–April	51,65	50,87	53,68	-0,78	-1,51	2,81	5,52
- Mei–Agustus	50,92	51,12	52,04	0,20	0,39	0,92	1,80
- September–Desember	52,13	52,63	52,69	0,50	0,96	0,06	0,11
- Januari–Desember	51,52	51,35	52,89	-0,17	-0,33	1,54	3,00
c. Produksi (ton)							
- Januari–April	32 398 677	31 562 789	33 057 106	- 835 888	-2,58	1 494 317	4,73
- Mei–Agustus	22 967 655	22 757 916	25 715 214	- 209 739	-0,91	2 957 298	12,99
- September–Desember	15 913 377	16 525 760	16 219 468	612 383	3,85	- 306 292	-1,85
- Januari–Desember	71 279 709	70 846 465	74 991 788	- 433 244	-0,61	4 145 323	5,85

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

2. Pola panen padi pada periode Januari–Agustus tahun 2015 relatif sama dengan pola panen tahun 2014 dan tahun 2013. Puncak panen padi pada periode tersebut tahun dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2014, dan 2013 terjadi pada bulan Maret.

Grafik 12.1
Pola Panen Padi, 2013–2015



B. JAGUNG

1. Produksi jagung tahun 2015 diperkirakan sebanyak 19,83 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,82 juta ton (4,34 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi jagung tersebut diperkirakan terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebanyak 0,42 juta ton dan 0,41 juta ton. Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 1,85 kuintal/hektar (3,73 persen) dan kenaikan luas panen seluas 22,61 ribu hektar (0,59 persen).

Produksi jagung tahun 2015 diperkirakan sebanyak 19,83 juta ton pipilan kering atau naik 4,34 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.3
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ARAM II)	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	1 958 883	1 954 175	1 967 779	- 4 708	-0,24	13 604	0,70
- Luar Jawa	1 862 621	1 882 844	1 891 851	20 223	1,09	9 007	0,48
- Indonesia	3 821 504	3 837 019	3 859 630	15 515	0,41	22 611	0,59
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	51,54	51,98	53,74	0,44	0,85	1,76	3,39
- Luar Jawa	45,19	47,00	48,94	1,81	4,01	1,94	4,13
- Indonesia	48,44	49,54	51,39	1,10	2,27	1,85	3,73
c. Produksi (ton)							
- Jawa	10 095 486	10 158 725	10 574 724	63 239	0,63	415 999	4,09
- Luar Jawa	8 416 367	8 849 701	9 258 565	433 334	5,15	408 864	4,62
- Indonesia	18 511 853	19 008 426	19 833 289	496 573	2,68	824 863	4,34

Keterangan: Kualitas produksi jagung adalah pipilan kering

C. KEDELAI

1. Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 982,97 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 27,97 ribu ton (2,93 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi kedelai tersebut diperkirakan terjadi di luar Pulau Jawa sebanyak 40,16 ribu ton, sedangkan di Pulau Jawa diperkirakan terjadi penurunan produksi sebanyak 12,19 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 9,16 ribu hektar (1,49 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 0,22 kuintal/hektar (1,42 persen).

Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 982,97 ribu ton biji kering atau naik 2,93 persen dibandingkan tahun 2014

Tabel 12.4
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut Wilayah, 2013–2015

URAIAN	2013	2014	2015 (ARAM II)	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	342 796	378 986	364 223	36 190	10,56	- 14 763	-3,90
- Luar Jawa	207 997	236 699	260 625	28 702	13,80	23 926	10,11
- Indonesia	550 793	615 685	624 848	64 892	11,78	9 163	1,49
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	15,23	16,42	16,75	1,19	7,81	0,33	2,01
- Luar Jawa	12,41	14,06	14,31	1,65	13,30	0,25	1,78
- Indonesia	14,16	15,51	15,73	1,35	9,53	0,22	1,42
c. Produksi (ton)							
- Jawa	521 954	622 155	609 970	100 201	19,20	- 12 185	-1,96
- Luar Jawa	258 038	332 842	372 997	74 804	28,99	40 155	12,06
- Indonesia	779 992	954 997	982 967	175 005	22,44	27 970	2,93

Keterangan: Kualitas produksi kedelai adalah biji kering

Tabel 12.5
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija Lain, 2013–2015

Uraian	Satuan	2013	2014	2015 (ARAM II)	Perkembangan			
					2013-2014		2014-2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Absolut	(%)	Absolut	(%)
					(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kacang Tanah								
-Luas Panen	Ha	519 056	499 338	460 157	- 19 718	-3,80	- 39 181	-7,85
-Produktivitas	ku/ha	13,52	12,79	13,26	-0,73	-5,40	0,47	3,67
-Produksi (biji kering)	Ton	701 680	638 896	610 337	- 62 784	-8,95	- 28 559	-4,47
2 Kacang Hijau								
-Luas Panen	Ha	182 075	208 016	226 584	25 941	14,25	18 568	8,93
-Produktivitas	ku/ha	11,24	11,76	11,71	0,52	4,63	-0,05	-0,43
-Produksi (biji kering)	Ton	204 670	244 589	265 416	39 919	19,50	20 827	8,52
3 Ubi Kayu								
-Luas Panen	Ha	1 065 752	1 003 494	980 217	- 62 258	-5,84	- 23 277	-2,32
-Produktivitas	ku/ha	224,60	233,55	233,68	8,95	3,98	0,13	0,06
-Produksi (umbi basah)	Ton	23 936 921	23 436 384	22 906 118	- 500 537	-2,09	- 530 266	-2,26
4 Ubi Jalar								
-Luas Panen	Ha	161 850	156 758	139 237	- 5 092	-3,15	- 17 521	-11,18
-Produktivitas	ku/ha	147,47	152,00	159,37	4,53	3,07	7,37	4,85
-Produksi (umbi basah)	Ton	2 386 729	2 382 658	2 218 992	- 4 071	-0,17	- 163 666	-6,87

Keterangan:
 kualitas produksi kacang tanah dan kacang hijau adalah biji kering
 kualitas produksi ubi kayu dan ubi jalar adalah umbi basah

XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN III-2015

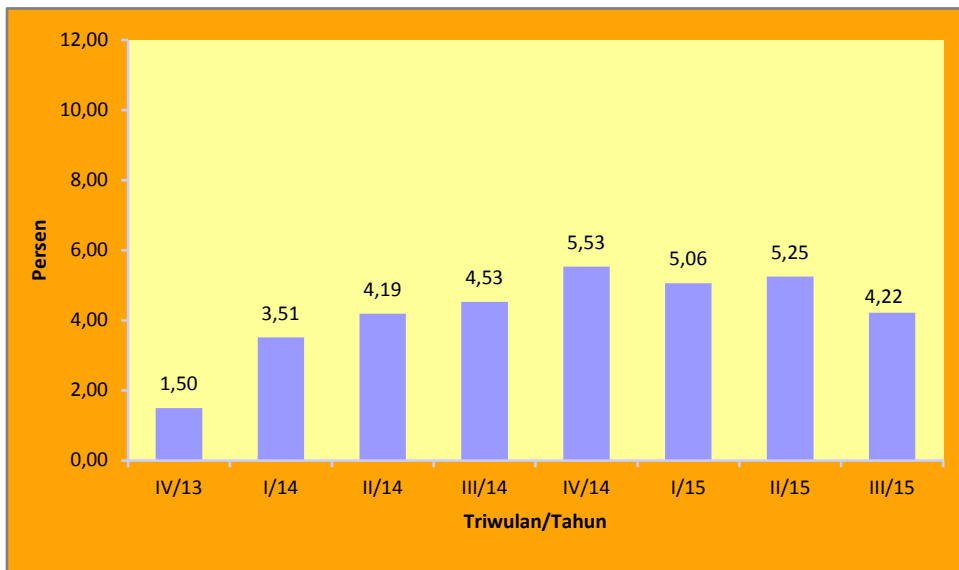
A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

- Pertumbuhan IBS triwulan III-2015 naik sebesar 4,22 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014, triwulan II-2015 naik sebesar 5,25 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014, triwulan I-2015 naik sebesar 5,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 5,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2013, triwulan III-2014 naik sebesar 4,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2013, triwulan II-2014 naik 4,19 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2013, triwulan I-2014 naik sebesar 3,51 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2013, dan triwulan IV-2013 naik sebesar 1,50 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2013.

Pertumbuhan produksi IBS triwulan III-2015 naik sebesar 4,22 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014

Grafik 13.1

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*) Triwulan IV-2013–Triwulan III-2015



- Pertumbuhan produksi IBS triwulan III-2015 naik sebesar 1,04 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2015, triwulan II-2015 naik sebesar 2,16 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2015, triwulan I-2015 turun sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 1,68 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2014, triwulan

III-2014 naik sebesar 2,04 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2014, dan triwulan II-2014 naik sebesar 1,97 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2014.

3. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan III-2015 (*y-on-y*) adalah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang naik 15,31 persen, industri pengolahan lainnya yang naik sebesar 13,53 persen, serta industri mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) naik 8,28 persen.
4. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan III-2015 (*q-to-q*) adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) naik 6,96 persen, industri alat angkutan lainnya naik 5,81 persen, dan industri pengolahan lainnya naik 4,87 persen.
5. Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* Juli 2015 mengalami penurunan sebesar 2,35 persen, dan Agustus 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,11 persen. Sementara pada September 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

Tabel 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan
Triwulan I-2013–Triwulan III-2015 (persen), 2010=100

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	-2,20	1,31	0,51	1,91	8,99	6,77	7,21	1,50	6,01
2014	-0,25	1,97	2,04	1,68	3,51	4,19	4,53	5,44	4,74
2015	-0,70	2,16	1,04		5,06	5,25	4,22		

Tabel 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2013–2015 (persen)
2010=100

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	10,86	2,99	5,12	-0,18	-0,03	-1,29
Februari	6,32	3,82	2,63	-1,41	-0,61	-2,97
Maret	9,88	3,74	7,42	0,24	0,17	4,84
April	6,89	2,74	8,41	1,37	0,39	1,31
Mei	3,23	3,79	2,39	1,45	2,48	-3,21
Juni	6,77	6,07	5,02	-2,10	0,05	2,62
Juli	12,49	1,54	5,33*)	1,71	-2,64	-2,35*)
Agustus	6,16	5,96	6,85**)	-1,65	2,63	4,11**)
September	7,21	9,77	0,73***)	2,64	6,34	0,25***)
Oktober	-0,10	5,35		1,45	-2,64	
November	1,82	4,76		-1,57	-2,12	
Desember	2,83	6,47		0,99	2,64	

Catatan: *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara
 ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 13.3

**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)**

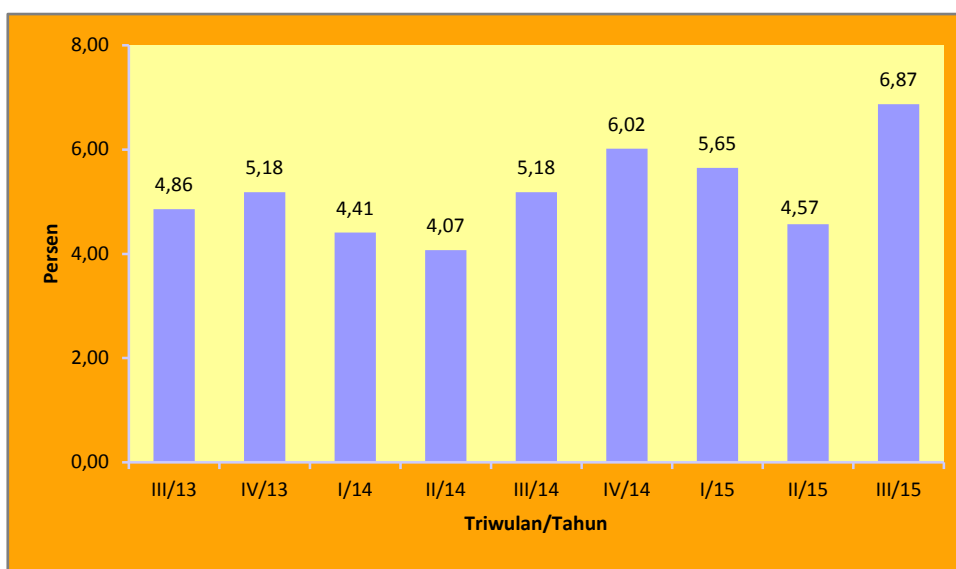
KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	0,30	7,09
11	Minuman	-2,78	-7,38
12	Pengolahan Tembakau	1,96	5,78
13	Tekstil	2,32	-1,49
14	Pakaian Jadi	-1,19	-12,01
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	-2,91	1,67
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	-2,28	-1,65
17	Kertas dan Barang dari Kertas	0,95	-2,22
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,73	2,93
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	3,15	2,18
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	0,47	15,31
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-2,80	5,28
23	Barang Galian Bukan Logam	0,79	7,37
24	Logam Dasar	-0,67	4,99
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-1,34	6,10
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	2,29	3,72
27	Peralatan Listrik	0,30	0,46
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	6,96	8,28
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	3,56	7,14
30	Alat Angkutan Lainnya	5,81	-5,71
31	Furnitur	-2,11	3,84
32	Pengolahan Lainnya	4,87	13,53
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-0,24	4,42
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		1,04	4,22

B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan III-2015 naik sebesar 6,87 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014, triwulan II-2015 naik sebesar 4,57 persen dari triwulan II-2014, triwulan I-2015 naik sebesar 5,65 persen dari triwulan I-2014, dan triwulan IV-2014 naik sebesar 6,02 persen dari triwulan IV-2013.

Pertumbuhan produksi IMK triwulan III-2015 naik 6,87 persen dari triwulan III-2014

Grafik 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)
Triwulan III-2013–Triwulan III-2015



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan III-2015 turun 1,31 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2015, triwulan II-2015 naik 5,09 persen dari triwulan I-2015, triwulan I-2015 naik 0,64 persen dari triwulan IV-2014, dan triwulan IV-2014 naik 2,39 persen dari triwulan III-2014.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan III-2015 (*y-on-y*) adalah Industri Tembakau naik 19,17 persen, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya) naik 19,12 persen, serta Industri Kimia dan Bahan dari Kimia naik 18,63 persen.
4. Pertumbuhan Produksi IMK terendah pada triwulan III-2015 (*q-to-q*) adalah Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan turun 7,69 persen, serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas turun 7,58 persen.

Tabel 13.4
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan
Triwulan I-2013–Triwulan III-2015 (persen)

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	1,74	6,52	-4,45	1,58	4,84	15,55	4,86	5,18	7,51
2014	0,99	6,17	-3,43	2,39	4,41	4,07	5,18	6,02	4,91
2015	0,64	5,09	-1,31		5,65	4,57	6,87		

Tabel 13.5
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan III-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	-3,19	7,36
11	Minuman	2,21	11,05
12	Pengolahan tembakau	32,86	19,17
13	Tekstil	-7,17	5,72
14	Pakaian jadi	-4,72	7,75
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-3,53	5,19
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya)	-3,82	-5,88
17	Kertas dan barang dari kertas	-7,58	11,63
18	Percetakan dan reproduksi media rekaman	2,35	12,75
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	8,76	18,63
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	2,81	13,56
22	Karet, barang dari karet dan plastik	-0,82	-1,70
23	Barang galian bukan logam	0,63	2,15
24	Logam dasar	-7,47	-5,87
25	Barang logam, bukan mesin & peralatannya	-7,27	-2,68
26	Komputer, barang elektronik dan optik	-3,53	5,01
27	Peralatan listrik	-4,30	8,52
28	Mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)	-0,48	19,12
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	-1,94	-1,53
30	Alat angkutan lainnya	-0,07	-1,77
31	Furnitur	-3,35	5,82
32	Pengolahan lainnya	-2,42	6,55
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	-7,69	-1,83
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil		-1,31	6,87

XIV. PARIWISATA OKTOBER 2015

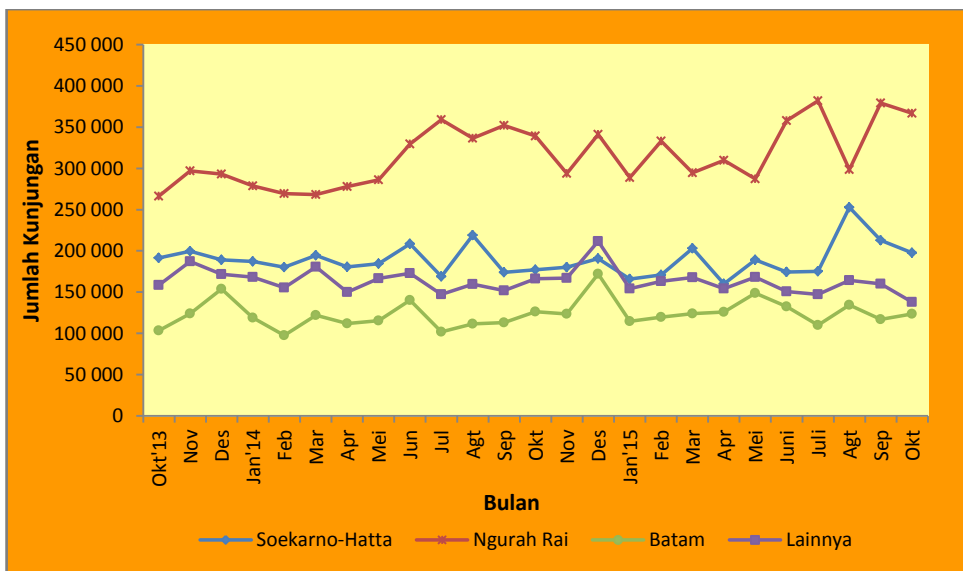
A. Wisatawan Mancanegara (Wisman)

1. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari–Oktober 2015 mencapai 8,02 juta kunjungan atau naik 3,38 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2014, yang tercatat sebanyak 7,76 juta kunjungan. Jumlah kunjungan

Jumlah kunjungan wisman selama Januari–Oktober 2015 mencapai 8,02 juta kunjungan atau naik 3,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2014

wisman Oktober 2015 naik sebesar 2,11 persen dibanding Oktober 2014, yaitu dari 808,8 ribu kunjungan menjadi 825,8 ribu kunjungan. Namun, jika dibandingkan dengan September 2015, jumlah kunjungan wisman Oktober 2015 mengalami penurunan sebesar 4,99 persen. Pada Oktober 2015, jumlah kunjungan wisman melalui 19 pintu masuk utama naik 2,78 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada Oktober 2014, namun mengalami penurunan sebesar 3,98 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Grafik 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk Oktober 2013–Oktober 2015



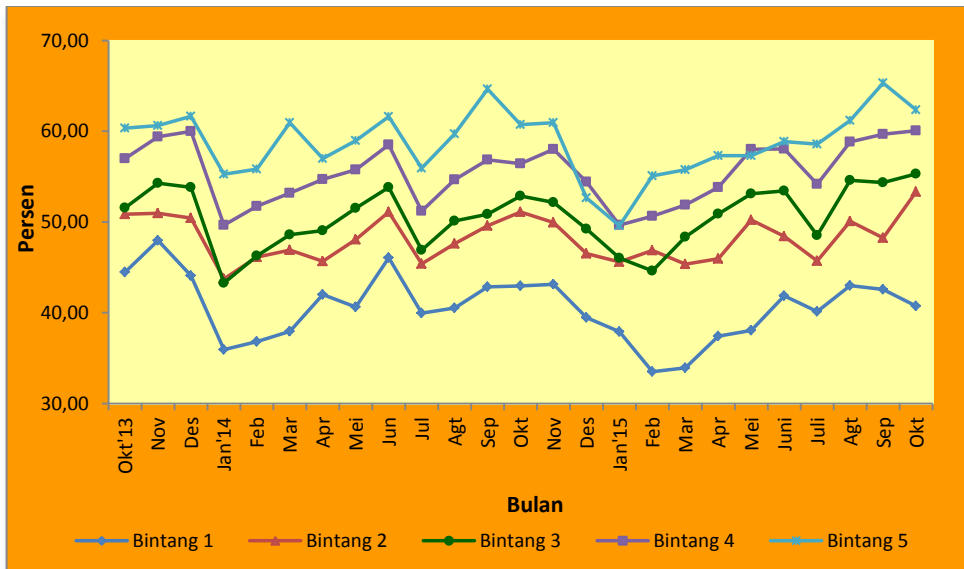
2. Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Oktober 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,12 persen dibandingkan Oktober 2014, yaitu dari 339,2 ribu kunjungan menjadi 366,8 ribu kunjungan. Namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,33 persen.
3. Dari sekitar 825,8 ribu kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada Oktober 2015, sebanyak 14,79 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Singapura, diikuti oleh wisman Australia (12,36 persen), Tionghoa (12,30 persen), Malaysia (11,66 persen), dan Jepang (5,28 persen)

B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi selama Januari-Oktober 2015 rata-rata mencapai 52,31 persen, yang berarti terjadi kenaikan 0,47 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada periode yang sama tahun 2014. TPK Oktober 2015 mencapai 56,60 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 2,31 poin dibandingkan TPK hotel berbintang pada Oktober 2014. Demikian pula, jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Oktober 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin.

TPK Hotel Berbintang Oktober 2015 mencapai 56,60 persen atau naik 2,31 poin dibanding TPK Oktober 2014
2. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Angka TPK hanya menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Kinerja sektor perhotelan tidak hanya diukur dari besaran TPK tetapi juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

Grafik 14.2
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Oktober 2013–Oktober 2015



3. TPK Hotel Berbintang di Bali pada Oktober 2015 sebesar 65,01 persen, atau naik sebesar 2,18 poin dibandingkan TPK Oktober 2014. Namun, jika dibandingkan dengan September 2015, TPK Oktober 2015 di Bali mengalami penurunan sebesar 2,64 poin.
4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Oktober 2015 mencapai 1,92 hari, atau mengalami penurunan 0,06 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama Oktober 2014. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Oktober 2015 mengalami penurunan sebesar 0,04 hari, yaitu dari 1,96 hari menjadi 1,92 hari.

Tabel 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel
Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Oktober 2014–Oktober 2015

Bulan/ Tahun	Wisman Nasional		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK 27 Prov.		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- Bahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2014	9 435 411	7,19	3 731 735	15,11	51,84	-0,66	60,34	-0,38	1,99	0,06
Jan-Okt	7 755 616	8,71	3 096 766	16,77	51,76	-0,06	61,23	0,71	2,00	0,06
Oktober	808 767	2,21	339 200	-3,64	54,29	0,08	62,83	-1,04	1,98	-0,04
November	764 461	-5,48	293 858	-13,37	54,45	0,16	61,36	-1,47	1,96	-0,02
Desember	915 334	19,74	341 111	16,08	50,13	-4,32	51,07	-10,29	1,91	-0,05
2015	8 017 616	3,38	3 298 010	6,50	52,31	0,47	60,71	0,37	2,03	0,04
Januari	723 039	-21,01	288 755	-15,35	47,08	-3,05	53,45	2,38	2,12	0,21
Februari	786 653	8,80	333 072	15,35	47,59	0,51	60,03	6,58	1,98	-0,04
Maret	789 596	0,37	294 758	-11,50	49,13	1,54	54,50	-5,53	1,96	-0,02
April	749 882	-5,03	309 888	5,13	51,28	2,15	54,70	0,20	2,19	0,23
Mei	793 499	5,82	287 141	-7,34	53,72	2,44	57,51	2,81	2,12	-0,07
Juni	815 148	2,73	357 712	24,58	54,14	0,42	61,76	4,25	2,20	0,08
Juli	814 233	-0,11	381 890	6,76	51,25	-2,89	64,29	2,53	1,90	-0,30
Agustus	850 542	4,46	298 638	-21,80	55,61	4,36	67,49	3,20	1,93	0,03
September	869 179	2,19	379 397	27,04	56,26	0,65	67,65	0,16	1,96	0,03
Oktober	825 818	-4,99	366 759	-7,15	56,60	0,34	65,01	-2,64	1,92	-0,04

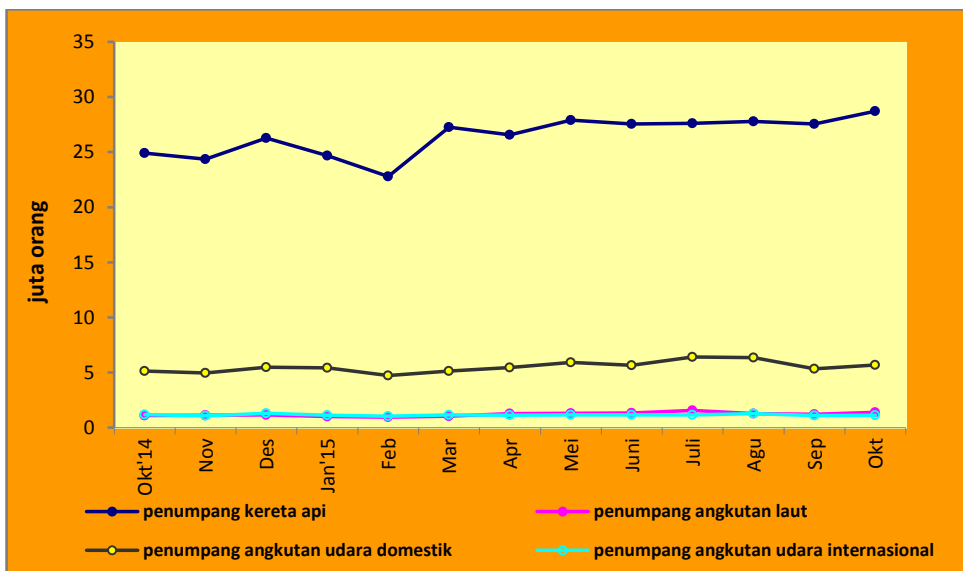
XV. TRANSPORTASI NASIONAL OKTOBER 2015

A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Oktober 2015 mencapai 5,7 juta orang atau naik 6,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dan naik 10,51 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik Oktober 2015 mencapai 5,7 juta orang, naik 10,51 persen

Grafik 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi
Oktober 2014–Oktober 2015



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Oktober 2015 mencapai 1,1 juta orang atau naik 2,95 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun turun 5,70 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

B. Angkutan Laut Dalam Negeri

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Oktober 2015 mencapai 1,4 juta orang atau naik 15,00 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 27,53 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Oktober 2015 mencapai 21,9 juta ton atau naik 2,01 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 16,78 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Oktober 2015 mencapai 1,4 juta orang, naik 27,53 persen

C. Angkutan Kereta Api

1. Jumlah penumpang kereta api Oktober 2015 mencapai 28,7 juta orang atau naik 4,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 15,23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Oktober 2015 mencapai 2,8 juta ton atau naik 1,54 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun turun 3,79 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang kereta api Oktober 2015 mencapai 28,7 juta orang, naik 15,23 persen

Tabel 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Oktober 2014–Oktober 2015

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2014	58 919,3	-	13 684,2	-	13 088,8	-	225 517,3	-	277 503	-	33 463	-
Oktober	5 136,5	6,24	1 193,1	2,00	1 078,3	-2,04	18 758,5	-0,76	24 923	5,64	2 956	-11,50
November	4 957,3	-3,49	1 054,4	-11,63	1 121,6	4,02	18 585,6	-0,92	24 356	-2,28	2 775	-6,12
Desember	5 469,7	10,34	1 290,0	22,34	1 154,7	2,95	17 791,4	-4,27	26 275	7,88	3 150	13,51
2015	56 077,8	-	11 385,4	-	12 290,4	-	193 881,4	-	268 445	-	26 471	-
Januari	5 430,2	-0,72	1 135,4	-11,98	1 005,2	-12,95	19 761,3	11,07	24 676	-6,09	2 709	-14,00
Februari	4 736,5	-12,77	1 032,7	-9,05	960,3	-4,47	16 689,3	-15,55	22 790	-7,64	2 256	-16,72
Maret	5 132,2	8,35	1 136,1	10,01	1 021,9	6,41	18 136	8,67	27 267	19,64	2 520	11,70
April	5 439,0	5,98	1 122,1	-1,23	1 264,1	23,70	17 896,6	-1,32	26 565	-2,57	2 336	-7,30
Mei	5 911,3	8,68	1 157,6	3,16	1 301,0	2,92	20 134,4	12,50	27 910	5,06	2 641	13,06
Juni	5 656,6	-4,31	1 152,2	-0,47	1 329,2	2,17	19 870,0	-1,31	27 562	-1,25	2 805	6,21
Juli	6 421,0	13,51	1 162,8	0,92	1 565,8	17,80	17 947,8	-9,67	27 612	0,18	2 678	-4,53
Agustus	6 343,9	26,82	1 268,5	1,97	1 271,9	12,76	20 065,6	-4,28	27 796	3,11	2 881	9,36
September	5 330,6	-15,97	1 092,9	-13,84	1 195,8	-5,98	21 474,2	7,02	27 549	-0,89	2 801	-2,78
Oktober	5 676,5	6,49	1 125,1	2,95	1 375,2	15,00	21 906,2	2,01	28 718	4,24	2 844	1,54

Catatan: Data penumpang angkutan udara internasional Januari s.d Maret 2015 direvisi.

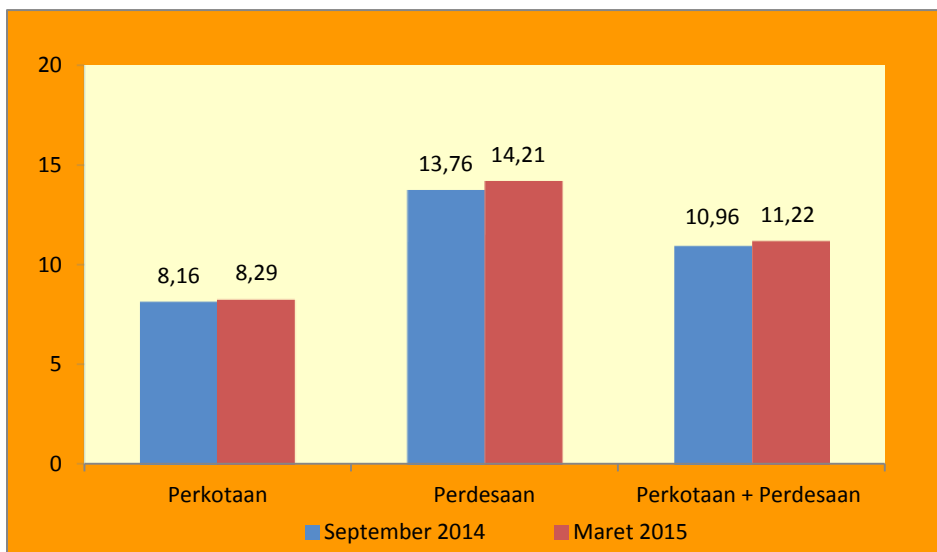
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2015

A. Perkembangan Kemiskinan September 2014–Maret 2015

- Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang (10,96 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1. dan Tabel 16.1.

**Jumlah penduduk miskin pada
Maret 2015 sebanyak 28,59
juta orang**

Grafik 16.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2014–Maret 2015



- Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat lebih banyak dibanding peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode September 2014–Maret 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 290 ribu orang, sementara di daerah perdesaan bertambah sekitar 570 ribu orang.

3. Pada Maret 2015, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,74 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada September 2014 sebesar 62,65 persen.

Tabel 16.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, September 2014–Maret 2015

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
September 2014	228 534	98 319	326 853	10,36	8,16
Maret 2015	238 278	104 263	342 541	10,65	8,29
Perdesaan					
September 2014	229 391	67 290	296 681	17,37	13,76
Maret 2015	245 357	72 524	317 881	17,94	14,21
Perkotaan+Perdesaan					
September 2014	229 469	82 859	312 328	27,73	10,96
Maret 2015	242 241	88 535	330 776	28,59	11,22

Beberapa faktor terkait bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2014–Maret 2015 adalah:

- Selama periode September 2014–Maret 2015 terjadi inflasi sebesar 4,03 persen.
- Secara nasional, rata-rata harga beras mengalami peningkatan sebesar 14,48 persen yaitu dari Rp11.433,- per kg pada September 2014 menjadi Rp13.089,- per kg pada Maret 2015.
- Selama periode September 2014–Maret 2015, selain beras harga eceran beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan seperti cabe rawit serta gula pasir, yaitu masing-masing naik sebesar 26,28 persen dan 1,92 persen.
- Secara riil, rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2015 turun sebesar 1,34 persen dibanding upah buruh tani September 2014, yaitu dari Rp 39.045,- menjadi Rp 38.522,-.
- Tingkat inflasi perdesaan periode September 2014–Maret 2015 sebesar 4,40 persen.

B. Perubahan Garis Kemiskinan September 2014–Maret 2015

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode September 2014–Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,91 persen, yaitu dari Rp312.328,- per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp330.776,- per kapita per bulan pada Maret 2015. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,23 persen pada bulan Maret 2015.
2. Pada Maret 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan gula pasir. Demikian juga untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan hampir sama antara daerah perkotaan dan perdesaan, seperti perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 16.2.

Tabel 16.2
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2015

Komoditi	Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Beras	23,49	Beras	32,88
Rokok kretek filter	8,24	Rokok kretek filter	7,07
Telur ayam ras	3,59	Gula pasir	2,96
Daging ayam ras	2,95	Telur ayam ras	2,91
Mie instan	2,77	Mie instan	2,44
Gula pasir	2,04	Kopi	1,82
Roti manis/roti lainnya	1,96	Tempe	1,68
Tempe	1,89	Bawang merah	1,68
Tahu	1,80	Tahu	1,52
Kopi	1,74	Daging ayam ras	1,51
Bukan Makanan			
Perumahan	9,52	Perumahan	6,64
Bensin	3,15	Bensin	2,38
Listrik	3,02	Listrik	1,73
Pendidikan	2,46	Pendidikan	1,39
Perlengkapan mandi	1,50	Kayu bakar	1,27

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode September 2014–Maret 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2014 adalah 1,75 dan pada Maret 2015 mengalami kenaikan menjadi 1,97, demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,44 menjadi 0,54 pada periode yang sama (Tabel 16.3).

Tabel 16.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Indonesia Menurut Daerah, September 2014–Maret 2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2014	1,25	2,25	1,75
Maret 2015	1,40	2,55	1,97
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
September 2014	0,31	0,57	0,44
Maret 2015	0,36	0,71	0,54

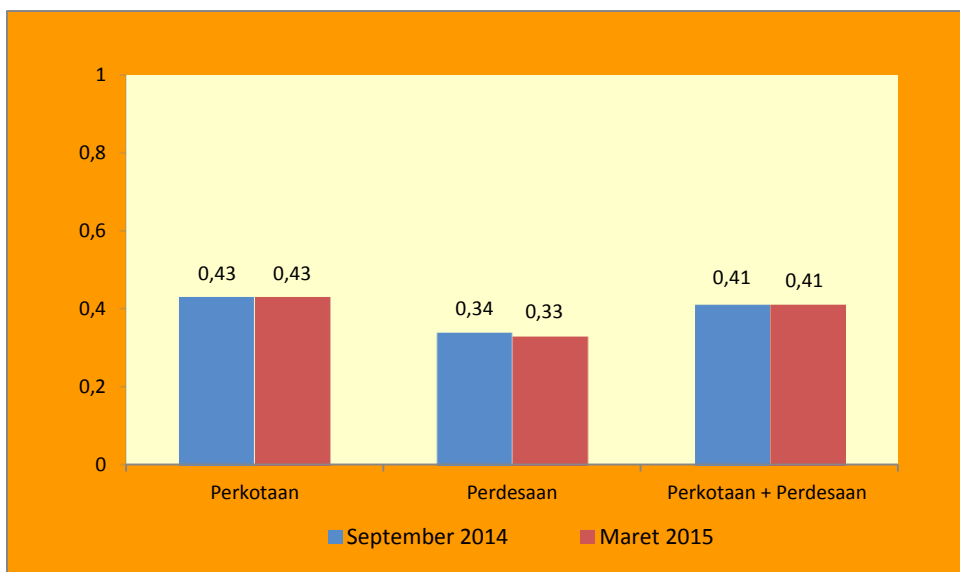
3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,40 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,55. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan adalah 0,36 sementara di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,71.

D. Perkembangan Gini Rasio September 2014–Maret 2015

1. Tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio.

Gini Rasio pada Maret 2015 adalah sebesar 0,41
2. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.
3. Pada Maret 2015, nilai Gini Rasio adalah sebesar 0,41, angka ini relatif tidak berubah apabila dibandingkan dengan kondisi September 2014. Apabila dilihat menurut daerah, maka nilai Gini Rasio untuk daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan nilai Gini Rasio di daerah perdesaan. Pada Maret 2015 nilai Gini Rasio di daerah perdesaan adalah 0,33, sementara untuk daerah perkotaan mencapai 0,43.

Grafik 16.2
Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah,
September 2014–Maret 2015



4. Provinsi dengan nilai Gini Rasio paling tinggi pada Maret 2015 adalah Provinsi Papua Barat dengan Gini Rasio sebesar 0,44, sedangkan Provinsi Maluku Utara dan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nilai Gini Rasio paling rendah yaitu sebesar 0,28.

Tabel 16.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total	
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	410 414	157,57	11,13	382 117	694,01	19,44	851,58	17,08
Sumatera Utara	364 320	699,30	10,16	331 895	764,37	10,89	1 463,67	10,53
Sumatera Barat	406 335	118,03	5,73	369 753	261,58	8,35	379,61	7,31
Riau	404 802	166,45	6,79	395 659	364,94	9,46	531,39	8,42
Jambi	406 074	119,54	11,60	316 838	181,17	7,67	300,71	8,86
Sumatera Selatan	365 336	390,87	13,62	305 581	754,76	14,60	1 145,63	14,25
Bengkulu	397 489	103,13	17,79	372 171	230,94	17,93	334,07	17,88
Lampung	370 839	233,27	10,94	326 283	930,22	15,56	1 163,49	14,35
Bangka Belitung	475 478	20,13	2,98	501 532	53,96	7,75	74,09	5,40
Kepulauan Riau	454 147	89,48	5,46	420 638	32,92	10,23	122,4	6,24
DKI Jakarta	487 388	398,92	3,93	-	-	-	398,92	3,93
Jawa Barat	307 487	2 638,38	8,43	305 618	1 797,32	11,82	4 435,70	9,53
Jawa Tengah	299 011	1 837,19	11,85	296 864	2 739,85	15,05	4 577,04	13,58
DI Yogyakarta	347 787	329,65	13,43	312 249	220,57	17,85	550,22	14,91
Jawa Timur	304 918	1 524,62	8,19	305 404	3 264,50	16,18	4 789,12	12,34
Banten	344 855	408,53	5,03	318 497	293,87	7,78	702,4	5,90
Bali	332 999	109,80	4,31	304 005	86,92	5,44	196,72	4,74
Nusa Tenggara Barat	328 125	391,88	19,24	304 068	432,01	15,53	823,89	17,10
Nusa Tenggara Timur	364 920	116,16	11,28	281 022	1 043,68	25,46	1 159,84	22,61
Kalimantan Barat	334 575	82,05	5,62	318 792	301,65	9,09	383,7	8,03
Kalimantan Tengah	328 674	41,32	4,86	360 670	106,38	6,50	147,7	5,94
Kalimantan selatan	354 103	65,96	3,91	331 966	132,48	5,78	198,44	4,99
Kalimantan Timur	485 887	86,82	4,03	452 999	126,06	9,96	212,88	6,23
Kalimantan Utara	489 129	13,05	3,67	458 490	26,64	9,49	39,69	6,24
Sulawesi Utara	290 820	60,71	5,52	299 177	147,83	11,27	208,54	8,65
Sulawesi Tengah	358 399	77,97	10,93	331 855	343,66	15,90	421,63	14,66
Sulawesi Selatan	262 163	146,42	4,61	240 175	651,3	12,23	797,72	9,39
Sulawesi Tenggara	269 703	52,06	7,24	252 636	269,82	15,19	321,88	12,90
Gorontalo	263 288	25,37	6,48	263 846	181,48	24,62	206,85	18,32
Sulawesi Barat	257 004	27,39	10,52	263 110	133,09	12,87	160,48	12,40
Maluku	400 347	51,77	7,91	399 176	276,64	26,90	328,41	19,51
Maluku Utara	360 933	12,25	3,85	337 789	67,65	7,95	79,9	6,84
Papua Barat	452 022	19,34	5,86	435 207	206,03	37,97	225,37	25,82
Papua	440 697	37,27	4,61	388 095	821,88	36,66	859,15	28,17
INDONESIA	342 541	10 652,65	8,29	317 881	17 940,18	14,21	28 592,83	11,22

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015

Tabel 16.5
Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, September 2014–Maret 2015

Provinsi	September 2014			Maret 2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,38	0,28	0,34	0,37	0,29	0,33
Sumatera Utara	0,33	0,28	0,31	0,36	0,30	0,34
Sumatera Barat	0,35	0,28	0,33	0,36	0,30	0,34
Riau	0,41	0,32	0,38	0,39	0,33	0,36
Jambi	0,35	0,32	0,34	0,38	0,34	0,36
Sumatera Selatan	0,40	0,32	0,38	0,39	0,31	0,36
Bengkulu	0,38	0,33	0,36	0,41	0,35	0,38
Lampung	0,38	0,28	0,33	0,40	0,35	0,38
Bangka Belitung	0,31	0,25	0,30	0,29	0,26	0,28
Kepulauan Riau	0,43	0,31	0,44	0,36	0,29	0,36
DKI Jakarta	0,44	–	0,44	0,43	–	0,43
Jawa Barat	0,41	0,29	0,40	0,43	0,32	0,41
Jawa Tengah	0,41	0,36	0,39	0,42	0,33	0,38
DI Yogyakarta	0,44	0,38	0,43	0,44	0,33	0,43
Jawa Timur	0,43	0,34	0,40	0,44	0,34	0,42
Banten	0,43	0,29	0,42	0,41	0,27	0,40
Bali	0,45	0,34	0,44	0,38	0,33	0,38
Nusa Tenggara Barat	0,45	0,31	0,39	0,40	0,33	0,37
Nusa Tenggara Timur	0,38	0,28	0,35	0,33	0,29	0,34
Kalimantan Barat	0,42	0,36	0,40	0,35	0,30	0,33
Kalimantan Tengah	0,40	0,33	0,36	0,37	0,29	0,33
Kalimantan selatan	0,35	0,29	0,33	0,38	0,30	0,35
Kalimantan Timur	0,36	0,30	0,36	0,31	0,29	0,32
Kalimantan Utara	–	–	–	0,30	0,27	0,29
Sulawesi Utara	0,45	0,37	0,44	0,39	0,32	0,37
Sulawesi Tengah	0,41	0,28	0,35	0,43	0,33	0,37
Sulawesi Selatan	0,43	0,43	0,45	0,42	0,38	0,42
Sulawesi Tenggara	0,44	0,36	0,40	0,41	0,37	0,40
Gorontalo	0,44	0,44	0,45	0,42	0,37	0,42
Sulawesi Barat	0,43	0,34	0,38	0,39	0,35	0,36
Maluku	0,31	0,29	0,33	0,31	0,32	0,34
Maluku Utara	0,35	0,26	0,32	0,28	0,26	0,28
Papua Barat	0,37	0,35	0,41	0,34	0,48	0,44
Papua	0,40	0,38	0,46	0,34	0,38	0,42
INDONESIA	0,43	0,34	0,41	0,43	0,33	0,41

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2014 dan Maret 2015

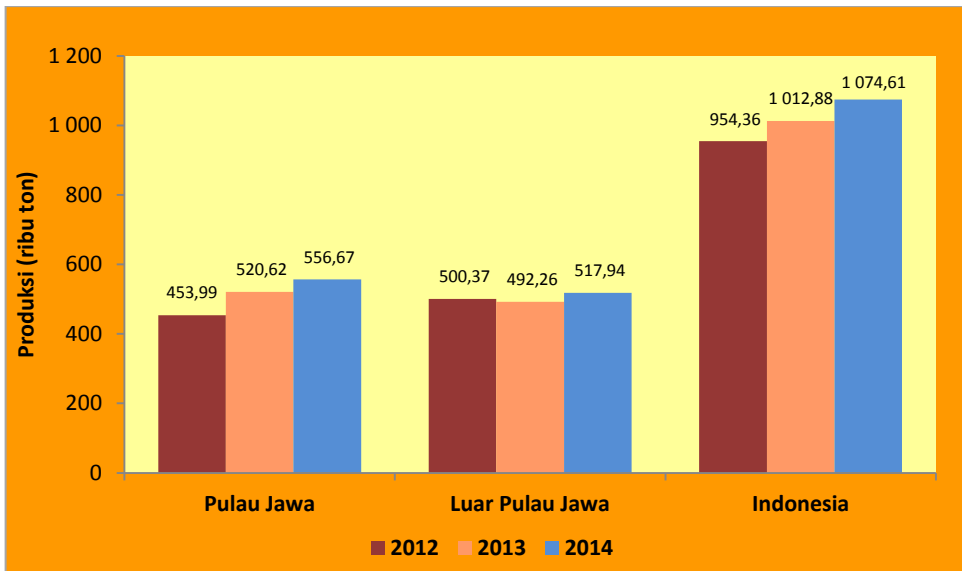
XVII.PRODUKSI HORTIKULTURA 2014

A. CABAI BESAR

1. Produksi cabai besar Indonesia tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi cabai besar tahun 2014 tersebut terjadi di Pulau Jawa sebesar 36,05 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 25,68 ribu ton.

Produksi cabai besar tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton

Grafik 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



2. Tahun 2014, persentase produksi cabai besar menurut wilayah di Pulau Jawa sebesar 51,80 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 48,20 persen. Dalam periode 2012–2014, produksi tertinggi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 556,67 ribu ton dan 517,94 ribu ton.
3. Pada periode tahun 2013–2014, peningkatan produksi cabai besar terjadi pada setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 17,97 ribu ton (6,77 persen), pada triwulan II sebesar 5,33 ribu ton (1,86 persen), triwulan III sebesar 23,11 ribu ton (9,02 persen), dan triwulan IV sebesar 15,33 ribu ton (7,51 persen).

Tabel 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	453 990	520 616	556 671	66 626	14,68	36 055	6,93
Luar Pulau Jawa	500 373	492 263	517 940	-8 110	-1,62	25 677	5,22
Indonesia	954 363	1 012 879	1 074 611	58 516	6,13	61 732	6,09
Triwulan							
Triwulan I	264 887	265 446	283 411	559	0,21	17 965	6,77
Triwulan II	255 277	287 063	292 390	31 786	12,45	5 327	1,86
Triwulan III	235 559	256 319	279 433	20 760	8,81	23 114	9,02
Triwulan IV	198 640	204 051	219 377	5 411	2,72	15 326	7,51

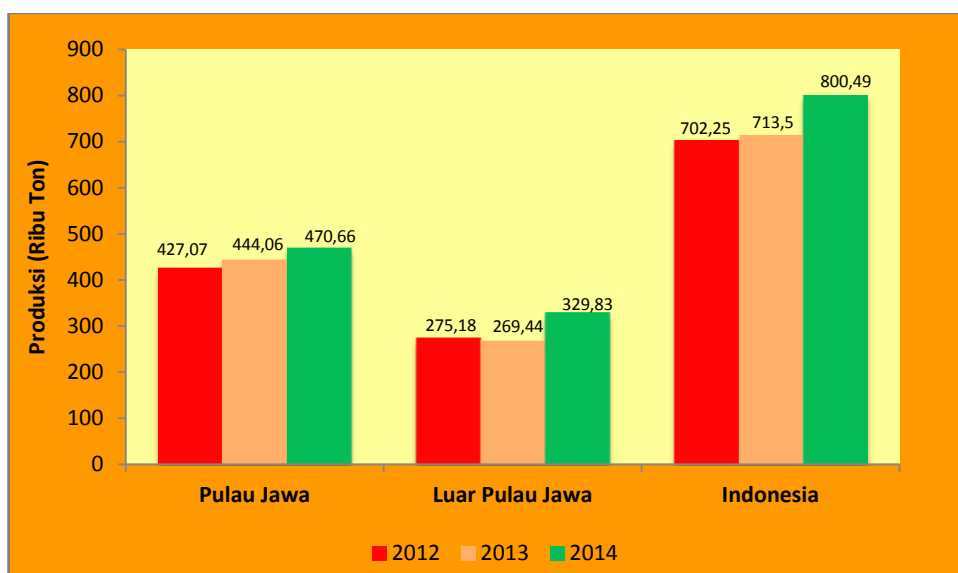
*Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai
Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting*

B. CABAI RAWIT

1. Produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 86,98 ribu ton (12,19 persen) dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 26,59 ribu ton (5,99 persen) dan di luar Pulau Jawa sebesar 60,39 ribu ton (22,41 persen).
2. Persentase produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 58,80 persen di Pulau Jawa dan 41,20 persen di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2012–2014, Pulau Jawa masih menjadi sentra produksi cabai rawit Indonesia. Produksi cabai rawit tertinggi terjadi pada tahun 2014 dibanding dua tahun sebelumnya, di Pulau Jawa sebesar 470,66 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 329,83 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 11,89 ribu ton (7,93 persen), triwulan II sebesar 36,28 ribu ton (18,77 persen), triwulan III sebesar 38,73 ribu ton (20,50 persen), dan triwulan IV sebesar 81 ton (0,04 persen).

**Produksi cabai rawit tahun
2014 sebesar 0,800 juta ton**

Grafik 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



Tabel 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	427 068	444 062	470 655	16 994	3,98	26 593	5,99
Luar Pulau Jawa	275 184	269 440	329 829	-5 744	-2,09	60 389	22,41
Indonesia	702 252	713 502	800 484	11 250	1,60	86 982	12,19
Triwulan							
Triwulan I	151 785	149 858	161 749	-1 927	-1,27	11 891	7,93
Triwulan II	215 936	193 289	229 573	-22 647	-10,49	36 284	18,77
Triwulan III	186 691	188 898	227 624	2 207	1,18	38 726	20,50
Triwulan IV	147 840	181 457	181 538	33 617	22,74	81	0,04

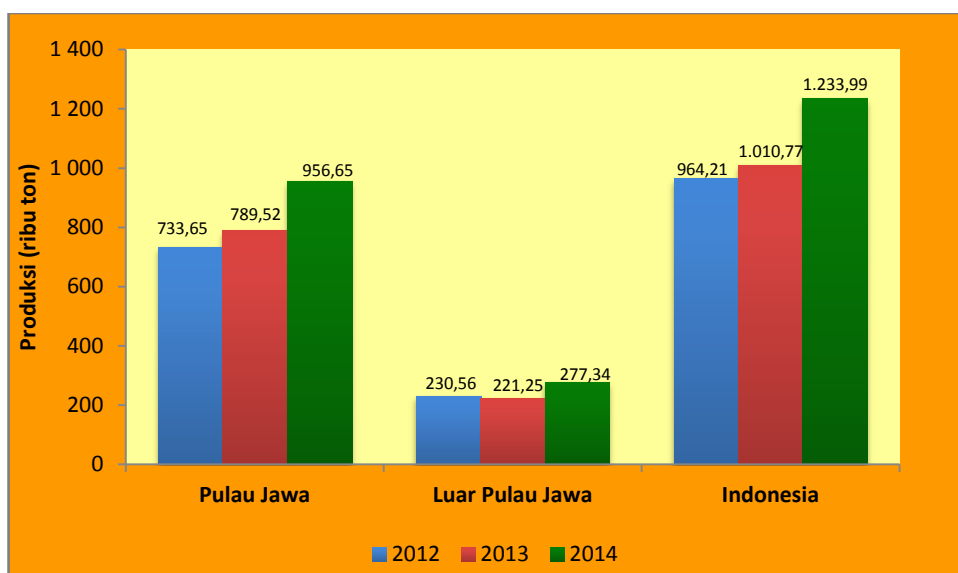
*Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai
 Cabai rawit terdiri dari cabai rawit merah dan cabai rawit hijau*

C. BAWANG MERAH

1. Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 223,22 ribu ton (22,08 persen) dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya produksi di Pulau Jawa sebesar 167,13 ribu ton atau sebesar 21,17 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 56,08 ribu ton atau sebesar 25,35 persen.
2. Persentase produksi bawang merah Indonesia tahun 2014 menurut wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebesar 77,53 persen dan 22,47 persen. Produksi tertinggi di Pulau Jawa dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 956,65 ribu ton. Produksi tertinggi di luar Pulau Jawa juga dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 277,34 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 30,82 ribu ton (12,69 persen), triwulan II sebesar 85,14 ribu ton (35,81 persen), triwulan III sebesar 38,02 ribu ton (12,70 persen), dan triwulan IV sebesar 69,23 ribu ton (30,00 persen).

Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton

Grafik 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



Tabel 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	733 657	789 520	956 653	55 863	7,61	167 133	21,17
Luar Pulau Jawa	230 564	221 253	277 336	- 9 311	-4,04	56 083	25,35
Indonesia	964 221	1 010 773	1 233 989	46 552	4,83	223 216	22,08
Triwulan							
Triwulan I	227 560	242 929	273 753	15 369	6,75	30 824	12,69
Triwulan II	231 068	237 753	322 892	6 685	2,89	85 139	35,81
Triwulan III	300 968	299 299	337 319	-1 669	-0,55	38 020	12,70
Triwulan IV	204 625	230 792	300 025	26 167	12,79	69 233	30,00

Keterangan: Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun

XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014

A. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI TAHUN 2014

A.1 PADI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebesar Rp12,7 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi sawah yang terbesar adalah upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 48,23 persen dari total biaya atau sebesar Rp 6,1 juta (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp17,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi sawah sebesar Rp12,7 juta**

Tabel 18.1
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014

Uraian	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	17 174,66	-	10 249,76	-
B. Biaya Produksi	12 677,27	100,00	7 821,90	100,00
1. Bibit/Benih	406,97	3,21	282,23	3,61
2. Pupuk	1 318,60	10,40	607,27	7,76
3. Pesticida	233,96	1,85	135,33	1,73
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	6 114,71	48,23	4 877,45	62,36
5. Sewa Lahan	3 785,42	29,86	1 387,50	17,74
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	328,92	2,59	175,30	2,24
7. Bahan Bakar	86,48	0,68	70,99	0,91
8. Lainnya	402,22	3,17	285,82	3,65

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp7,8 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi ladang yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 62,36 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,9 juta. (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp 10,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi ladang sebesar Rp 7,8 juta**

A.2 JAGUNG

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman jagung yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 44,93 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta. (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp12,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta

Tabel 18.2
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014

Uraian	Jagung		Kedelai	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	12 045,23	-	9 020,14	-
B. Biaya Produksi	9 140,12	100,00	9 136,50	100,00
1. Bibit/Benih	728,59	7,97	628,06	6,87
2. Pupuk	1 096,30	11,99	433,62	4,75
3. Pestisida	110,88	1,21	200,87	2,20
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	4 106,99	44,93	4 095,18	44,82
5. Sewa Lahan	2 532,35	27,71	3 255,84	35,64
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	172,50	1,89	164,69	1,80
7. Bahan Bakar	79,83	0,87	72,62	0,79
8. Lainnya	312,68	3,42	285,62	3,13

A.3 KEDELAI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman kedelai yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 44,82 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp9,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta

B. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, DAN JERUK TAHUN 2014

B.1 CABAI MERAH

- Total biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 47,74 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,1 juta.
- Biaya produksi tanaman cabai merah yang ditanam pada Musim Kemarau (MK) lebih tinggi dibandingkan dengan pada Musim Hujan (MH).

Tabel 18.3
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	83 935,48	–	63 692,23	–
B. Biaya Produksi	54 135,84	100,00	48 051,34	100,00
1. Benih	2 048,61	3,78	2 030,19	4,23
2. Pupuk	9 274,20	17,14	8 264,54	17,19
3. Pestisida	2 928,23	5,41	2 949,24	6,14
4. Bahan bakar	705,01	1,30	206,31	0,43
5. Jaring pelindung	51,47	0,10	22,59	0,05
6. Mulsa	3 174,66	5,86	3 426,54	7,13
7. Upah pekerja	26 257,40	48,50	22 125,04	46,05
8. Sewa lahan	5 126,78	9,47	4 837,84	10,06
9. Pengeluaran lainnya	4 569,48	8,44	4 189,05	8,72

B.2 CABAI RAWIT

- Total biaya produksi usaha tanaman cabai rawit per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp34,0 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 54,85 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp55,2 juta.
- Biaya produksi tanaman cabai rawit yang ditanam pada MK sebesar Rp37,2 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan pada MH sebesar Rp28,3 juta.

Tabel 18.4
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	63 352,41	-	40 660,34	-
B. Biaya Produksi	37 247,92	100,00	28 288,78	100,00
1. Benih	1 744,94	4,68	1 522,83	5,38
2. Pupuk	4 887,27	13,11	4 288,91	15,16
3. Pestisida	958,42	2,57	660,67	2,34
4. Bahan bakar	298,10	0,80	106,89	0,38
5. Jaring pelindung	13,90	0,04	26,34	0,09
6. Mulsa	915,26	2,46	587,71	2,08
7. Upah pekerja	20 689,82	55,54	15 061,49	53,23
8. Sewa lahan	5 263,37	14,14	4 091,63	14,47
9. Pengeluaran lainnya	2 476,84	6,66	1 942,31	6,87

B.3 BAWANG MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp67,2 juta. Biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,2 juta.
2. Pada tahun 2014, biaya produksi tanaman bawang merah yang ditanam pada MK (Rp64,6 juta) lebih rendah dibandingkan pada MH (Rp72,2 juta).

Tabel 18.5
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	86 575,83	-	59 833,57	-
B. Biaya Produksi	64 565,21	100,00	72 189,79	100,00
1. Benih	22 851,62	35,39	31 684,00	43,89
2. Pupuk	5 509,96	8,53	5 206,93	7,22
3. Pestisida	4 915,77	7,61	5 590,41	7,74
4. Bahan bakar	588,77	0,91	858,46	1,19
5. Jaring pelindung	27,93	0,04	23,01	0,03
6. Mulsa	571,09	0,89	599,50	0,83
7. Upah pekerja	20 185,58	31,27	20 697,02	28,68
8. Sewa lahan	6 830,34	10,58	5 180,37	7,18
9. Pengeluaran lainnya	3 084,15	4,78	2 350,09	3,24

B.4 JERUK

Total biaya produksi tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri mencapai Rp5,4 juta dan yang ditekankan mencapai Rp5,7 juta.

Persentase biaya produksi terbesar tanaman jeruk yang dipanen sendiri adalah upah pekerja sebesar 32,07 persen (Rp1,7 juta) dan yang ditebaskan adalah biaya untuk pupuk sebesar 28,41 persen (Rp1,6 juta). Nilai produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon yang dipanen sendiri dan ditebaskan masing-masing sebesar Rp10,1 juta dan Rp13,0 juta.

Tabel 18.6
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014

Uraian	Dipanen Sendiri		Ditebaskan	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	10 087,43	–	12 967,35	–
B. Biaya Produksi	5 441,21	100,00	5 666,30	100,00
1. Benih	195,35	3,59	119,65	2,11
2. Pupuk	1 078,92	19,82	1 609,97	28,41
3. Pestisida	402,93	7,41	558,95	9,86
4. Bahan bakar	52,91	0,97	117,02	2,07
5. Jaring pelindung	2,63	0,05	4,90	0,09
6. Mulsa	3,56	0,07	0,30	0,01
7. Upah pekerja	1 744,85	32,07	1 033,32	18,24
8. Sewa lahan	1 533,95	28,20	1 536,18	27,11
9. Pengeluaran lainnya	426,11	7,82	686,01	12,10

C. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN KELAPA SAWIT, KARET, DAN TEBU TAHUN 2014

Rata-rata biaya produksi usaha perkebunan tebu per hektar setahun mencapai 77,98 persen (Rp24,2 juta) dari nilai produksi. Sementara untuk komoditas karet mencapai 71,54 persen (Rp9,2 juta) dan kelapa sawit sebesar 57,05 persen (Rp9,7 juta). Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu.

Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu

Pada usaha perkebunan kelapa sawit sebagian besar biaya digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Demikian pula untuk usaha perkebunan karet, pengeluaran terbesar untuk tenaga kerja sebesar 57,09 persen.

Pada usaha perkebunan tebu pengeluaran terbesar adalah untuk sewa lahan sebesar 32,37 persen dari seluruh total biaya. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya untuk jasa pertanian relatif cukup besar yaitu mencapai 4,74 persen.

Tabel 18.7
Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014

Subsektor	Komoditas					
	Kelapa Sawit		Karet		Tebu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. A. Nilai Produksi	17 026,01	-	12 877,97	-	31 044,66	-
B. B. Biaya Produksi	9 712,16	100,00	9 211,69	100,00	24 214,17	100,00
1. Benih/Penyisipan/Tanaman Pelindung	106,95	1,10	83,68	0,91	3 055,32	12,62
2. Pupuk	1 791,14	18,44	300,64	3,27	2 913,26	12,04
3. Stimulan	4,97	0,05	5,56	0,06	20,03	0,08
4. Pestisida	225,95	2,33	104,99	1,14	83,70	0,34
5. Tenaga Kerja	3 079,94	31,71	5 259,37	57,09	6 346,06	26,21
6. Sewa Lahan	3 008,30	30,97	2 244,74	24,37	7 838,92	32,37
7. Sewa Alat dan Sarana	231,72	2,38	183,12	1,99	259,86	1,07
8. Jasa Pertanian	156,35	1,61	48,31	0,52	1 147,87	4,74
9. Pengeluaran Lainnya	1 106,84	11,41	981,28	10,65	2 549,15	10,53

D. STRUKTUR ONGKOS USAHA SAPI POTONG, SAPI PERAH, AYAM RAS PETELUR, DAN AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2014

D.1 SAPI POTONG

1. Total biaya produksi usaha sapi potong di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp3,6 juta. Sebagian besar biaya digunakan untuk pakan Rp2,1 juta per ekor per tahun (57,78 persen) dan biaya pekerja Rp1,2 juta per ekor per tahun (33,53 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp.71 ribu per ekor per tahun dan Rp123 ribu per ekor per tahun, sedangkan sisa biaya lainnya adalah untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen)

2. Dengan nilai produksi sebesar Rp4,1 juta per ekor per tahun maka usaha peternakan sapi potong mendapat keuntungan Rp523 ribu per ekor per tahun. Pada umumnya sebagian kegiatan pengusahaan sapi potong dilakukan sendiri oleh peternak dan pakan ternak tidak membeli.

Tabel 18.8
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014

Uraian	Sapi Potong		Sapi Perah	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	4 115	–	7 753	–
B. Biaya Produksi	3 592	100,00	5 596	100,00
1. Upah Pekerja	1 204	33,53	1 373	24,53
2. Pakan	2 075	57,78	3 723	66,52
Hijauan Pakan Ternak	1 662	46,27	2 007	35,86
Pakan Buatan Pabrik	45	1,24	904	16,16
Pakan Lainnya	369	10,27	812	14,50
3. Bahan Bakar Minyak	69	1,91	126	2,25
4. Listrik	18	0,50	22	0,39
5. Air	32	0,88	28	0,51
6. Pemeliharaan Kesehatan	71	1,97	77	1,37
7. Pengeluaran Lain-lain	123	3,43	248	4,43

D.2 SAPI PERAH

1. Total biaya produksi usaha sapi perah di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp5,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp3,7 juta per ekor per tahun (66,52 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp1,4 juta per ekor per tahun (24,53 persen). Biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp77 ribu per ekor per tahun (1,37 persen) dan Rp248 ribu per ekor per tahun (4,43 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen)

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp7,8 juta per ekor per tahun, maka peternak sapi perah mendapat keuntungan Rp2,2 juta per ekor per tahun.

D.3 AYAM RAS PETELUR

1. Total biaya produksi usaha ayam ras petelur untuk 1.000 ekor dalam setahun membutuhkan Rp123,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu Rp103,3 juta per 1.000 ekor per tahun (83,58 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp12,5 juta per 1.000 ekor per tahun (10,14 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp3,1 juta per 1.000 ekor per tahun (2,47 persen) dan Rp2,7 juta per 1.000 ekor per tahun (2,15 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.
2. Dengan nilai produksi mencapai Rp146 juta per 1.000 ekor per tahun, maka peternak ayam ras petelur mendapat keuntungan Rp22,3 juta per 1.000 ekor per tahun. Produktivitas ayam ras petelur mencapai 703 butir per 1.000 ekor per hari. Dalam setahun, rata-rata periode produksi telur selama 261 hari, sedangkan rata-rata rontok bulu selama 43 hari.

Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen)

D.4 AYAM RAS PEDAGING

1. Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging untuk 5.000 ekor membutuhkan Rp113,2 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp73,2 juta per 5.000 ekor (64,69 persen) dan pembelian *Day Old Chick* (DOC) sebesar Rp21,9 juta per 5.000 ekor (19,36 persen). Selain itu, biaya untuk pekerja sebesar Rp10,8 juta per 5.000 ekor (9,57 persen), pemeliharaan kesehatan sebesar Rp2 juta per 5.000 ekor (1,81 persen), dan biaya lain-lain Rp3,7 juta per 5.000 ekor

Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen)

(3,30 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp158 juta per 5.000 ekor, peternak ayam ras pedaging mendapat keuntungan Rp44,8 juta per 5.000 ekor. Rumah tangga usaha ayam ras pedaging rata-rata memelihara 5,11 siklus setahun, dengan rata-rata lama siklus 40 hari, dan rata-rata bobot ayam per ekor 1,69 kg.

Tabel 18.9
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014

Uraian	Ayam Ras Petelur		Ayam Ras Pedaging	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 1.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 5.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	145 970	-	158 001	-
B. Biaya Produksi	123 640	100,00	113 239	100,00
1 Upah Pekerja	12 534	10,14	10 838	9,57
2 Pakan	103 336	83,58	73 248	64,69
- Biji-bijian	18 484	14,95	620	0,55
- Pakan Buatan Pabrik	53 027	42,89	69 079	61,00
- Pakan Lainnya	31 825	25,74	3 549	3,14
3 Bahan Bakar Minyak (BBM)	885	0,72	593	0,52
4 Listrik	727	0,59	488	0,43
5 Air	438	0,35	366	0,32
6 Pemeliharaan Kesehatan	3 055	2,47	2 050	1,81
7 Pengeluaran Lain-lain	2 665	2,15	3 735	3,30
8 Pembelian <i>Day Old Chick</i> (DOC)	-	-	21 921	19,36

E. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERIKANAN TAHUN 2014

E.1 BUDIDAYA IKAN

1. Jumlah biaya per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen), Rp4,2 juta (71,91 persen), dan Rp3,2 juta (44,16 persen) terhadap nilai produksi. Keuntungan yang diperoleh sebesar masing-masing sebesar Rp7,8 juta (51,64 persen), Rp1,6 juta (28,09 persen), dan Rp4,1 juta (55,84 persen).
2. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit yang mencapai Rp3 juta (41,33 persen), diikuti upah pekerja sebesar Rp2,5 juta (33,60 persen). Biaya terbesar usaha bandeng adalah untuk upah pekerja yang mencapai Rp965 ribu (23,21 persen) diikuti sewa lahan sebesar Rp960 ribu (23,08 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha udang windu adalah upah pekerja yang mencapai Rp796 ribu (24,73 persen) diikuti oleh biaya sewa lahan sebesar Rp758 ribu (23,56 persen).

Tabel 18.10
Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus
Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014

Uraian	Rumput Laut		Bandeng		Udang Windu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Nilai Produksi	15 182,9	-	5 784,24	-	7 290,35	-
B. Biaya Produksi	7 342,8	100,00	4 159,74	100,00	3 219,76	100,00
- Benih/Bibit	3 034,7	41,30	480,28	11,54	553,68	17,20
- Pupuk dan Obat-obatan	2,9	0,04	482,71	11,61	286,01	8,89
- Pakan	0,1	0,00	716,37	17,22	331,86	10,31
- Upah Pekerja	2 467,4	33,60	965,31	23,21	795,98	24,73
- Sewa Lahan	361,5	4,92	960,23	23,08	758,43	23,56
- Alat/Sarana Usaha	304,4	4,15	83,85	2,02	78,95	2,45
- Lainnya	1 171,8	15,96	470,99	11,32	414,70	12,88

E.2 PENANGKAPAN IKAN

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing mencapai Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen) diikuti oleh

biaya BBM masing-masing sebesar Rp876 ribu (21,21 persen) dan Rp96 ribu (21,93 persen).

Tabel 18.11
Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut
Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014

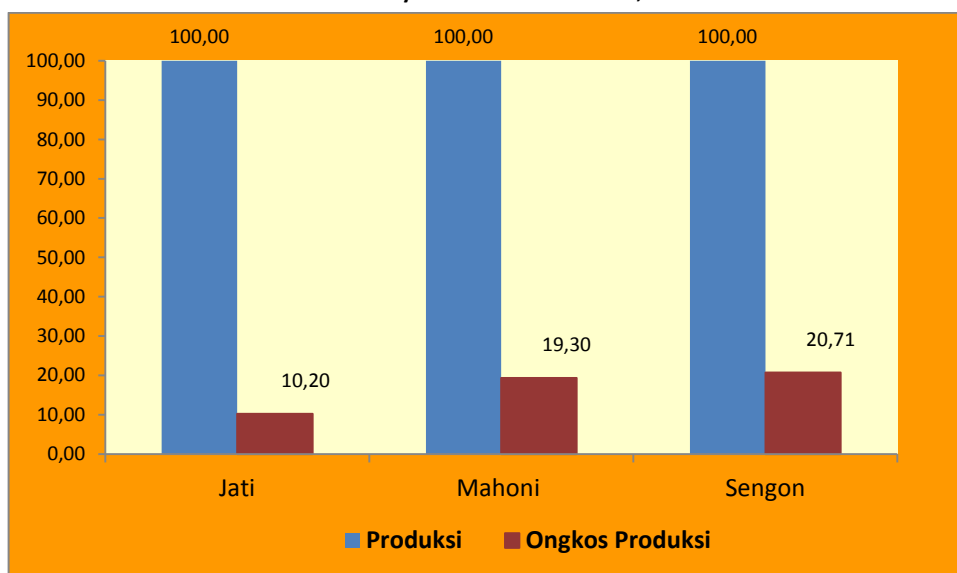
Uraian	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Produksi Hasil Penangkapan	6 211	-	813	-
B. Biaya Penangkapan	4 133	100,00	436	100,00
-Upah/gaji pekerja	1 692	40,94	177	40,47
-BBM	876	21,21	96	21,93
-Oli/Pelumas	72	1,73	13	2,93
-Garam/Es	181	4,37	15	3,55
-Perbekalan	661	15,99	64	14,58
-Sewa sarana/alat	213	5,16	19	4,28
-Pemeliharaan sarana/alat	140	3,40	14	3,15
-Penyusutan barang modal	151	3,66	16	3,74
-Biaya lainnya	146	3,53	23	5,37

F. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN JATI, MAHONI, DAN SENGON TAHUN 2014

1. Persentase ongkos produksi terhadap nilai produksi per 100 pohon untuk masing-masing tanaman jati, mahoni, dan sengon sebesar 10,20 persen, 19,30 persen, dan 20,71 persen (Gambar 18.1).
2. Pengeluaran terbesar untuk usaha tanaman kehutanan adalah untuk upah pekerja. Upah pekerja untuk usaha tanaman jati, mahoni dan sengon masing-masing sebesar 63,99 persen, 63,00 persen, dan 59,00 persen dari total pengeluaran/ongkos produksi (Tabel 18.12).

Total pengeluaran/ ongkos produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, sengon lebih dari Rp 0,5 juta

Grafik 18.1
Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014



Tabel 18.12
Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014

Uraian	Komoditas					
	Jati		Mahoni		Sengon	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Produksi	8 791,18	-	6 069,90	-	3 963,07	-
B. Ongkos Produksi	896,42	100,00	1 171,57	100,00	820,60	100,00
1. Pupuk	61,31	6,84	66,50	5,68	129,67	15,80
2. Pestisida	10,78	1,20	22,60	1,93	23,37	2,85
3. Upah Pekerja	573,63	63,99	738,13	63,00	484,17	59,00
a. Pemeliharaan/penyiangan	459,01	51,21	608,67	51,95	347,84	42,39
b. Pemupukan	35,55	3,97	50,53	4,31	76,41	9,31
c. Pengendalian OPT	7,22	0,81	21,40	1,83	15,30	1,86
d. Pemanenan/penebangan	71,84	8,01	57,53	4,91	44,61	5,44
4. Jasa Pertanian	55,58	6,20	83,09	7,09	35,33	4,31
5. Penyusutan Barang Modal	31,18	3,48	31,58	2,70	22,03	2,68
6. Sewa Alat Tanpa Operator	18,22	2,03	9,20	0,79	2,74	0,33
7. Sewa Lahan dan Bunga Modal	9,83	1,10	35,44	3,02	23,14	2,82
8. Pengeluaran Lainnya	135,90	15,16	185,04	15,79	100,15	12,20

G. KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2014

1. Jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2014 sebanyak 8.643.228 rumah tangga; 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan. Dari yang menguasai lahan kawasan hutan tersebut, 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah.

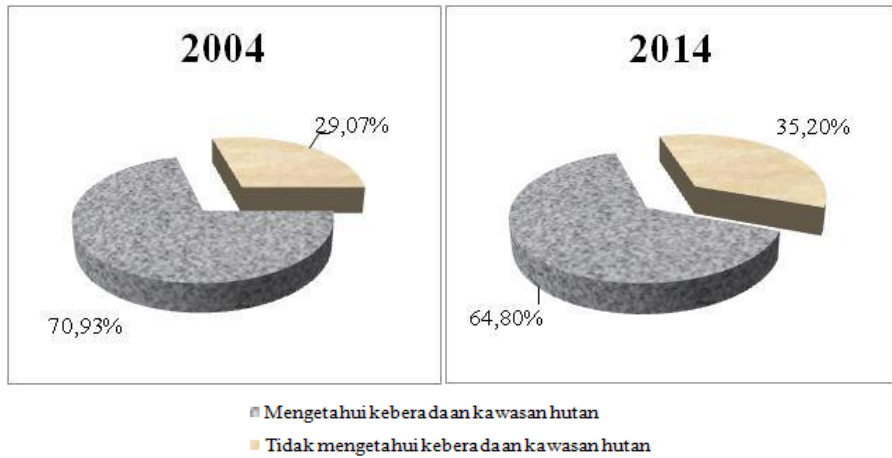
Persentase rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan sebesar 20,39 persen

2. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengetahui keberadaan kawasan hutan sebesar 64,80 persen dan tidak mengetahui sebesar 35,20 persen. Terjadi penurunan dari tahun 2004, hal ini dapat disebabkan karena kawasan hutan tidak semuanya berupa hutan tegakan/tumbuhan yang ada kayunya namun ada yang berupa padang savana (padang rumput) (Grafik 18.2).

Tabel 18.13
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014

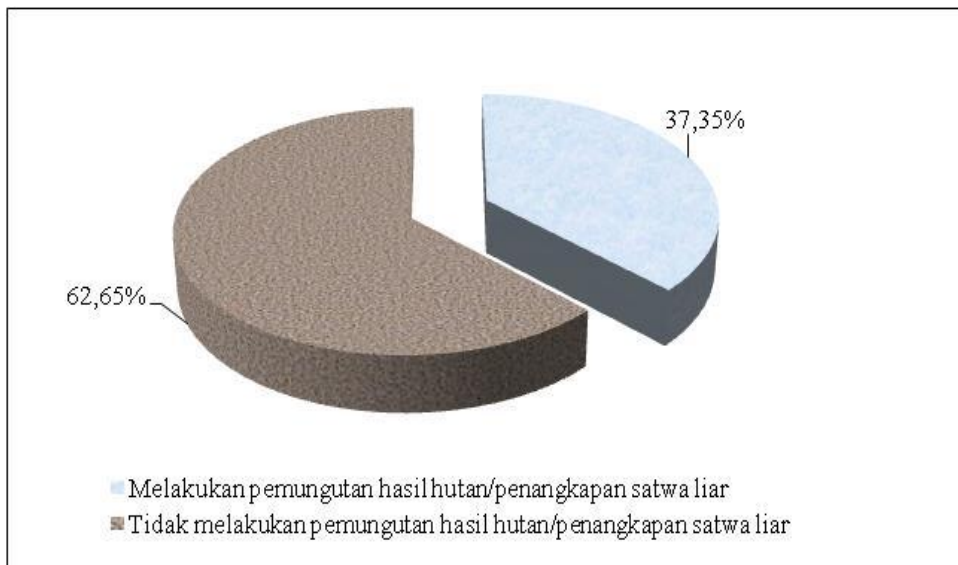
Uraian	Tahun	
	2004	2014
(1)	(2)	(3)
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan	7 804 970	8 643 228
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan berpindah	259 959	242 866
Persentase	3,33%	2,81%

Grafik 18.2
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014



- Hutan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dari hasil Survei Kehutanan 2014 (SKH 2014) rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar sebanyak 37,35 persen.

Grafik 18.3
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014

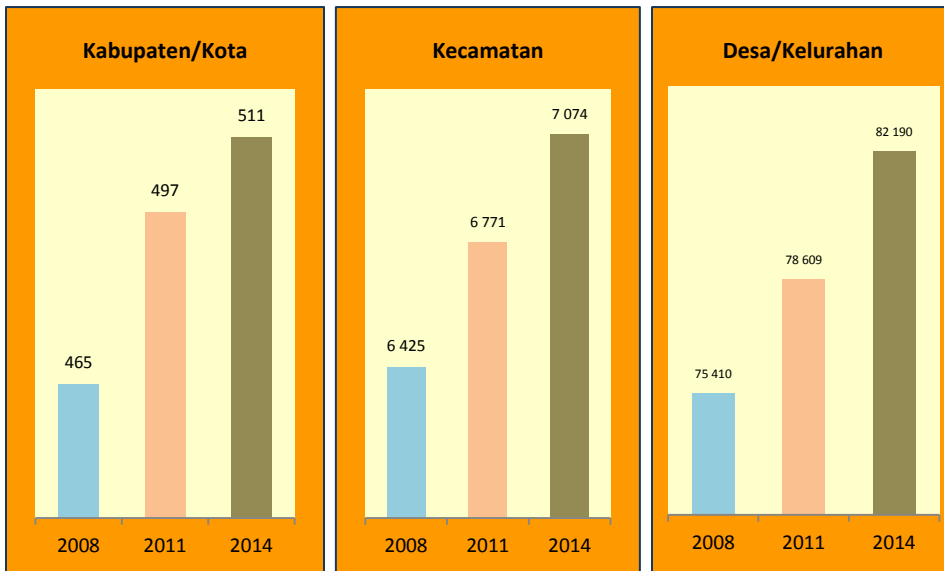


XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014

A. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan desa. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 82.190 wilayah setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa⁵, 8.412 kelurahan, dan 69 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Grafik 19.1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014



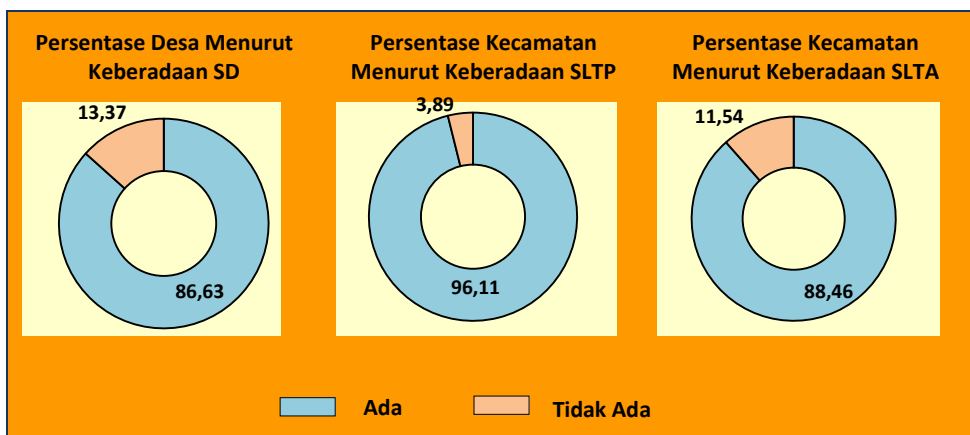
⁵ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

B. Infrastruktur

B.1 Pendidikan

1. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 86,63 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) yang tidak mempunyai SD. Untuk desa/kelurahan tanpa SD, 2.438 desa/kelurahan (22,19 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SD terdekat lebih dari 3 km.
2. Sarana pendidikan SLTP telah ada di 6.799 kecamatan (96,11 persen). Sehingga, masih terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) yang tidak ada SLTP. Untuk kecamatan tanpa SLTP, sebanyak 184 kecamatan (66,91 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTP terdekat lebih dari 6 km.
3. Sarana pendidikan SLTA telah ada di 88,46 persen kecamatan. Sehingga, masih terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) yang tidak ada SLTA. Untuk kecamatan tanpa SLTA, sebanyak 508 kecamatan (62,33 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km.

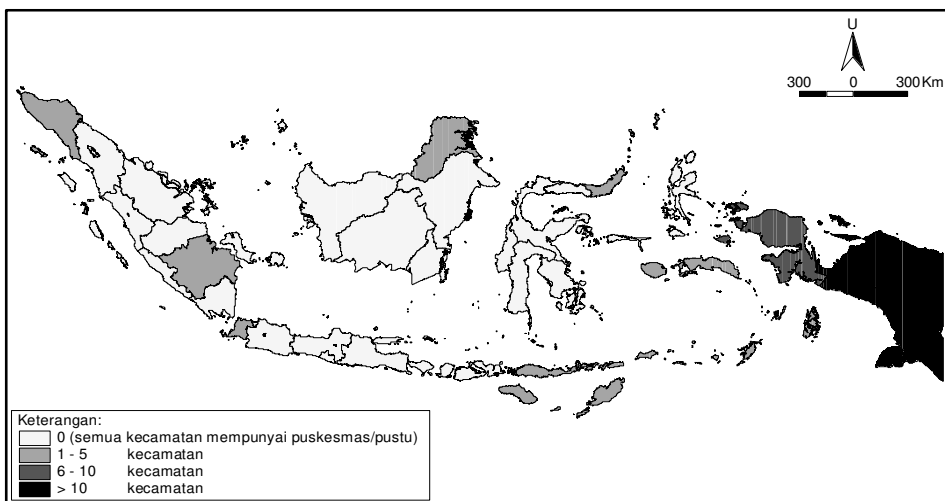
Grafik 19.2
Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014



B.2 Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan publik pemerintah. Podes 2014 menunjukkan bahwa 6.957 kecamatan (98,35 persen) telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 117 kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas/Pustu tersebar di 9 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lihat Lampiran 5.

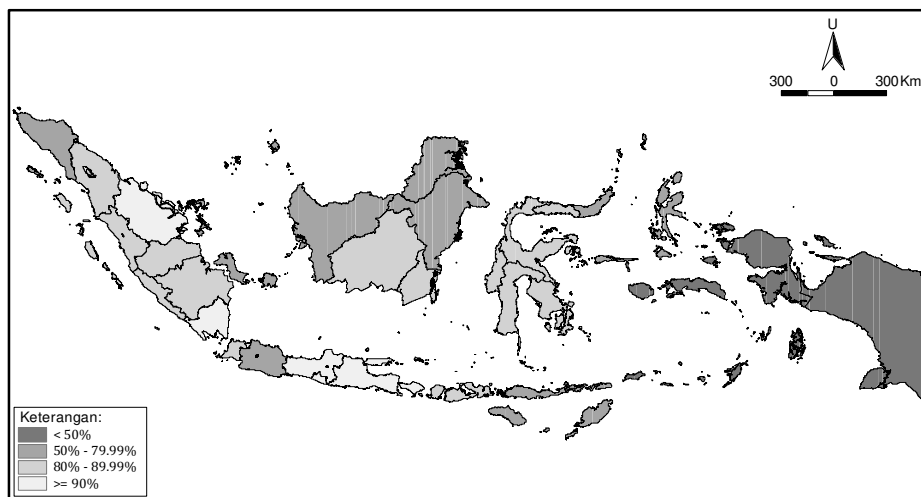
Grafik 19.3
Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014



B.3 Pasar dengan Bangunan

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian wilayah tersebut. Podes 2014 mencatat sebanyak 15.340 desa/kelurahan (18,66 persen) di 5.579 kecamatan, ternyata sudah ada pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). Masih terdapat 1.495 kecamatan (21,13 persen) yang tidak ada pasar dengan bangunan. Lihat Lampiran 7.

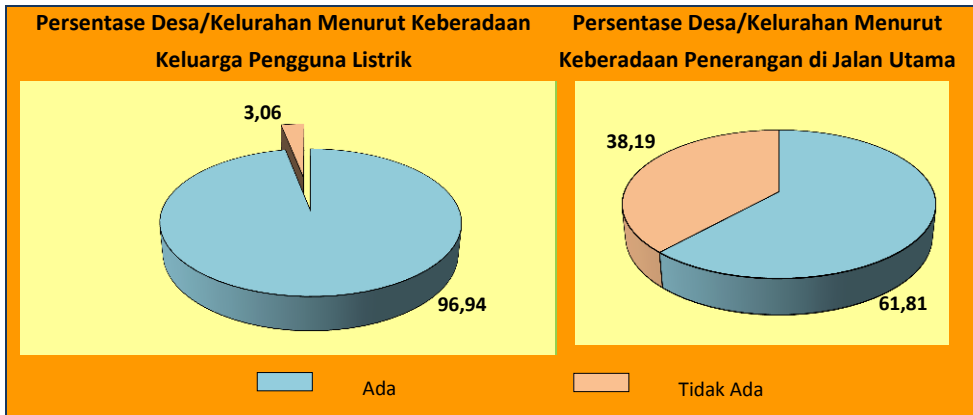
Grafik 19.4
Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014



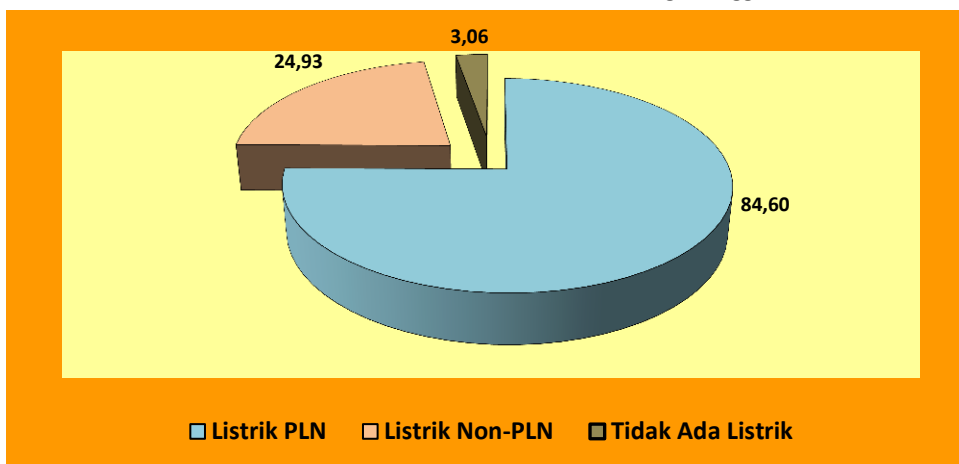
B.4 Listrik

1. Ketersediaan energi listrik sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 69.531 desa/kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna listrik PLN. Selain itu, ada 4 provinsi yang seluruh desa/kelurahannya yang sudah ada keluarga pengguna listrik PLN. Keempat provinsi tersebut, yaitu: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Lihat Lampiran 6.
2. Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) belum tersedia penerangan di jalan utama desa/kelurahan. Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak ada penerangan di jalan utama (diatas 90 persen).

Grafik 19.5
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama



Grafik 19.6
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik

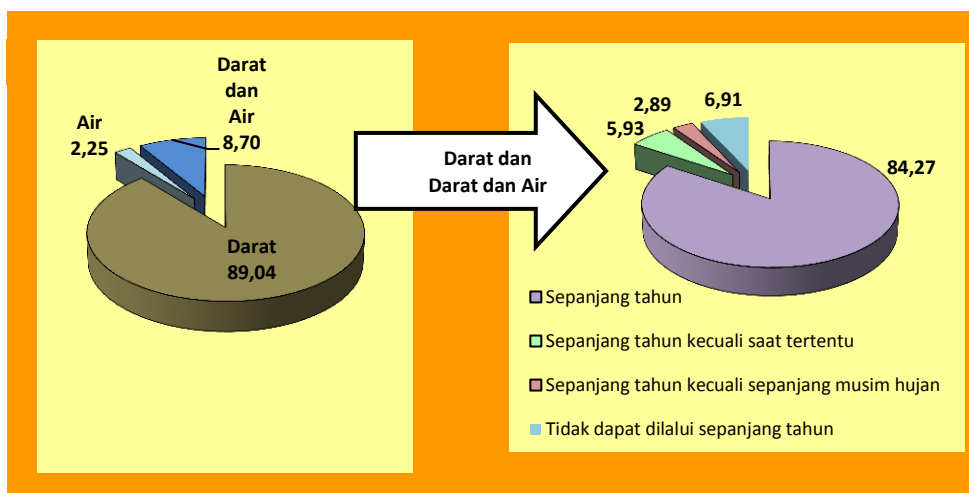


B.5 Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 80.337 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat, dimana 67.701 desa/kelurahan (84,27 persen) diantaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebaliknya, masih ada 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) yang lalu-lintasnya bergantung pada kondisi jalan dan musim. Lihat Lampiran 8.

Grafik 19.7

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih



C. Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain. Menurut Podes 2014, sebanyak 258 desa/kelurahan yang letaknya terdepan, berbatasan darat secara langsung dengan wilayah negara lain. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terdepan sebanyak 191.043 jiwa. Ke-256 desa/kelurahan tersebut berada di 67 kecamatan, 17 kabupaten, dan 5 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

Tabel 19.1
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan			
		Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Tenggara Timur	4	17	62	78 443
2	Kalimantan Barat	5	14	65	68 606
3	Kalimantan Timur	1	1	1	513
4	Kalimantan Utara	2	13	81	26 504
5	Papua	5	22	49	16 977
Indonesia		17	67	258	191 043

D. Desa/Kelurahan Terluar

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 mencantumkan sebanyak 92 pulau kecil terluar. Podes 2014 mencatat ada sebanyak 313 desa/kelurahan yang wilayahnya berada di dalam 77 pulau dari 92 pulau kecil terluar. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terluar sebanyak 375.883 jiwa. Sementara itu, ada 15 pulau kecil terluar yang bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan atau tanpa penduduk. Ke-15 pulau tersebut adalah Pulau Mega (Bengkulu); Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan (Jawa Timur); Pulau Manuk (Jawa Barat); Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur); Pulau Gosong Makasar (Kalimantan Utara); Pulau Sambit (Kalimantan Timur); Pulau Batarkusu dan Pulau Meatimjarang (Maluku); Pulau Jiew (Maluku Utara); Pulau Budd, Pulau Fani, dan Pulau Mioosu (Papua Barat); dan Pulau Laag (Papua). Secara lengkap, berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi.

Tabel 19.2
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Pulau Kecil Terluar		Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar			
		Menurut PP No 78 Tahun 2005	Ada Wilayah Desa/Kelurahan (Podes 2014)	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6	6	4	6	6	2 925
2	Sumatera Utara	3	3	3	3	8	4 077
3	Sumatera Barat	2	2	1	2	2	5 714
4	Riau	1	1	1	1	1	5 994
5	Bengkulu	2	1	1	1	6	3 001
6	Lampung	1	1	1	1	1	1 761
7	Kepulauan Riau	19	19	5	11	17	19 194
8	Jawa Barat	1	-	-	-	-	-
9	Jawa Tengah	1	1	1	2	2	21 831
10	Jawa Timur	3	-	-	-	-	-
11	Banten	1	1	1	1	1	6 194
12	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1	12 357
13	Nusa Tenggara Timur	5	4	4	14	123	150 027
14	Kalimantan Timur	2	1	1	1	4	3 677
15	Kalimantan Utara	2	1	1	5	19	37 734
16	Sulawesi Utara	11	11	5	7	18	8 484
17	Sulawesi Tengah	3	3	1	3	3	5 392
18	Maluku	18	16	3	15	72	71 134
19	Maluku Utara	1	-	-	-	-	-
20	Papua Barat	3	-	-	-	-	-
21	Papua	6	5	3	6	29	16 387
Indonesia		92	77	37	80	313	375 883

E. Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG)

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.
2. Tabel 19.3. menyajikan IKG setiap provinsi. IKG terendah sebesar 6,83 di desa Sudagaran (Jawa Tengah) dan IKG tertinggi sebesar 97,89 di desa Dorera (Papua). Nilai tengah IKG desa secara nasional adalah sebesar 40,91.

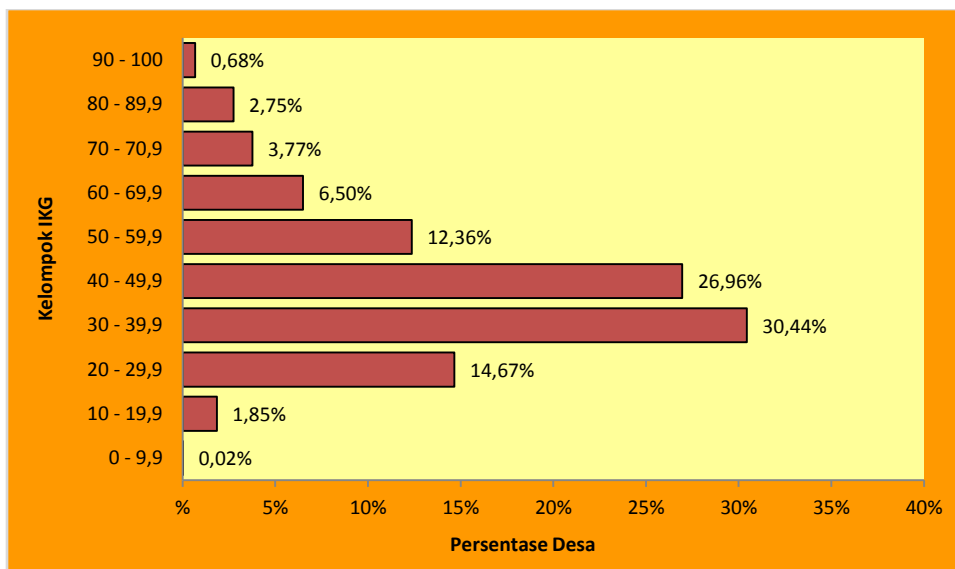
Tabel 19.3
IKG Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,10	44,65	79,90
Sumatera Utara	10,17	42,31	86,58
Sumatera Barat	12,51	33,19	87,49
Riau	14,38	40,24	77,64
Jambi	14,83	39,96	77,84
Sumatera Selatan	12,05	42,38	78,24
Bengkulu	16,66	42,65	80,55
Lampung	11,71	40,51	77,95
Kep. Bangka Belitung	15,95	34,17	70,04
Kepulauan Riau	18,28	45,60	77,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,42	32,58	82,37
Jawa Tengah	6,83	34,27	64,10
DI Yogyakarta	9,96	27,73	48,17
Jawa Timur	9,03	35,23	67,36
Banten	13,99	39,79	70,72
Bali	8,79	30,20	58,60
Nusa Tenggara Barat	16,41	35,69	67,96
Nusa Tenggara Timur	20,21	49,87	80,77
Kalimantan Barat	10,47	51,10	84,83
Kalimantan Tengah	16,42	46,94	90,52
Kalimantan Selatan	16,75	40,98	85,77

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Timur	14,78	42,61	90,20
Kalimantan Utara	19,82	59,47	87,98
Sulawesi Utara	9,54	40,21	75,81
Sulawesi Tengah	16,93	42,70	84,79
Sulawesi Selatan	14,44	36,95	80,11
Sulawesi Tenggara	19,09	48,52	79,59
Gorontalo	12,57	39,05	67,98
Sulawesi Barat	17,74	46,18	84,58
Maluku	15,11	51,91	88,24
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20
Papua Barat	18,42	65,43	96,02
Papua	17,05	76,33	97,89

3. Jika dibandingkan berdasarkan 10 kelompok, maka lebih dari 50 persen (57,40 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG antara 30 sampai dengan 50. Sementara itu, kurang dari 10 persen (7,20 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG di atas 70.

Grafik 19.8
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014



Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23	289	6 512
Sumatera Utara	33	440	6 104
Sumatera Barat	19	179	1 145
Riau	12	164	1 835
Jambi	11	138	1 551
Sumatera Selatan	17	231	3 237
Bengkulu	10	127	1 532
Lampung	15	225	2 632
Kep Bangka Belitung	7	47	381
Kepulauan Riau	7	66	415
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	626	5 962
Jawa Tengah	35	573	8 578
DI Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	664	8 502
Banten	8	155	1 551
Bali	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	116	1 141
Nusa Tenggara Timur	22	306	3 270
Kalimantan Barat	14	176	2 109
Kalimantan Tengah	14	136	1 569
Kalimantan Selatan	13	152	2 008
Kalimantan Timur	10	103	1 026
Kalimantan Utara	5	50	479
Sulawesi Utara	15	167	1 836
Sulawesi Tengah	13	172	1 986
Sulawesi Selatan	24	306	3 030
Sulawesi Tenggara	14	209	2 272
Gorontalo	6	77	736
Sulawesi Barat	6	69	648
Maluku	11	113	1 088
Maluku Utara	10	115	1 196
Papua Barat	13	175	1 567
Papua	29	529	4 871
INDONESIA	511	7 074	82 190

Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa	Kelurahan	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6 510	-	2	6 512
Sumatera Utara	5 406	695	3	6 104
Sumatera Barat	886	259	-	1 145
Riau	1 603	232	-	1 835
Jambi	1 389	162	-	1 551
Sumatera Selatan	2 851	385	1	3 237
Bengkulu	1 356	172	4	1 532
Lampung	2 423	206	3	2 632
Kep.Bangka Belitung	309	72	-	381
Kepulauan Riau	272	143	-	415
DKI Jakarta	-	267	-	267
Jawa Barat	5 321	641	-	5 962
Jawa Tengah	7 809	769	-	8 578
DI Yogyakarta	392	46	-	438
Jawa Timur	7 721	781	-	8 502
Banten	1 237	314	-	1 551
Bali	636	80	-	716
Nusa Tenggara Barat	995	142	4	1 141
Nusa Tenggara Timur	2 951	319	-	3 270
Kalimantan Barat	2 009	99	1	2 109
Kalimantan Tengah	1 427	138	4	1 569
Kalimantan Selatan	1 864	144	-	2 008
Kalimantan Timur	836	190	-	1 026
Kalimantan Utara	444	35	-	479
Sulawesi Utara	1 505	331	-	1 836
Sulawesi Tengah	1 809	174	3	1 986
Sulawesi Selatan	2 240	783	7	3 030
Sulawesi Tenggara	1 891	371	10	2 272
Gorontalo	657	72	7	736
Sulawesi Barat	575	71	2	648
Maluku	1 050	33	5	1 088
Maluku Utara	1 066	117	13	1 196
Papua Barat	1 492	75	-	1 567
Papua	4 777	94	-	4 871
INDONESIA	73 709	8 412	69	82 190

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD dan Kecamatan yang Ada SLTP dan SLTA Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa/Kelurahan yang Ada SD	Kecamatan yang Ada SLTP	Kecamatan yang Ada SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 358	289	281
Sumatera Utara	4 957	439	414
Sumatera Barat	1 100	179	170
Riau	1 779	164	164
Jambi	1 457	137	133
Sumatera Selatan	2 938	231	225
Bengkulu	1 180	126	108
Lampung	2 499	225	218
Kep.Bangka Belitung	375	47	45
Kepulauan Riau	390	66	61
DKI Jakarta	264	44	44
Jawa Barat	5 949	626	606
Jawa Tengah	8 461	573	552
DI Yogyakarta	438	78	76
Jawa Timur	8 450	664	648
Banten	1 543	155	154
Bali	709	57	56
Nusa Tenggara Barat	1 130	116	114
Nusa Tenggara Timur	3 129	306	257
Kalimantan Barat	2 028	176	164
Kalimantan Tengah	1 540	136	131
Kalimantan Selatan	1 869	152	141
Kalimantan Timur	970	103	103
Kalimantan Utara	299	50	43
Sulawesi Utara	1 537	167	147
Sulawesi Tengah	1 882	171	153
Sulawesi Selatan	2 929	306	282
Sulawesi Tenggara	1 837	208	199
Gorontalo	658	76	67
Sulawesi Barat	627	69	68
Maluku	1 017	113	108
Maluku Utara	1 092	115	114
Papua Barat	835	144	72
Papua	1 979	291	140
INDONESIA	71 205	6 799	6 258

Lampiran 4. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat dan Provinsi, 2014

Provinsi	Jumlah Desa/ Kelurahan Tidak Ada SD	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Jarak ke SD > 3 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTP	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTP > 6 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTA	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTA > 6 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 154	162	-	-	8	-
Sumatera Utara	1 147	132	1	-	26	9
Sumatera Barat	45	-	-	-	9	5
Riau	56	4	-	-	-	-
Jambi	94	5	1	-	5	3
Sumatera Selatan	299	19	-	-	6	-
Bengkulu	352	18	1	-	19	3
Lampung	133	9	-	-	7	2
Kep.Bangka Belitung	6	1	-	-	2	2
Kepulauan Riau	25	2	-	-	5	2
DKI Jakarta	3	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13	3	-	-	20	2
Jawa Tengah	117	2	-	-	21	2
DI Yogyakarta	-	-	-	-	2	-
Jawa Timur	52	-	-	-	16	5
Banten	8	-	-	-	1	1
Bali	7	-	-	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	11	-	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	141	12	-	-	49	23
Kalimantan Barat	81	24	-	-	12	10
Kalimantan Tengah	29	13	-	-	5	4
Kalimantan Selatan	139	5	-	-	11	3
Kalimantan Timur	56	14	-	-	-	-
Kalimantan Utara	180	28	-	-	7	6
Sulawesi Utara	299	9	-	-	20	6
Sulawesi Tengah	104	11	1	-	19	9
Sulawesi Selatan	101	3	-	-	24	7
Sulawesi Tenggara	435	31	1	-	10	5
Gorontalo	78	3	1	-	10	3
Sulawesi Barat	21	2	-	-	1	1
Maluku	71	9	-	-	5	5
Maluku Utara	104	5	-	-	1	1
Papua Barat	732	233	31	20	103	81
Papua	2 892	1 679	238	164	389	306
INDONESIA	10 985	2 438	275	184	816	508

Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	288	99,65
Sumatera Utara	440	100,00
Sumatera Barat	179	100,00
Riau	164	100,00
Jambi	138	100,00
Sumatera Selatan	230	99,57
Bengkulu	127	100,00
Lampung	225	100,00
Kep.Bangka Belitung	47	100,00
Kepulauan Riau	66	100,00
DKI Jakarta	44	100,00
Jawa Barat	626	100,00
Jawa Tengah	573	100,00
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	664	100,00
Banten	154	99,35
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	116	100,00
Nusa Tenggara Timur	303	99,02
Kalimantan Barat	176	100,00
Kalimantan Tengah	136	100,00
Kalimantan Selatan	152	100,00
Kalimantan Timur	103	100,00
Kalimantan Utara	49	98,00
Sulawesi Utara	163	97,60
Sulawesi Tengah	172	100,00
Sulawesi Selatan	306	100,00
Sulawesi Tenggara	209	100,00
Gorontalo	77	100,00
Sulawesi Barat	69	100,00
Maluku	112	99,12
Maluku Utara	115	100,00
Papua Barat	166	94,86
Papua	433	81,85
INDONESIA	6 957	98,35

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik		Ada Penerangan Di Jalan Utama
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6 427	296	3 663
Sumatera Utara	5 543	1 475	3 662
Sumatera Barat	1 099	350	862
Riau	1 301	1 194	1 036
Jambi	1 339	613	784
Sumatera Selatan	2 886	1 123	2 086
Bengkulu	1 470	244	693
Lampung	2 402	779	1 701
Kep. Bangka Belitung	377	153	307
Kepulauan Riau	294	293	257
DKI Jakarta	267	2	264
Jawa Barat	5 960	257	5 064
Jawa Tengah	8 566	115	8 330
DI Yogyakarta	438	9	428
Jawa Timur	8 457	291	8 055
Banten	1 551	34	950
Bali	716	20	700
Nusa Tenggara Barat	1 114	122	840
Nusa Tenggara Timur	2 624	1 694	298
Kalimantan Barat	1 380	1 239	521
Kalimantan Tengah	838	1 079	421
Kalimantan Selatan	1 903	401	1 634
Kalimantan Timur	647	662	462
Kalimantan Utara	180	380	133
Sulawesi Utara	1 789	258	1 132
Sulawesi Tengah	1 601	897	1 257
Sulawesi Selatan	2 777	734	2 165
Sulawesi Tenggara	1 786	896	785
Gorontalo	690	298	534
Sulawesi Barat	403	440	184
Maluku	654	540	366
Maluku Utara	785	598	453
Papua Barat	443	914	364
Papua	824	2 093	412
INDONESIA	69 531	20 493	50 803

Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	227	78,55
Sumatera Utara	367	83,41
Sumatera Barat	161	89,94
Riau	157	95,73
Jambi	117	84,78
Sumatera Selatan	203	87,88
Bengkulu	109	85,83
Lampung	208	92,44
Kep. Bangka Belitung	37	78,72
Kepulauan Riau	37	56,06
DKI Jakarta	41	93,18
Jawa Barat	469	74,92
Jawa Tengah	560	97,73
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	639	96,23
Banten	124	80,00
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	93	80,17
Nusa Tenggara Timur	244	79,74
Kalimantan Barat	104	59,09
Kalimantan Tengah	109	80,15
Kalimantan Selatan	133	87,50
Kalimantan Timur	78	75,73
Kalimantan Utara	25	50,00
Sulawesi Utara	109	65,27
Sulawesi Tengah	151	87,79
Sulawesi Selatan	271	88,56
Sulawesi Tenggara	188	89,95
Gorontalo	68	88,31
Sulawesi Barat	61	88,41
Maluku	54	47,79
Maluku Utara	58	50,43
Papua Barat	58	33,14
Papua	184	34,78
INDONESIA	5 579	78,87

Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat atau Darat dan Air Menurut Kondisi Jalan dan Provinsi, 2014

Provinsi	Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih				Total
	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5 742	445	241	71	6 499
Sumatera Utara	5 004	344	307	422	6 077
Sumatera Barat	1 068	34	15	22	1 139
Riau	1 279	170	107	237	1 793
Jambi	1 311	114	49	73	1 547
Sumatera Selatan	2 652	288	168	98	3 206
Bengkulu	1 381	85	56	5	1 527
Lampung	2 261	239	89	40	2 629
Kep. Bangka Belitung	370	2	4	2	378
Kepulauan Riau	295	12	5	29	341
DKI Jakarta	259	2	-	2	263
Jawa Barat	5 761	118	77	6	5 962
Jawa Tengah	8 448	78	46	4	8 576
DI Yogyakarta	436	2	-	-	438
Jawa Timur	8 356	87	45	13	8 501
Banten	1 472	42	28	4	1 546
Bali	709	3	4	-	716
Nusa Tenggara Barat	1 073	47	13	6	1 139
Nusa Tenggara Timur	2 608	383	189	63	3 243
Kalimantan Barat	1 123	448	161	270	2 002
Kalimantan Tengah	804	314	123	158	1 399
Kalimantan Selatan	1 698	118	22	146	1 984
Kalimantan Timur	741	158	44	44	987
Kalimantan Utara	238	98	32	49	417
Sulawesi Utara	1 717	37	5	51	1 810
Sulawesi Tengah	1 674	86	30	144	1 934
Sulawesi Selatan	2 686	143	79	75	2 983
Sulawesi Tenggara	1 937	150	67	83	2 237
Gorontalo	669	37	12	17	735
Sulawesi Barat	468	67	45	65	645
Maluku	556	97	39	256	948
Maluku Utara	736	108	46	154	1 044
Papua Barat	867	98	49	285	1 299
Papua	1 302	309	124	2658	4 393
INDONESIA	67 701	4 763	2 321	5 552	80 337

XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH OKTOBER 2015

A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) rupiah terhadap dolar Amerika, selama periode akhir September hingga Oktober 2015 cenderung terapresiasi di 34 provinsi di Indonesia. Level tertinggi nilai tukar (kurs tengah) rupiah pada minggu terakhir September 2015 tercatat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp14.300,00 per dolar AS, sementara pada minggu terakhir Oktober 2015 terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp13.164,00 per dolar AS. Sedangkan untuk level terendah, nilai tukar pada minggu terakhir September 2015 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai tengah sebesar Rp14.705,00 per dolar AS dan pada minggu terakhir Oktober 2015 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai tengah Rp13.730,00 per dolar AS.
2. Pada minggu pertama Oktober 2015, jika dibandingkan dengan minggu terakhir September 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata nasional menguat 659,68 poin atau 4,51 persen. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 966,75 poin atau 6,64 persen. Hampir seluruh provinsi mengalami apresiasi, kecuali Provinsi Sulawesi Tengah terdepresiasi sebesar 50,00 poin atau 0,34 persen.
3. Pada minggu terakhir Oktober 2015, rata-rata nasional nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menguat 1.042,07 poin atau sekitar 7,13 persen, dibanding kurs pada minggu terakhir September 2015. Penguatan rupiah terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yang terapresiasi sebesar 1.461,00 poin atau 9,99 persen. Sebaliknya, apresiasi terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 570,00 poin atau 3,99 persen. Pada minggu ini seluruh provinsi mengalami apresiasi.

Rupiah terapresiasi 1.042,07 poin atau 7,13 persen terhadap dolar Amerika pada Oktober 2015. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah

B. Dolar Australia (AUD)

1. Kurs rupiah terhadap dolar Australia mengalami apresiasi selama Oktober 2015 jika dibandingkan dengan minggu terakhir September 2015. Rata-rata nasional kurs rupiah mencatat apresiasi sebesar 264,00 poin pada minggu pertama Oktober 2015 atau menguat sebesar 2,58 persen. Apresiasi juga terjadi pada minggu terakhir Oktober 2015, yaitu sebesar 532,43 poin atau 5,19 persen dibanding minggu terakhir September 2015.
2. Level tertinggi nilai tukar (kurs tengah) rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir September 2015 terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp10.133,00 per dolar Australia, sementara pada minggu terakhir Oktober 2015 terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp9.600,00 per dolar Australia. Di sisi lain, level terendah nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir September 2015 tercatat di Provinsi Maluku, sebesar Rp10.392,00 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Oktober 2015 tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar Rp10.033,63 per dolar Australia.
3. Pada minggu pertama dan minggu terakhir Oktober 2015, seluruh provinsi mencatat nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dolar Australia. Pada minggu pertama Oktober 2015, penguatan rupiah yang terbesar terhadap dolar Australia terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 519,00 poin atau mencatat apresiasi sebesar 5,12 persen dibanding minggu terakhir September 2015. Pada minggu terakhir Oktober 2015, penguatan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Maluku, yaitu terapresiasi sebesar 678,00 poin atau menguat sebesar 6,52 persen dibanding minggu terakhir September 2015.

Rupiah terapresiasi 532,43 poin atau 5,19 persen terhadap dolar Australia pada Oktober 2015. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Maluku

C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Oktober 2015 secara rata-rata nasional menguat 5,58 poin atau 4,59 persen. Penguatan terbesar pada minggu pertama Oktober 2015 terjadi di Aceh, yaitu 8,50 poin atau 6,94 persen.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu terakhir Oktober 2015 secara rata-rata nasional tercatat menguat 9,38 poin atau 7,72 persen dibanding minggu terakhir September 2015. Apresiasi terbesar pada minggu terakhir Oktober 2015 tercatat di Provinsi Aceh, yaitu 17,50 poin atau menguat 14,29 persen.
3. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir September 2015 tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp115,00 per yen Jepang dan level terendah terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp122,72 per yen Jepang. Sedangkan pada minggu terakhir Oktober 2015, level tertinggi tercatat di Provinsi Aceh sebesar 105,00 per yen Jepang dan level terendahnya terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp113,70 per yen Jepang.

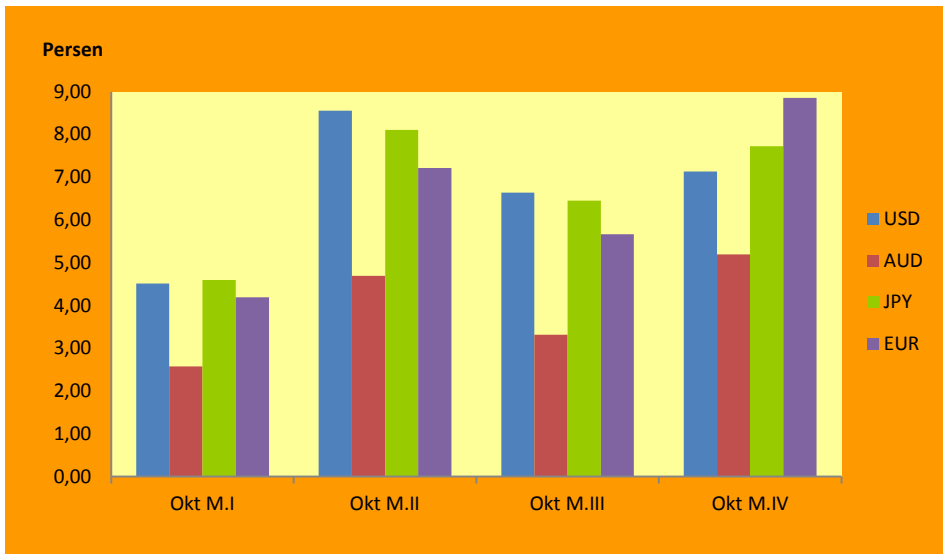
Rupiah terapresiasi 9,38 poin atau 7,72 persen terhadap yen Jepang pada Oktober 2015. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Aceh

D. Euro (EUR)

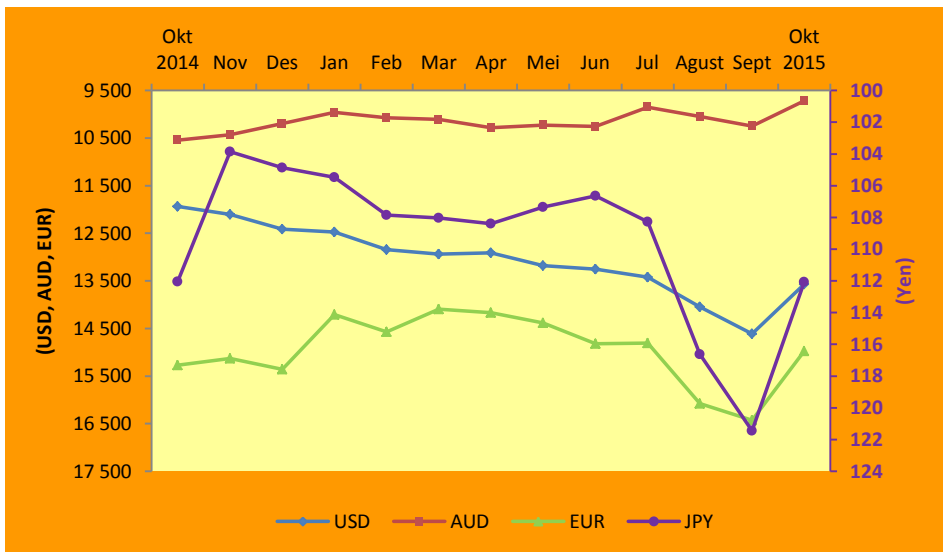
1. Nilai kurs rupiah terhadap euro pada Oktober 2015 mengalami penguatan jika dibandingkan dengan minggu terakhir September 2015. Secara rata-rata nasional, rupiah mencatat apresiasi sebesar 688,31 poin pada minggu pertama atau menguat sebesar 4,19 persen dan mencatat apresiasi kembali sebesar 1.454,46 poin pada minggu terakhir atau menguat sebesar 8,85 persen dibanding minggu terakhir September 2015.
2. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah), pada minggu terakhir September 2015 terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu Rp16.233,13 per euro dan pada minggu terakhir Oktober 2015 terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp14.075,62 per euro. Sementara itu, level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp16.524,75 per euro pada minggu terakhir September 2015 dan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.173,21 per euro pada minggu terakhir Oktober 2015.
3. Pada minggu pertama Oktober 2015, nilai tukar rupiah mengalami penguatan terbesar di Provinsi Papua Barat yang mencapai 1.016,50 poin atau 6,17 persen. Hampir seluruh provinsi mengalami apresiasi kecuali Provinsi Sulawesi Tengah mengalami depresiasi yang mencapai 237,00 poin atau 1,46 persen. Pada minggu terakhir Oktober 2015, apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 2.190,88 poin atau 13,47 persen. Pada minggu ini seluruh provinsi mengalami apresiasi.

Rupiah terapresiasi 1.454,46 poin atau 8,85 persen terhadap euro pada Oktober 2015. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah

Grafik 20.1
Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Oktober dibanding September M.V)



Grafik 23.2
Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Minggu Terakhir)



XXI. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2014

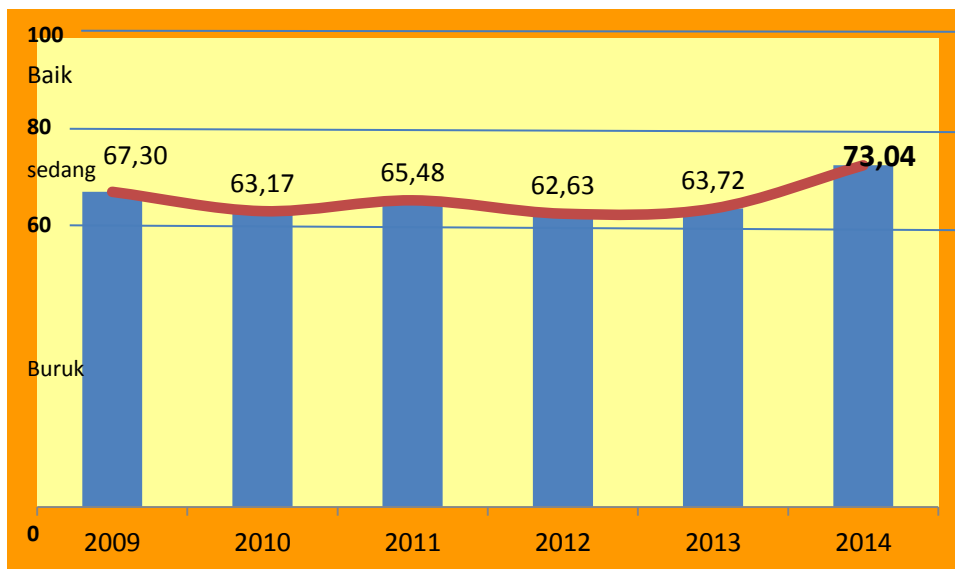
A. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Nasional 2014

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional 2014 mencapai **73,04** dalam skala indeks 0 sampai 100. Berarti naik **9,32** poin dibandingkan dengan IDI 2013 yang capaiannya sebesar 63,72. Berdasarkan tingkat demokrasi yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni: “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60),

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional 2014 sebesar 73,04 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 9,32 poin dibandingkan dengan IDI 2013 sebesar 63,72

maka meskipun mengalami peningkatan cukup bermakna, tingkat demokrasi Indonesia secara tersebut masih dalam kategori “sedang”. Namun capaian ini sudah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 yang dipatok sebesar 73,00 (grafik 21.1)

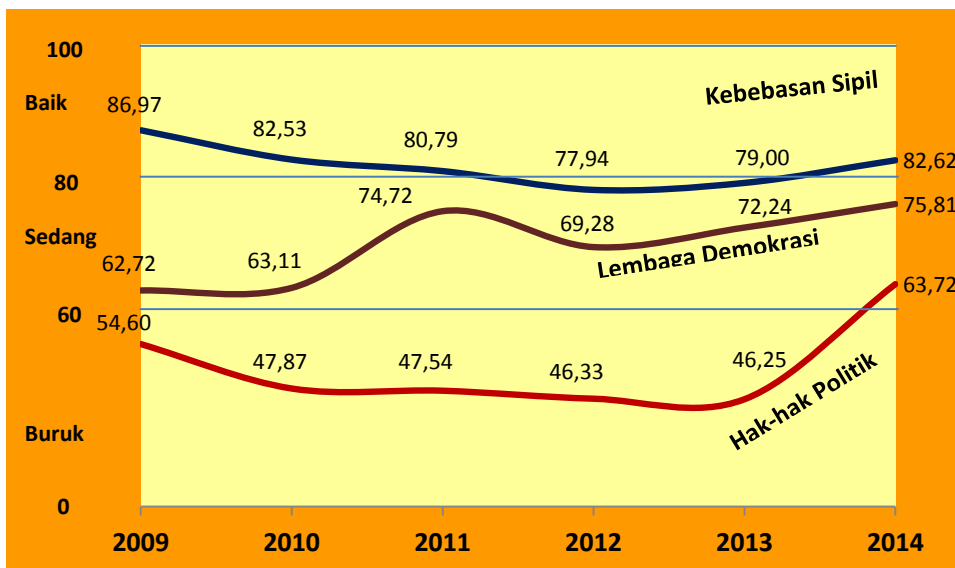
Grafik 21.1
Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009–2014



2. Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*) yang naik 3,62 poin dari 79,00 pada 2013 menjadi 82,62 pada 2014, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) yang naik 17,67 poin dari 46,25 pada 2013

menjadi 63,72 pada 2014, dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) yang naik 3,57 poin dari 72,24 pada 2013 menjadi 75,81 pada 2014.

Grafik 21.2
Perkembangan Indeks Aspek, 2009–2014

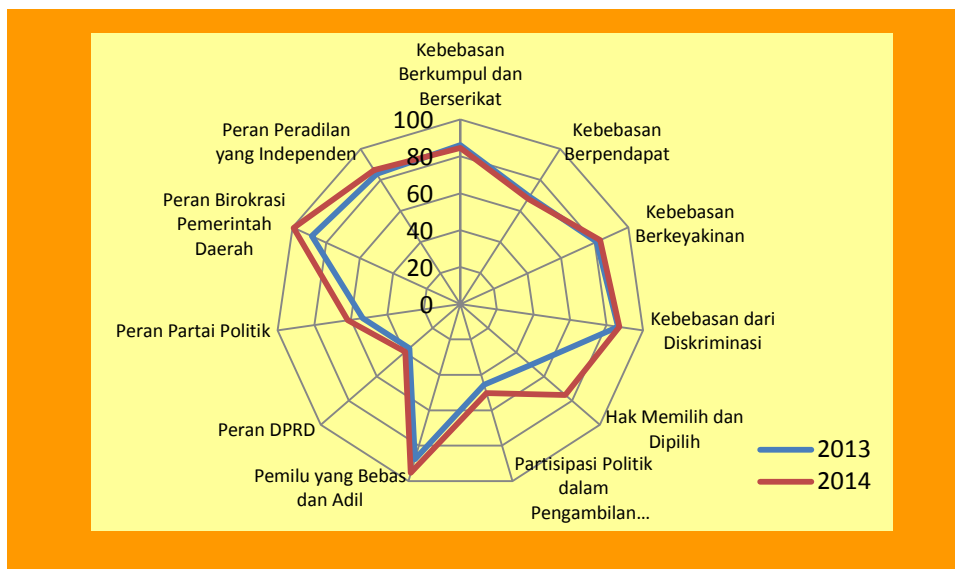


3. Dari sisi indeks variabel IDI 2014 terdapat sembilan variabel yang mengalami peningkatan indeks dan dua variabel mengalami penurunan. Dari sembilan variabel yang mengalami kenaikan, empat diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi

Terdapat 9 variabel yang mengalami peningkatan pada IDI 2014

pada indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih. Pada Grafik 21.3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2013 dengan plot tahun 2014, memperlihatkan variabel Hak Memilih dan Dipilih meningkat tajam, dari kategori buruk menjadi sedang, dari 50,31 pada 2013 menjadi 75,27 pada 2014.

Grafik 21.3
Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2013–2014



4. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, lalu variabel Peran Partai Politik, dan variabel Pemilu yang Bebas dan Adil. Selebihnya berubah tidak cukup bermakna meskipun naik atau turun. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat juga dilihat pada Tabel 21.1.

Tabel 21.1
Perkembangan Skor Variabel, 2013–2014

No	Nama Variabel	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	86,06	84,62
2	Kebebasan Berpendapat	69,15	67,76
3	Kebebasan Berkeyakinan	81,13	83,22
4	Kebebasan dari Diskriminasi	86,22	87,02
5	Hak Memilih dan Dipilih	50,31	75,27
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	45,61	50,28
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	87,67	95,36
8	Peran DPRD	36,62	39,51
9	Peran Partai Politik	53,51	61,76
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	88,58	99,38
11	Peran Peradilan yang Independen	83,94	86,29

5. Pada IDI 2014 terdapat 16 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 27 dan 28 (lihat tabel 17.2 perkembangan

Pada 2014, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 15, 16, 20, 21, 22, dan 23

skor indikator 2013 dan 2014). Namun, masih terdapat masalah kronis (kinerja demokrasi buruk yakni merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 60) yang ditunjukkan melalui indikator 15, 16, 20, 21, 22, dan 23. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah (15) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (20) Alokasi Anggaran Pendidikan/kesehatan, (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, dan (23) Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Tabel 21.2
Perkembangan Skor Indikator 2013 dan 2014

No	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	85,76	83,03
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	88,18	95,76
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	73,54	68,89
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	47,27	62,12
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	82,35	81,95
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	78,18	81,44
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	78,18	89,39
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	80,81	80,30
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	86,97	91,29
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	92,02	91,41
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	84,52	95,75
12	Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	74,64
14	Voters turnout	73,82	75,26
15	Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	54,84	53,26
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	18,71	23,73
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	72,51	76,83

No	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu	91,46	98,90
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	83,89	91,83
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	48,59	49,91
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	20,60	23,27
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	7,36	16,02
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	50,00	58,74
24	Perempuan pengurus partai politik	85,13	88,95
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	92,04	99,90
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	85,12	98,85
27	Keputusan hakim yang kontroversial	92,73	88,03
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	75,15	84,55

B. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 2014

1. Data IDI 2014 menunjukkan seluruh provinsi mengalami perubahan nilai indeks. Terdapat 4 provinsi yang mengalami kenaikan kategori dari kinerja demokrasi sedang menjadi baik (nilai indeks diatas 80 poin) yakni pertama, DKI Jakarta yang naik dari 71,18 pada 2013 menjadi 84,70 pada 2014. Kedua, DI Yogyakarta yang naik dari 72,36 pada 2013 menjadi 82,71 pada 2014. Ketiga, Kalimantan Barat yang naik dari 67,51 pada 2013 menjadi 80,58 pada 2014 dan Keempat, Sulawesi Utara yang naik dari 73,11 pada 2013 menjadi 83,94 pada 2014. Sementara itu pada 2014 sebanyak 29 provinsi berada dalam kinerja demokrasi sedang (nilai indeks antara 60–80 poin).

Tabel 21.3
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2013–2014

Provinsi	IDI 2013				IDI 2014			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	63,56	71,78	48,59	76,97	72,29	69,76	63,94	88,73
Sumatera Utara	58,80	73,65	49,50	54,90	68,02	79,86	61,97	62,75
Sumatera Barat	54,11	54,88	38,97	77,17	63,99	47,21	61,82	88,56
Riau	68,37	77,71	52,19	82,32	68,40	74,35	59,74	74,69
Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34	71,15	78,23	54,01	89,48
Sumatera Selatan	67,12	91,45	50,32	63,22	74,82	86,09	63,57	78,53
Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28	71,70	79,49	63,98	74,16
Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58	71,62	72,06	63,69	83,66
Kep. Bangka Belitung	68,79	85,16	50,60	77,09	75,32	89,80	56,48	87,01
Kepulauan Riau	66,50	80,08	49,63	76,21	68,39	82,47	58,35	66,61
DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69	84,70	91,72	73,94	92,97
Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05	71,52	83,95	65,22	65,89
Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89	77,44	87,87	67,08	80,77
D.I.Yogyakarta	72,36	90,78	50,65	83,69	82,71	86,25	76,07	88,82
Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10	70,36	81,62	56,29	78,54
Banten	69,79	81,39	51,03	85,00	75,50	81,10	63,68	87,22

Provinsi	IDI 2013				IDI 2014			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bali	72,22	92,55	52,87	77,38	76,13	92,16	61,27	79,56
Nusa Tenggara Barat	57,22	59,68	49,60	66,24	62,62	58,73	62,08	68,38
Nusa Tenggara Timur	73,29	95,59	58,83	68,23	68,81	85,92	65,13	53,12
Kalimantan Barat	67,52	97,54	49,36	58,61	80,58	98,44	63,12	85,84
Kalimantan Tengah	64,15	81,89	50,69	63,21	79,00	92,93	66,42	81,48
Kalimantan Selatan	63,71	58,03	56,35	82,54	70,84	58,43	76,45	77,53
Kalimantan Timur	68,13	92,14	55,36	58,20	77,77	93,28	70,42	69,94
Sulawesi Utara	73,11	92,44	62,55	65,56	83,94	93,56	80,89	76,68
Sulawesi Tengah	64,50	90,03	36,78	76,44	74,36	86,56	59,01	83,42
Sulawesi Selatan	65,20	81,30	50,62	68,10	75,30	86,27	73,99	63,58
Sulawesi Tenggara	52,61	84,32	28,95	50,32	70,13	90,89	53,20	70,92
Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22	73,82	82,19	63,67	79,41
Sulawesi Barat	64,02	88,51	44,05	64,94	76,69	90,22	63,64	80,39
Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95	72,72	90,85	60,03	70,09
Maluku Utara	64,06	83,67	48,94	63,40	67,90	76,90	60,61	68,16
Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26	65,65	97,93	39,29	66,93
Papua	60,92	90,21	31,37	71,01	62,15	85,69	42,51	63,75
Indonesia	63,72	79,00	46,25	72,24	73,04	82,62	63,72	75,81

XXII. SUPLEMEN: METODOLOGI

1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*.

Bahan dasar penyusunan diagram timbang (bobot) IHK adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) atau *Cost of Living Survey*. SBH diadakan 5 (lima) tahun sekali, SBH terakhir diadakan tahun 2012, mencakup 136,080 rumah tangga di Indonesia yang dipantau baik pengeluaran konsumsinya maupun jenis barang/jasa yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Berdasarkan hasil SBH diperoleh paket komoditas yang representatif, dapat dipantau harganya, dan selalu tersedia di pasaran. Paket komoditas nasional sebanyak 859 barang/jasa, bertambah dari 774 barang/jasa pada paket komoditas tahun 2007. Hal ini sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Bobot awal setiap barang/jasa merupakan persentase nilai konsumsi setiap barang/jasa terhadap total rata-rata nilai konsumsi per rumah tangga per bulan, berdasarkan hasil SBH. Sejak Januari 2014, penghitungan inflasi mulai menggunakan tahun dasar 2012 (sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007) berdasarkan hasil SBH 2012. Cakupan kota bertambah dari 66 menjadi 82 kota.

Jumlah barang/jasa yang dicakup bervariasi antarkota, yang terkecil di Kota Singaraja sebanyak 225 barang/jasa, sedangkan yang terbanyak di Jakarta sebanyak 462 barang/jasa. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi umum (*headline inflation*)

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

Responden

Harga dari paket komoditas dikumpulkan/dicatat setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan dari pedagang atau pemberi jasa eceran. Mereka termasuk yang berada di pasar tradisional, pasar modern, dan outlet mandiri (seperti toko eceran, praktek dokter, restoran siap saji, bengkel, rumah tangga yang mempunyai pembantu, dan sebagainya),

2. Produk Domestik Bruto

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar

PDB atas dasar harga berlaku (nominal PDB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun Pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap kategori/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama

3. Ekspor-Impor

Data Nonmigas diperoleh dari KPPBC (Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), data Migas dari KPPBC, Pertamina dan BP Migas, Sistem pencatatan statistik ekspor menggunakan *General Trade* (semua barang yang keluar dari Daerah Pabean Indonesia tanpa kecuali dicatat), sedangkan impor pada awalnya menggunakan *Special Trade* (dicatat dari Daerah Pabean Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai “luar negeri”), namun sejak bulan Januari 2008 sistem pencatatan statistik impor juga menggunakan *General Trade*, Sistem pengolahan data menggunakan sistem *carry over* (dokumen ditunggu selama satu bulan setelah transaksi, apabila terlambat dimasukkan pada pengolahan bulan berikutnya),

Data ekspor-impor yang disajikan pada bulan terakhir merupakan angka sementara

4. Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi, Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Data dasar perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 adalah data penduduk hasil SP2010. Penghitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan menggunakan program RUP (*Rural Urban Projection*).

Penghitungan proyeksi penduduk mempertimbangkan perapihan umur, dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Penentuan asumsi merupakan proses yang paling penting, mencakup asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Asumsi kelahiran dibuat berdasarkan tren tingkat kelahiran di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan berhubungan dengan tingkat kelahiran di masa mendatang. Asumsi tingkat kematian dibuat berdasarkan tren tingkat kematian di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait dengan kesehatan. Asumsi migrasi, untuk proyeksi nasional menyangkut migrasi internasional (melintasi batas negara) masih dianggap nol, yaitu seimbang antara yang keluar dan masuk. Sedangkan untuk proyeksi provinsi diperhitungkan migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi.

Proyeksi penduduk Indonesia dibangun dengan dasar kesepakatan dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan pakar kependudukan. Hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi kinerja pemerintah.

5. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk, sedangkan Februari–Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk yang digunakan pada Februari 2014

Definisi yang digunakan antara lain:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

Setengah Penganggur (*Underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Pengangguran Terbuka (*Unemployment*), adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

6. Upah Buruh

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani dan upah buruh industri menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa.

Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani, Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan, Sedangkan data upah buruh industri dikumpulkan melalui Survei Upah Buruh dengan responden perusahaan Industri besar dan sedang.

Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 32 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 66 kota, Sedangkan Survei Upah Buruh dilaksanakan di 33 provinsi.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (I_b) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*). Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Responden Survei Harga Perdesaan adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (I_t) terhadap indeks harga yang dibayar petani (I_b), dimana komponen I_b hanya terdiri dari BPPBM. Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (I_b), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

8. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

Harga di Tingkat Petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

Harga di Tingkat Penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Departemen Pertanian, Menko Bidang Perekonomian, dan Bulog.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

Gabah Kering Giling (GKG) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

Gabah Kualitas Rendah adalah gabah yang mengandung kadar air minimum dari 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Survei Monitoring Harga Gabah dilaksanakan di 25 propinsi di Indonesia yang meliputi 158 kabupaten terpilih (sampel). Dari masing-masing kabupaten terpilih diambil tiga kecamatan tetap dan satu kecamatan tidak tetap. Responden adalah

petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (Maret s.d. Mei dan Agustus) pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

Beras Kualitas Premium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

Beras Kualitas Medium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

Beras Kualitas Rendah adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Survei harga produsen beras di tingkat penggilingan dilakukan di 26 provinsi. Responden survei harga produsen beras di penggilingan adalah unit penggilingan di tingkat kecamatan yang memiliki kapasitas giling cukup besar dan dianggap representatif. Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 478 penggilingan, dengan periode survei dilakukan setiap bulan.

9. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya.

Sesuai dengan *Manual Producer Price Index* (PPI), penghitungan IHP yang ideal dirancang menurut tingkatan produksi-*Stage of Production* (SoP), yakni *preliminary demand* (produk awal), *intermediate demand* (produk antara), dan *final demand* (produk akhir). Namun IHP (2010=100) yang disajikan BPS baru mencakup *final demand* (produk akhir).

IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk menyusun diagram timbang yaitu Tabel Input-Output 2010 Updating. Data IHP tersebut disajikan BPS secara triwulanan, dan baru sampai tingkat/level nasional dalam bentuk indeks gabungan, indeks sektor dan indeks subsektor.

Harga yang digunakan untuk menghitung IHP bersumber dari Survei Harga Produsen dan data sekunder. Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan (tanggal 1-15). Pemilihan responden dilakukan secara *purposive*, sedangkan pemilihan

komoditas menggunakan kriteria *cut off point*. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

Mulai tahun 2014, pengumpulan data Survei Harga Produsen mengalami perluasan cakupan yaitu Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman. Pengumpulan data dilakukan setiap bulan, tanggal 1-15 di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua). Pada triwulan I-2015, penyajian data IHP (2010=100) selain terdiri dari IHP Gabungan yang meliputi Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, juga disajikan IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman.

B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah, Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor,

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dapat digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No,8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No,105/PMK,06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No,11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005, Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi,

Penghitungan IHPB tahun dasar 2010=100 mencakup 317, sedangkan perdagangan internasional masing-masing mencakup 93 kelompok Harmonized System (HS) untuk IHPB ekspor maupun impor, IHPB disajikan dalam 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri, Data harga yang digunakan dalam penghitungan IHPB dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia setiap bulannya, Formula yang digunakan untuk menghitung IHPB adalah formula Modified Laspeyres, Penimbang (*weight*) yang digunakan dalam penghitungan IHPB adalah nilai barang yang dipasarkan oleh pedagang grosir untuk setiap komoditas terpilih yang diolah dari Tabel Input-Output 2010 Updating,

10. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bank Indonesia, Survei ini dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh provinsi di Indonesia, Jumlah sampel STB sebanyak 2,400 perusahaan besar dan sedang, dengan responden pimpinan perusahaan,

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui Survei Tendensi Konsumen (STK), Sebelum triwulan I-2011, BPS hanya melaksanakan STK di wilayah Jabodetabek, tetapi sejak triwulan I-2011 pelaksanaan STK diperluas di seluruh provinsi, Jumlah sampel pada triwulan I-2012 sebanyak 14,232 rumah tangga,

ITB dan ITK dihitung dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa variabel, Tujuan penghitungan ITB dan ITK adalah memberikan informasi dini tentang perkembangan perekonomian baik dari sisi pengusaha maupun sisi konsumen serta perkiraan kondisi bisnis dan kondisi konsumen triwulan mendatang,

11. Produksi Tanaman Pangan

Angka produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar).

Angka Ramalan II (ARAM II) 2015, terdiri dari angka realisasi Januari-Agustus 2015 dan angka ramalan September-Desember 2015 berdasarkan realisasi luas tanaman akhir bulan Agustus 2015. Data realisasi luas panen diperoleh dari laporan bulanan Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) secara lengkap dari seluruh kecamatan di Indonesia. Data realisasi produktivitas diperoleh dari hasil Survei Ubinan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2,5mx2,5m saat petani panen yang dilakukan pada *subround* 1 dan 2 oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian setempat.

Penghitungan produksi ARAM II 2015 dilakukan menurut *subround* sebagai berikut:

1. **Produksi *subround* 1** (Januari–April) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 1 dengan realisasi produktivitas *subround* 1.
2. **Produksi *subround* 2** (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian antara angka realisasi luas panen *subround* 2 dengan realisasi produktivitas *subround* 2.

3. **Produksi *subround 3*** (September–Desember) merupakan hasil perkalian antara angka ramalan luas panen *subround 3* dengan angka ramalan produktivitas *subround 3*.
4. **Produksi Januari–Desember** merupakan penjumlahan produksi *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
5. **Luas panen Januari–Desember** merupakan penjumlahan luas panen *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
6. **Produktivitas Januari–Desember** adalah hasil bagi antara produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember.

12. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro, Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, Indeks produksi industri besar dan sedang merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilakukan secara bulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala besar dan sedang, Banyaknya perusahaan IBS yang ditetapkan sebagai sampel adalah 1.703 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan “Metode Divisia”, Indeks produksi industri mikro dan kecil merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang dilakukan secara triwulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala mikro dan kecil, Banyaknya perusahaan IMK yang ditetapkan sebagai sampel adalah 24.000 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi IMK triwulanan menggunakan “Metode Paasche yang dimodifikasi”, Semua Indeks disajikan pada level 2-digit KBLI 2009 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009), Indeks produksi IBS dan IMK digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat pertumbuhan produksi IBS dan IMK, yang disajikan dalam BRS Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur triwulanan,

13. Pariwisata

Data wisatawan mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di

Indonesia, Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew WNA*, baik laut maupun udara, Untuk data karakteristik wisman yang lebih detil diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*),

Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel diperoleh dari hasil Survey Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia, Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya,

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun,

TPK Hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia,

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

14. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s,d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut, Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri, Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

15. Kemiskinan

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- e. Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna (seluruh penduduk mempunyai pendapatan yang sama). Sementara Gini Rasio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai Gini Rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
- f. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan dan Gini Rasio Maret 2015 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan Maret 2015. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

16. Produksi Hortikultura

Pengumpulan data produksi dan luas panen hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Tingkat Kecamatan dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). Daftar nama kecamatan yang digunakan keadaan pada Semester I Tahun 2013 dengan jumlah kecamatan sebanyak 6.911 kecamatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data

dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pencatatan dan pengolahan baik di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi maupun tingkat nasional.

Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai. Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting.

Bentuk hasil produksi cabai rawit (cabai rawit merah dan cabai rawit hijau) adalah buah segar dengan tangkai.

Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun.

17. Struktur Ongkos Usaha Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan 2014

Survei usaha rumah tangga pertanian menggunakan 2 jenis kerangka sampel yaitu kerangka sampel pemilihan blok sensus dan pemilihan rumah tangga. Untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 yang distratifikasi menurut jenis komoditas utama yang diurutkan menurut strata.

Blok sensus yang memenuhi syarat (*eligible*) adalah blok sensus yang memiliki jumlah *eligible* rumah tangga sebanyak 10 atau lebih. Sedangkan, kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman pangan hasil pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut komoditas utama dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan penangkapan ikan, serta tanaman kehutanan siap tebang.

Komoditas yang dicakup dalam survei ini adalah komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian dan memiliki batas minimal usaha yang ditentukan kementerian terkait.

Batas Minimal Usaha dan Jumlah Sampel

Subsektor Pertanian	Komoditas	Batas Minimal Usaha	Jumlah Sampel		
			Musim Kemarau	Musim Hujan	Jumlah
Tanaman Pangan	Padi Sawah	1.700 m ²	55.964	61.291	117.255
	Padi Ladang	1.700 m ²	2.448	3.949	6.397
	Jagung	1.500 m ²			67.100
	Kedelai	2.000 m ²			9.382
Tanaman Hortikultura	Cabai Merah	200 m ²	13.542	6.090	19.632
	Cabai Rawit	200 m ²	24.067	10.265	34.332
	Bawang Merah	140 m ²	6.604	2.993	9.597
	Jeruk	25 pohon			7.300
Tanaman Perkebunan	Kelapa Sawit	15 pohon			27.726
	Karet	250 pohon			46.569
	Tebu	650 m ²			8.831
Peternakan	Sapi Perah				1.420
	Sapi Potong				59.537
	Ayam Ras Pedaging				897
	Ayam Ras Petelur				568
Budidaya Perikanan	Rumput Laut				8.011
	Bandeng				9.444
	Udang Windu				3.550
Penangkapan Ikan	Kapal Motor				6.733
	Perahu Motor Tempel				22.354
Budidaya Kehutanan	Jati				28.917
	Mahoni				9.880
	Sengon				26.203

Metode sampling yang digunakan adalah dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga usaha subsektor hasil pencacahan lengkap (ST2013-L). Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematis. Rumah tangga usaha pertanian terpilih diwawancarai oleh petugas yang telah dilatih.

Pengumpulan data biaya produksi berpedoman pada prinsip *opportunity cost*, yaitu dilakukan penilaian harga pasar untuk lahan milik sendiri, benih produksi sendiri, dan pekerja keluarga tidak dibayar.

Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau

seluruh hasilnya untuk dijual. Untuk tanaman pangan, termasuk juga yang bertujuan untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual.

Nilai Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumahtangga dari usaha per satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam.
- Tanaman hortikultura: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan usaha per 100 pohon tanaman menghasilkan selama setahun yang lalu untuk tanaman tahunan (jeruk).
- Tanaman perkebunan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman perkebunan untuk tanaman semusim (tebu) dan tanaman tahunan (kelapa sawit dan karet) selama setahun yang lalu.
- Peternakan: adalah total nilai produksi yang bersumber dari penambahan bobot, produksi telur dan susu, produksi ikutan, dan jasa peternakan selama setahun dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha peternakan per ekor (sapi potong dan sapi perah) atau per 1.000 ekor (ayam ras petelur), atau per 5.000 ekor (ayam ras pedaging) yang cara pemeliharaan tenak dikandangan.
- Budidaya ikan: adalah nilai produksi budidaya yang dihasilkan rumah tangga usaha budidaya ikan per siklus per satuan tertentu (rumput laut, bandeng dan udang windu dalam satuan hektar).
- Penangkapan ikan: adalah nilai dari produksi hasil tangkapan rumah tangga usaha penangkapan ikan dalam satu trip yang dihitung mulai dari berangkat melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat asal.
- Tanaman kehutanan: adalah nilai produksi (selisih nilai dari tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang) dan ongkos produksi untuk usaha budidaya tanaman kehutanan yang siap tebang dan atau ditebang selama setahun yang lalu per 100 pohon.

Ongkos/Biaya Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (padi adalah gabah kering panen/GKP, jagung adalah pipilan kering, dan kedelai adalah biji kering) dan sudah memasukkan perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas bunga yang dihitung dengan cara imputasi sesuai harga pasar.
- Tanaman hortikultura: adalah rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk usaha satu hektar tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan per 100 pohon untuk tanaman tahunan yang menghasilkan (jeruk) pada periode pencacahan yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (cabai merah dan cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai, bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun, dan jeruk adalah buah segar) dan sudah memperkirakan/mengimputasi besarnya sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan bunga kredit model sendiri/bebas bunga.
- Tanaman perkebunan: adalah seluruh ongkos/biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu untuk seluruh bidang tanaman untuk tanaman semusim dan pada seluruh pengeluaran tanaman perkebunan semusim yang panen. Benih, tanaman pelindung, pupuk, stimulan, dan pestisida yang bukan pembelian diperkirakan nilai sesuai harga setempat.
- Peternakan: adalah biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu oleh rumah tangga yang cara pemeliharaan ternak dikandangan. Biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar dibayarkan oleh peternak ditambah dengan imputasi dari biaya yang tidak dibayarkan oleh peternak seperti biaya pakan yang tidak dibeli, biaya pengurusan ternak oleh pekerja tidak dibayar (peternak atau pekerja keluarga).
- Budidaya ikan: adalah biaya yang meliputi biaya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, pakan dihitung baik yang berasal dari pembelian maupun bukan pembelian (diperkirakan nilainya), upah pekerja baik pekerja

dibayar maupun pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (diperkirakan upahnya), dan biaya lainnya mencakup sewa lahan (termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri dan bebas sewa), alat/sarana usaha (termasuk perkiraan bebas sewa dan perbaikan kecil/pemeliharaan) dan lainnya (bunga kredit/pinjaman, penyusutan barang modal, pajak tak langsung, pengangkutan, jasa perikanan, dan sebagainya).

- Penangkapan ikan: adalah biaya yang meliputi upah pekerja dihitung untuk pekerja dibayar maupun perkiraan upah untuk pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah), oli/pelumas, garam/es, perbekalan baik yang berasal dari pembelian maupun perkiraan nilai dari bukan pembelian, biaya lainnya (sewa alat/sarana, penyusutan barang modal), dan lainnya (umpan, pajak tak langsung, jasa perikanan, wadah, dan sebagainya).
- Tanaman kehutanan: adalah seluruh ongkos/biaya yang dikeluarkan yang sudah termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas sewa selama setahun yang lalu per 100 pohon untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang (tanaman yang sudah cukup umur dan secara ekonomis sudah dapat dipanen/ditebang atau digunakan kayunya).

Periode tanam musim kemarau (MK) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Februari–September 2013 dan atau Februari–Mei 2014.

Periode tanam musim hujan (MH) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Oktober 2013–Januari 2014.

Produktivitas ayam ras petelur adalah jumlah butir telur yang dihasilkan dari 1.000 ekor ayam ras petelur produktif per hari.

Survei Kehutanan 2014

Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling dua tahap terstratifikasi. Pada tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus (blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan (yang di-*overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan) dan diurutkan menurut strata), dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga hasil ST2013-L. Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih 10 rumah

tangga secara sistematis. Jumlah sampel untuk Survei Kehutanan sebanyak 99.993 rumah tangga.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Perladangan berpindah adalah suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional/pindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air.

Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar adalah kegiatan memungut/mengambil hasil hutan dan juga menangkap satwa-satwa liar di hutan seperti: memungut kayu, getah, kulit kayu, buah-buahan, rumput, rotan, tumbuhan obat, gaharu, serta menangkap ayam hutan, babi hutan, rusa, dan sebagainya.

18. Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu: desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait). Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Salah satu tujuan podes adalah menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah, seperti perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG.

BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. IKG disusun melalui metode Analisis Faktor. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

19. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail *spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi *real-time* yang beredar di internet, dan sebagainya.

Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

20. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Aspek demokrasi tersebut adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
2. Dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
3. Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator, variabel, dan aspek;

kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Demokrasi Indonesia.

4. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 1–100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 1–100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2087-930X



9 772087 930006